



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBENARAN ETIS *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DALAM KERANGKA TEORI UTILITARIANISME RICHARD
MERVYN HARE**

SKRIPSI

**ASTI DWI SAVITRI
NPM. 0806465913**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBENARAN ETIS *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DALAM KERANGKA TEORI UTILITARIANISME RICHARD
MERVYN HARE**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora pada Program Studi Ilmu Filsafat**

ASTI DWI SAVITRI

NPM. 0806465913

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT

DEPOK

JUNI 2012

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 20 Juni 2012



Asti Dwi Savitri

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Asti Dwi Savitri

NPM : 0806465913

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Asti Dwi Savitri
NPM : 0806465913
Program Studi : Ilmu Filsafat
Judul : Pembenaran Etis *Corporate Social Responsibility*
dalam Kerangka Teori Richard Mervyn Hare

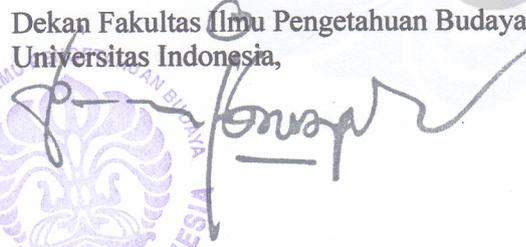
Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Naupal, S.S., M.Hum ()
Penguji : Herminie Soemitro, S.S., M.A. ()
Penguji : Vincensius Jolasa, Ph.D ()
Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok
Tanggal : 20 Juni 2012

oleh

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia,


Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Tidak ada yang pernah tahu kemana hidup akan membawamu. *Rhythme* langkah kaki sendiri pun demikian, melemparkan saya pada sebuah zona yang tidak biasa. Awalnya ini terasa sangat asing, *complicated*, dan tidak mudah untuk melebur. Segala kompleksitas itu memaparkan realita dan fakta yang terkadang masih sulit untuk saya pahami. Dengan sangat bersusah payah akhirnya saya mampu tiba di penghujung. Sebuah *survive*-bilitas yang penuh kebersyukuran. Tuhan terimakasih atas segala pembekalan indah ini. Terimakasih sungguh, atas semua yang tidak bisa panjang lebar diungkapkan secara detail dari seorang yang tidak seberapa ini. “*Sesungguhnya pelindungku adalah Allah*” (QS 7 : 196), zat Maha Sempurna yang mengatur segalanya dengan jalan yang indah.

Signifikansi simbolik ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua saya **Oskar Trihadi, S.H.** dan **Sri Eliyati, S.E.**, yang amat saya cintai. Betapa segala pengorbanan tidak akan pernah bisa membalas segala bulir keringat dan air mata. Papa adalah ayah terhebat di seluruh negeri. Wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak pernah saya ketahui, namun tenang temaram dengan penuh kesabaran dan pengertian luar biasa. Saya mencintai papa dengan segala kemasam canda gurau yang tidak pernah terlewat. Laki-laki utama dan pertama dalam hidup saya yang tidak pernah akan terganti. Mama, adalah segalanya dalam hidup saya. Mama telah menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang berlimpah. Mama adalah inspirasi, reformasi, teman, sahabat, dan ketergantungan dengan seluruh kasih sayang yang bercampur yang membentuk sosok yang selalu dibutuhkan. Doa dan pelukan mama menjadi obat terampuh dari *dopping* apapun.

Selanjutnya, ucapan terimakasih saya ucapkan kepada kakak laki-laki tertua sekaligus saudara kandung satu-satunya, **Aries Karyadi, S.T.** Magnet senama yang tolak menolak selalu menjadi perumpamaan yang terlintas dalam pikiran ini. Kami tidak pernah sejalan dan ada saja kandungan ion-ion negatif dari elektromagnetik sehingga selalu saja ada perselisihan kecil antara kami. Kata maaf adalah kata yang paling ingin terlontar dari mulut saya. Maaf karena selalu

merepotkan, menyebalkan, atau menjadi beban yang hidup yang tidak bisa dilipat atau disimpan sekadar di saku celana agar diam dan tidak berisik. Bagaimanapun, rasa kebanggaan dan kagum terus mengalir sehingga tidak perlu mengidamkan sosok lain atau menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa meraih prestasi-prestasi sulit, yang bahkan bisa ia lumpuhkan. Terimakasih atas transfer ilmu, doa, energi, maupun materi yang selalu mendukung kelancaran perjalanan penulis. Juga kepada kakak ipar saya **Rianti Yusti Madina, S.H.**, yang selalu sabar, penuh dukungan dan perhatian. Juga untuk semua keluarga besar penulis.

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada pembimbing akademis sepanjang perjalanan perkuliahan penulis, **Ibu Herminie Soemitro, S.S., M.A.** Ibu, layaknya malaikat yang dikirimkan Tuhan kepada saya. Sosok Ibu yang selalu merasakan penderitaan anaknya dan memperjuangkannya dengan segala upaya. Entah dengan apa ucapan dari lubuk hati terdalam ini mampu terungkapkan. Terimakasih atas arahan, doa, bimbingan, ilmu, perjuangan, *support*, dan semuanya yang hanya Tuhan yang dapat membalasnya. Menempatkan Ibu dalam posisi sulit, atau terkadang malah memperburuk keadaan. Beribu maaf saya haturkan kepada dosen terbaik sepanjang perjalanan ini. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kebahagiaan kepada Ibu.

Terimakasih saya haturkan kepada pembimbing skripsi saya, Bapak **Dr. Naupal, S.S., M.Hum** atas jadwal bimbingannya yang mungkin menyita waktu Bapak, untuk pengertian luar biasa, ilmu, bimbingan, arahan, perhatian, dan dukungan penuhnya. Terimakasih telah memperjuangkan, mempermudah, dan memahami seluk beluk kecemasan saya. Kata maaf juga saya iringi sepanjang perjalanan bimbingan, maupun selama berstatus sebagai mahasiswa. Berkat Bapak skripsi ini selesai, mengantarkan kelulusan disertai kebahagiaan dari sambutan pihak keluarga.

Terimakasih kepada **Bung Sandi** sebagai pembekalan awal penulis mencari inspirasi, bertanya, dengan *support* dan masukan, buku-buku, serta banyak teori. Dari Bung Sandi, ide ini berjalan. Terimakasih kepada para dewan dosen Departemen Filsafat FIB UI, Bapak **Vincensius Jolasa Ph.D**, Bapak **Fuad Abdillah M.Hum**, Bapak, **Y.P. Hayon M.Hum**, Ibu **Dr. S. Margaretha**

Kushendrawati, Prof. **Tommy F. Awuy S.S.**, **Dr. A. Harsawibawa**, Ibu **Dr. Vincentia Irmayanti**, Bapak **Dr. Budiarto Danujaya M. Hum**, Bapak **Donny Gahral Adian M.Hum**, **Dr. Achjar Yusuf Lubis**, Bapak (Alm.) **I Wayan Surwira Satria M.M.**, **Eko Wijayanto M. Hum**, **Mba Saraswati Dewi M.Hum**, **Bung Fristian M.Hum**, **Mba Ikhaputri S.Hum**, dan *The Master of Philosophy Lecturer*, Bapak **Rocky Gerung**.

Berikutnya, terimakasih juga saya ucapkan kepada teman-teman terbaik Filsafat'08. **Shanti Marlina**, **Lefita Gozali**, tempat keluh kesah dan menampung segala curhatan penulis yang entah siapa lagi yang bisa mendengarkan sebaik kalian. Terimakasih kepada **Ajeng Lesmini**, **Sistha Widyaresmi**, **Ica-Khoirunnisa**, **Ranggi Marseti**, **Shane**, **Steffi**, **Yuwita**, **Della**, **Willy**, **Arfan**, **Liana**, **Meta**, **Dadah**, **Okvi Ellyana**, **Dona Niagara Dinata**, **Nurul**, **Abby Gina**, **Bella Marcellina Sandiata**, **Indah**, **Ismi**, **Erby**, **Agrita**, **Doni**, **Agung**, **Bayu**, **Sona**, **Irsyad**, **Sopa**, **Mellisa**, **Yasin**, **Daru**, **Mahdityo**, **Boni** dan **Hario Susanto**. Juga kepada **Kartika**, **Nashruddin**, **Rasyid**, **Richard Boone** dan **Giovannie Virginia**. Terimakasih atas semuanya, juga karena telah mengisi cerita perjalanan penulis. Juga kepada Filsafat 2007, **Izky**, **Coni**, **Iqit**, **Hari Purwanto**, **Kari G. Pramudya**, **Wira**, **Teia**, **Richard**, **Alfa**, **Era**, **Tika**, **Heri**, **Nia**, **Prayoga**, **Leo**, **Taufik**, **Dipa**, **Johan**, **Nila**, **Winnie**, dan semua yang maaf jika belum tersebutkan. Kepada Filsafat 2006, Filsafat 2005, Filsafat 2004, maupun senior lainnya, serta Filsafat 2009, 2010 dan generasi selanjutnya.

Dukungan dan pertolongan dari asupan kediaman penulis, **Fenny Triagustina**, **Cici**, **Ratih Maya**, **Ninda J.P.**, **Gina Ganarti**, dan semua warga wisma asri. Keberlangsungan dari *survive*-bilas ini dilanjutkan dari kediaman sebelumnya **Ganesh-Galz**, **Sarah Faisal Rosa, S.H.**, **Irma Sriwijayanti, S.E.**, **Widya Ratna Pratiwi, S.Sos.** sebagai teman terbaik dan selalu penulis rindukan. Entah dengan apa waktu bisa kembali dengan segala energi positif, obrolan berkualitas, kehidupan yang bisa 'terbang', dan segala kegilaan lainnya itu, mampu terulang.

Sahabat penulis **M. Yoerliansah Tangkari S.T.**, **Feni Shintarika S.Pt.**, **Mba Astri Ayu Chayani**, yang mana selalu ada saat penulis butuhkan. Tempat

penulis mengungkapkan segala resah gulana, kegelisahan, setumpuk permasalahan, meminta *advice*, bantuan dan semuanya. *Best friends never end for Metha Risa Sujana, S.Ked, Pralia Winda Sari S.Ked, Yunia Wiraswasti, Zuftia Ristarani, Tiara Mailisa, Rismawati Saputri, Giska Sevlanda, Risa Rikafitri*. Untuk Dini Apdelina, Moliya Nurmalisa, M. Arbi Ramadhan, dan Kak Intan atas semua semangatnya. Serta Kak Imam Nur Ramdhany, Ericky Bobby Ferdinanda, Andri Indrayasa, Kak Martin, Kak Frenki, dan seseorang yang tidak mau disebutkan namanya.

Teman-teman di Telkom, penulis menyadari bahwa menjadi sebuah keberkahan bertemu dengan orang-orang sebaik kalian. Sarah, Gini, Aish, Kadut, Ririn, Eti, Wiwin, Belo, Shinta. Juga teman terbaik selama setahun di Bandung Febri, Rinrie, Kiky, Ita, Rivan, Gawan, Doni, serta semua teman *Black A Simulation 2007*. Kalian memberikan pelajaran dalam perjalanan penulis.

Juga semua rekan sejawat FIB, teman di UI, bedah kampus UI 2010 (*emer dan irma*), BEM UI 2011, relasi kober, teman-teman Smanda, Spanda, maupun Persit (*gank planet* yang penulis simpan sebagai kenangan terbaik) akan selalu ada dalam memori penulis.

Untuk sosok inspirasi dari tulisan maupun retorika yang penulis temui, semangat membangun pada setiap hari senin terakhir semester delapan, Bapak Glory Kemenbudpar (tempat penulis magang), solistice, dan Dewi Lestari yang sangat membantu menemukan karakter dan jalan berfikir.

Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi yang siapapun itu, terimakasih telah menjadi baik dan bertahan di sana.

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan. Jika hidup bisa kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk kuucapkan terima kasih.

It have never been easy, but it would be worthy since everything happened for a beautiful reason. It's all about my struggle and how I survive. To show everyone I'm right and do not get the wrong train, how I put aside my hatred for anyone, and how I'm thankful for 'philo' and 'sophia'. No constant mind, just like a philosopher's mind, the sea of human perception.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asti Dwi Savitri
NPM : 0806465913
Program Studi : Ilmu Filsafat
Departemen : Ilmu Filsafat
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Pembenaran Etis Corporate Social Responsibility* dalam Kerangka Teori Utilitarianisme Richard Mervyn Hare, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 20 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Asti Dwi Savitri)

ABSTRAK

Nama : Asti Dwi Savitri
Program Studi : Filsafat
Judul : Pembeneran Etis *Corporate Social Responsibility* dalam Kerangka Teori Utilitarianisme Richard Mervyn Hare

Skripsi ini membahas tentang dialog reflektif dan pembeneran terhadap tindak implementasi *Corporate Social Responsibility* sebagai solusi mengatasi mitos bisnis amoral. Isu sentral dibuka dengan diskursus prinsip moral universal, etika yang rasional, dan tanggung jawab kolektif di bawah legalisasi. Penulis menggunakan kerangka utilitarianisme R.M. Hare dengan prinsip perspektivisme universalisabilitas sebagai pertimbangan kasus ini. Pada akhirnya pemberlakuan CSR sebagai keputusan moral universal, diperkuat dengan pertukaran posisi yang memberikan ruang dan reflektisitas terhadap *interest* masing-masing individu, serta *sense of common good* untuk mampu melebur serta menyamakan persepsi tentang konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan.

Kata Kunci : Etika, tanggung jawab, universalisabilitas, perspektivisme, *corporate social responsibility*.

ABSTRACT

Name : Asti Dwi Savitri
Major : Philosophy
Title : Ethic Justification for Corporate Social Responsibility Based on Utilitarianism Richard Mervyn Hare's Theory.

This thesis discusses about reflection and justification for the act of implementation Corporate Social Responsibility which is be a solution to overcome the myth of business amoral. The central issue begin with universal moral principles discourses, rational ethics, and legalitation for collective responsibility. The author uses the framework of utilitarianism R. M. Hare with perspectivism universalisability theory as consideration of this case. In the end, the implementation of CSR as universal moral decision is reinforced with switch role approach that provides space and reflection for people's interest, and the sense of common good to merge with the uniform perception about the consequences from every act.

Keywords : Ethics, responsibility, universalisability, perspectivism, corporate social responsibility.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	ix
ABSTRAK/ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Kerangka Teori	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 <i>Thesis Statement</i>	9
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB 2. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>) DILIHAT DARI SISI ETIKA	12
2.1 Studi Terhadap CSR	12
2.1.1 Definisi dan Hakikat CSR	12
2.1.2 Teori Pendekatan CSR	15
2.2 CSR dan Etika Bisnis	20
2.3 Konsep Pendukung CSR Terhadap Lingkungan dan Masyarakat	30
BAB 3. PENDEKATAN TEORI-TEORI UMUM ETIKA TERHADAP BISNIS DAN KORPORASI	34
3.1 Pengertian Filsafat Moral	34
3.2 Aliran Etika	37
3.2.1 Hedonisme	37
3.2.2 Eudemonisme	38
3.2.3 Egoisme	39
3.2.4 Deontologi	40
3.2.5 Utilitarianisme	41
BAB 4. PEMBENARAN ETIS <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>) MENURUT PEMIKIRAN R. M. HARE	48
4.1 Biografi R.M. Hare	48
4.2 Tokoh-Tokoh yang Mempengaruhi Pemikiran R.M. Hare	54
4.3 Pemikiran Perspektivisme dan Universalisabilitas R.M. Hare	58
4.4 Refleksi Kritis dari Kontribusi Implementasi CSR	71
BAB 5. PENUTUP	85
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Periodisasi Konsep CSR di Indonesia.....	16
Gambar 2.1.1 Elemen-elemen yang membentuk CSR	17
Gambar 2.1.2 <i>Corporate Citizenship and Corporate Culture</i> dalam bentuk evaluasi <i>performance</i> organisasi sosial.....	19
Gambar 4.1 Embrio kemunculan CSR dan Sirkulasinya	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis korporasi dewasa kini berkembang dengan sangat pesat dan gigantis. Ia mampu menjadi fenomena baru yang menguasai kehidupan masyarakat dan mempengaruhi negara. Kekhawatiran akan dampak dari menjamurnya bisnis korporasi ini, memunculkan berbagai wacana mengenai tanggung jawab sosial. Maraknya pembahasan pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), memunculkan berbagai perspektif mengenai fokus utama etika di dalam bisnis dan tanggung jawab kolektif. Idealisnya sebuah tanggung jawab tidak datang, baik dari akibat hukum maupun sebuah sanksi yang memaksa, namun lebih pada suatu kewajiban moral dari kesadaran serta hati nurani manusia sebagai *being* yang bebas. Kapasitas tanggung jawab kolektif yang mencakup tindakan penyeragaman persepsi sekumpulan *being* adalah bukti bahwa definisi tanggung jawab moral kian meluas dari waktu ke waktu.

Dilema moralitas yang muncul ke permukaan terjadi ketika tanggung jawab yang bermuatan sosial tersebut terbentuk atas situasi yang menempatkan *being-being* di dalam ruang lingkup yang dikehendaki secara universal. Dengan memberdayakan kehadiran satu sama lain sebagai partisipatoris yang saling berelasi, *being* ditempatkan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan klaim etis tertentu berdasarkan kesejahteraan umum. Individu pun serta merta mengesampingkan *desire* dan abstraksi kesadarannya. Penulis merasa perlu mereifikasi dan menelaah dilema etis dalam lingkup etika korporasi dengan mensyaratkan universalisabilitas atas pertimbangan kebahagiaan substansial umum. Maka, penulisan ini lahir dari rasa ketertarikan tersebut untuk membahas topik etika terapan, khususnya etika bisnis yang dewasa ini mengalami interpretasi

ambiguitas. “*Business is the business of business person*” (Newman & Sorensen, 1985)¹.

Mitos bisnis amoral yang diperkenalkan pertama kali oleh Richard T. De George. Ia mengamati para pebisnis Amerika yang berorientasi pada pencarian keuntungan semata. Etika dianggap terpisah dan harus dibebaskan dari ranah bisnis. Mitos bisnis amoral muncul sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri para kalangan bisnis Amerika dan negara berkembang lainnya. Mitos ini diduga berkembang bagi masyarakat menengah bawah dalam negara yang memiliki sejarah sosial yang tidak menganut tata nilai feodal. Disamping persaingan para pebisnis akan kelangkaan sumberdaya (*scarcity*), serta kebutuhan (*need*) manusia yang tak pernah terbatas, mekanisme persaingan di dalam bisnis menjadi sangat tajam, bebas, dan mengesampingkan perhatiannya terhadap pedagogi moral. Dalam mitos ini, perilaku bisnis diasumsikan sama sekali tidak dapat dinilai secara moral. Bisnis juga dianggap akan selalu netral karena wacana bisnis adalah wacana yang berbeda dan etika tidak punya relevansi bagi bisnis. Dalam persepsi mitos ini, bisnis bukan tentang sikap moral yang buruk atau melanggar moralitas, melainkan terlepas dari khasanah moralitas. Namun pada perkembangannya, akhirnya diskursus bisnis amoral pun beralih menjadi bisnis *immoral* karena tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Dalam kehidupan praktis kini, bisnis amoral merupakan sebuah mitos. Mitos ini membutuhkan kajian ulang disertai dengan wacana diskursusnya yang perlu dibahas dalam ranah filsafat. Kemudian mitos bisnis amoral pun berkembang dan membius masyarakat tertentu menjadi fenomena populer bahwa lazimnya bisnis mampu mengambil tindakan etis dan keputusan bermoral. Karena pada prakteknya, bisnis bergulat dengan interaksi manusia secara konkret, bersentuhan dengan kebutuhan dan harapan sosial, serta berdialog dengan kebiasaan kulturisasi setempat. Oleh karena itu, etika harus dimasukkan ke dalam

¹ Wiryawan, 1998. (hlm. 41). Newman, F.L., & Sorensen, J.E. (1985). *Integrated clinical and fiscal management in mental health*. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.

rumusan bisnis karena kesuksesan kinerja etis seiring dengan kesuksesan bisnis sehingga tiba pada semboyan “*good ethics, good business*” (Jacqueline Dunckle)². Perkembangan bisnis korporasi berujung pada kekhawatiran akan dampak kapitalisme dan sosialisasi materialis sehingga diperlukan asosiasi penyuaaran hak-hak komunal masyarakat yang terkena dampak langsung. Komunitas sekitar tempat berlangsungnya proses pengembangan bisnis semakin termarginal. Untuk itu, CSR hadir sebagai penengah dan solusi dari utilitarianisme yang berusaha mengedepankan *welfarism* mayoritas masyarakat yang teralternisasi.

Manusia sebagai *social animal* memiliki determinasi alamiah atas konsep tanggung jawab moral. Secara ontologis, tanggung jawab merupakan implementasi etis individu sebagai *being* yang berproses untuk menjadi (*becoming*) bermoral (Widiyono, 2002). Parameter moralitas sendiri bersifat ambivalen, namun terkadang memang dapat menyudutkan individu yang terbawa situasi. Individu hidup di ranah sosial sehingga ia harus mampu merepresi insting-instingnya meskipun setiap subjek dianugrahi kebebasan, kesadaran, dan pilihan-pilihan dalam menentukan tindak putusnya. Oleh karena itu, nilai moral menjadi sebuah warisan yang melanjutkan nilai-nilai apriori yang lama.

Pada dasarnya, legitimasi CSR dibentuk karena mempertimbangkan asas manfaat untuk meredam sistem kapitalisme yang akan berkembang bebas. Meskipun bisnis merupakan arena pasar tempat individu bebas keluar dan masuk di dalamnya, pada praktiknya bisnis tidak bisa terbebas dari khazanah etika. Dengan kata lain, bisnis tidak bebas nilai. Pembeneran etis terhadap isu CSR diperkuat dengan pertimbangan meluruskan anomali pengejaran laba di dalam bisnis dengan menghadapkan pada penderitaan masyarakat sekitar, konsep keadilan, kiprah *community development*, dan demi kelestarian ekologi.

Realitas majemuk yang terjadi dalam isu CSR merupakan upaya penyederhanaan konsistensi dan inklinasi pemberdayaan teori utilitarianisme.

² Nugroho, 1997. (hlm. 19).

Sistem pada etika korporasi merekombinasikan kesepakatan universal untuk menyusun sistem-sistem yang berguna dan menjadi realitas keteraturan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perilaku yang terarah dan tertata sehingga individu yang hidup di dalam persilangan sosialisasi dapat hidup bersama dengan baik. Seperangkat kesepakatan yang disusun untuk mewujudkan keteraturan tersebut pada hakikatnya bertujuan mencegah terjadinya *chaos* yang dapat mengancam keharmonisan hidup. Peraturan yang ditujukan untuk disetujui sebagai etika normatif memuat petunjuk agar *being* mampu berelasi secara positif dalam lingkungannya. Klimaksnya, pemahaman mengenai konsep etika normatif dengan pendasaran moral menjadi hal yang selalu disoroti efektivitas penerapannya. Jika hal ini dikaitkan dengan kebebasan manusia, maka secara implementatif kebebasan bukan penghalang etika normatif dalam perspektif universalisabilitas, sebaliknya justru merupakan pendasaran moralitas untuk mencetuskan sebuah legalisasi. Kebebasan manusia yang satu dapat dirusak dengan kebebasan manusia yang lain apabila manusia saling menentang kesepakatan. Setiap kehendak dan kepentingan manusia bisa sesuai dengan kehendak manusia lain, namun tidak dapat dipungkiri juga bisa berlainan atau bahkan bertentangan (Nugroho, 1997).

Pengertian etika normatif sendiri melibatkan penilaian tentang perilaku manusia berdasarkan norma di masyarakat tentang tingkah laku yang baik atau buruk. Etika normatif merumuskan prinsip-prinsip etis dengan rasional agar pada praktiknya dapat dipergunakan secara bertanggung jawab. Etika ini meliputi ruang lingkup etika yang umum, dan etika khusus yang melingkupi etika terapan seperti pembahasan penulis tentang etika bisnis.

Setiap agen moral memiliki abstraksi kesadaran tentang tindakannya sehingga penyeragaman komitmen bukan berarti menutup ruang individu agar terasing dari sumber keputusannya sendiri. Pembentukan integritas moral mengidentifikasi adanya kesepakatan khalayak atas pemahaman situasi individu yang lain. Masyarakat adalah sebentuk sistem kerjasama dimana individu mampu melebur dan terlibat pada kepentingan umum, serta membatasi

kepentingan individunya. Prinsip ini bukan berarti tidak menghiraukan penderitaan, *fairness*, dan hak individu minoritas karena pengejaran kebahagiaan terbanyak seperti yang dikritik oleh Rawls kepada Bentham. Kepentingan pribadi dapat diletakkan dalam kesadaran manusia sebagai makhluk sosial yang lebih besar porsi kewajibannya sebagai makhluk sosial. Kebahagiaan bukan datang dari perlunya mewujudkan kebahagiaan individu terlebih dahulu yang karenanya secara otomatis kebahagiaan bersama akan tercapai, melainkan kebahagiaan bergerak dari yang umum ke yang lebih umum. Kajian utilitarianisme muncul sebagai penengah dengan pertimbangan *greatest happiness principle*. Utilitarianisme sebagai sebuah aliran filsafat memberikan pandangan bahwa sebuah etika normatif dapat dibenarkan dengan melihat implikasinya di kemudian hari serta perwujudannya yang ditujukan untuk kebahagiaan umum. Meskipun sebuah legalisasi menghasilkan sebuah pengorbanan (*sacrifice*) bagi *being* yang berada di bawah etika normatif tersebut, namun hal ini dapat diterima keberadaannya secara moral karena memberikan rasa aman, dan kesejahteraan pada substansial umum.

Kebebasan seharusnya menjadi sikap alamiah *being* sebagai makhluk yang dikutuk bebas (Jean Paul Sartre). Manusia selanjutnya akan menjadi sangat bebas ketika menggunakan kebebasannya untuk memilih sesuatu yang dianggap benar. Namun oposisinya di sisi lain, manusia menginginkan hidup dengan keteraturan dan di bawah etika normatif. Kemudian, peraturan pun dijadikan tolak ukur tanggung jawab seorang individu. Tanggung jawab moral menjadi bahan baku moralitas dan berfungsi sebagai sumber peraturan. Pemikiran postmodern mengkritik bahwa hak istimewa moral individu dilemahkan pada saat otoritas moral yang mengatasnamakan kesejahteraan umum diserahkan kepada negara. Dalam signifikasi dan relevansi situasional etik dengan kisruh dan pendasaran manifestasi CSR, penulis mencoba memberikan gambaran pembenaran etis. Alih-alih CSR juga memiliki pengaruh yang kuat baik kepada pencitraan maupun nama baik perusahaan, serta sumbangsih terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh

karena itu, penulis menggunakan sudut pandang utilitarianisme dalam pembahasan ini.

1.2 Permasalahan

Berangkat dari pengumpulan pandangan mengenai mitos bisnis amoral yang bermanuver menjadi bisnis imoral, penulis merasa perlu mengetengahkan beberapa permasalahan etis dalam etika bisnis. Manusia sebagai *being* yang memiliki kesadaran dan hati nurani, selayaknya mampu memproyeksikan nilai baik dan buruk dari dalam dirinya tanpa perintah dari luar. Prinsip moral sudah menjadi integritas moral pribadi setiap manusia yang pada dasarnya memiliki konotasi yang sama untuk dipertahankan dan diberlakukan kepada semua pihak. Memang tidak ada barometer pasti yang mampu dijadikan tolak ukur dalam permasalahan moral, namun apa jadinya jika pertimbangan ambivalensi moral ini muncul sebagai pemicu yang menjadi penderitaan banyak orang atas sebuah aktivitas bisnis yang bebas nilai. Konteks tanggung jawab menjadi fokus utama dalam menyikapi dampak dari pengoperasian korporasi yang berkembang pesat. Lantas muncul pertanyaan mendasar, apakah manusia perlu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang ia lakukan sekalipun setiap tindakan itu tidak sepenuhnya berangkat dari kebebasan yang sepenuhnya? Pada dasarnya, setiap individu harus memiliki jawaban atas pertanggungjawaban dan segala konsekuensi dari tindakannya, terlebih apabila tindakan tersebut merugikan sekitarnya. Bisnis pada hakikatnya adalah organisasi yang beroperasi dalam tempat dan ruang gerak ditengah masyarakat. Singkat kata, pertanggungjawaban manusia ditujukan pada konsekuensinya di masa depan yang terpengaruh oleh tindakan saat ini. Namun jika demikian, lalu masih perlukah manusia secara 'resmi' mempertanggungjawabkan tindakan yang telah ia lakukan?

Corporate Social Responsibility muncul sebagai solusi etis sehingga diperlukan kebijakan negara untuk mengatur *chaos* dari persilangan *interest* dan kebebasan antar manusia. Penulis akan menggunakan kerangka teori perspektivisme dan universalisabilitas dalam menelaah praktik bisnis bebas nilai,

serta mitos bisnis amoral. Permasalahan sebagai fokus utama yang mungkin muncul adalah mengenai universalitas nilai dan prinsip moral dalam bisnis itu sendiri. Di sinilah penulis mencoba membuka dialog reflektif terhadap kemungkinan-kemungkinan esensial mengenai kontraversi dan diskursus nilai yang melibatkan masalah moral dengan munculnya *Corporate Social Responsibility* (CSR). Paham utilitarianisme memberikan jalan tengah dari relasi asimetris sosialitas dan sosialisasi *being*. Isu sentral yang paling akan diperdebatkan nantinya dirangkum sebagai berikut.

1. Bagaimana telaah dan pertimbangan mengenai CSR terhadap lingkungan masyarakat dilihat dari sisi etika?
2. Sejauh mana teori utilitarianisme dari sudut pandang R.M. Hare memberikan kontribusi kepada etika bisnis dalam CSR?
3. Apa sajakah pertimbangan filosofis mengenai pemberdayaan regulasi CSR, khususnya dalam kerangka pikir perspektivisme universal R.M. Hare?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memberikan dialog reflektif tentang kisruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan kompleksitas etika situasional dan perdebatan dari kritik etika postmodern. Akan tetapi, secara garis besar skripsi ini ingin memberikan tujuan sebagai berikut:

- Menyajikan dan membahas telaahan filosofis mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sisi etika.
- Menunjukkan bahwa teori R.M Hare mampu membenarkan pemberlakuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai kontribusi pada etika bisnis.
- Mendeskripsikan pertimbangan filosofis terhadap legalisasi dan universalisabilitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan kerangka teori perspektivisme universal R. M. Hare.

1.4 Kerangka Teori

Landasan pemikiran yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu dari sudut pandang filsuf moral, Richard Mervyn Hare (1919-2002). Pada dasarnya, Hare sangat terpengaruh oleh emotivisme Alfred Ayer dan Charles L. Stevenson, juga filsuf bahasa lainnya seperti J.L. Austin dan Ludwig Wittgenstein. Dia juga dipengaruhi oleh filsuf utilitarian, serta pemikiran Immanuel Kant. Hare memberikan aturan etika yang tidak seharusnya didasari dari prinsip kegunaan (utilitas) saja, meskipun dia bersedia mengambil pertimbangan utilitarian dalam membuat keputusan etis (*ethical judgments*). Inilah yang membedakan pandangannya dengan utilitarian klasik. Hare adalah seorang Kantian yang juga utilitarian.

Hare memberikan bentuk pada sebuah teori yang disebut *prescriptivism universal* (Stafforini, 2007)³. Istilah moral seperti 'baik', 'seharusnya' dan 'benar' memiliki konsekuensi pada dua hal semantik logis, yaitu universalisabilitas dan *prescriptivity*. Dalam bentuk *moral judgment*, sebuah situasi harus dijabarkan dan digambarkan oleh seperangkat term universal yang terhimpun. Maka, situasi tertentu dapat dikatakan salah atau benar apabila dapat diberlakukan secara umum atau karena hal tersebut dianggap universal. Inilah pandangan universalisabilitas Hare. Kemudian, *perspectivity* merupakan sebuah pertimbangan tindakan melepaskan posisi diri dari situasi tertentu, atau mencabut deskripsi partikular tertentu yang nonuniversal. Agen moral harus melakukan tindakan yang mereka anggap wajib secara moral dengan pertimbangan fisik dan psikologis yang mampu dilakukan. Pertimbangan pendekatan etika ini adalah *consequentialism*, *welfarism*, dan *aggregationism*, dengan bahan penalaran yang didasarkan pada logika, inklinasi, fakta, serta imajinasi. Dengan demikian *moral judgment* dari situasi tertentu dapat diberlakukan dengan tindakan sesuai yang mencakup substansi *perspectivity* yang *universal*. Hare menggolongkan kombinasi dari dua

³ Stafforini, Pablo. (2007). *R. M. Hare. Resources on Hare, including writings by and about him*. 2007, Maret 21. <http://utilitarian.net/hare>

sifat tersebut mengarah kepada bentuk tertentu dari konsekuensialisme, yaitu preferensi utilitarianisme.⁴

1.5 Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini akan menggunakan metode penelitian penelusuran studi literatur dan refleksi kritis, yaitu analisis etika situasional yang mendasari pengambilan tanggung jawab moral individu, dengan menggunakan pemikiran Richard Mervyn Hare (1919-2002) seorang *moral philosopher*. Sumber bacaan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah *Moral Thinking, The Language of Morals, Freedom and Reason, Objective Prescription* dari tulisan R.M. Hare sendiri serta buku-buku penunjang lainnya, seperti *Responsibility in Context : Perspective* (Gorana Ognjenovic ed. 2010), berbagai tema Etika (K. Bertrens), serta buku-buku lain yang relevan dengan Etika Moral dan Etika Bisnis. Oleh karena itu, penulis juga menggunakan metode *Library Investigation* (Penelusuran Pustaka) untuk membahas skripsi ini.

1.6 Thesis Statement

Perspektivisme universal dari teori utilitarianisme R.M. Hare membenarkan tindak etis implementasi CSR.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dibagi menjadi 5 bab dan sistematika penulisannya sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal penulisan yang memberikan gambaran umum mengenai skripsi ini. Penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, alasan

⁴ Wikipedia, *R.M. Hare*, [http://en.wikipedia.org/wiki/R. M. Hare](http://en.wikipedia.org/wiki/R._M._Hare) diakses tanggal 21 Februari 2012.

mendasar penulis memilih topik, tujuan, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dilihat dari Sisi Etika*

Bab kedua terbagi atas beberapa bagian, dalam bagian pertama akan dijabarkan pembahasan mengenai tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) mencakup pengertian, sejarah, dan teori-teori penggagas. Selanjutnya, penulis memberikan relativitas antara CSR dan etika bisnis. Teori-teori mengenai bisnis penulis suguhkan disertai dengan penguraian masalah-masalah etis yang muncul dalam praktik bisnis tanpa CSR, seperti permasalahan mengenai konsep bisnis yang adil, bisnis yang tidak bebas nilai, posisi kebebasan (*freedom*) dari *being*, atau bahkan laba yang menjadi prioritas terfaktual dari korporasi.

BAB III : *Pendekatan Teori-Teori Umum Etika Terhadap Bisnis dan Korporasi*

Pada bab ketiga penulis menyajikan pengertian tentang teori-teori umum etika dan moral. Penulis menyuguhkan aliran-aliran besar di dalam filsafat moral yang dapat dijadikan pisau asah dalam mengelola fenomena bisnis kontemporer, seperti hedonisme, eudemonisme, deontologi, dan penjabaran utilitarianisme yang melingkupi pengertian, sejarah, serta bentuk-bentuknya sebagai pilihan penulis. Dijelaskan pula tokoh-tokoh utilitarianisme klasik sebelum Hare serta garis besar pemikiran Hare.

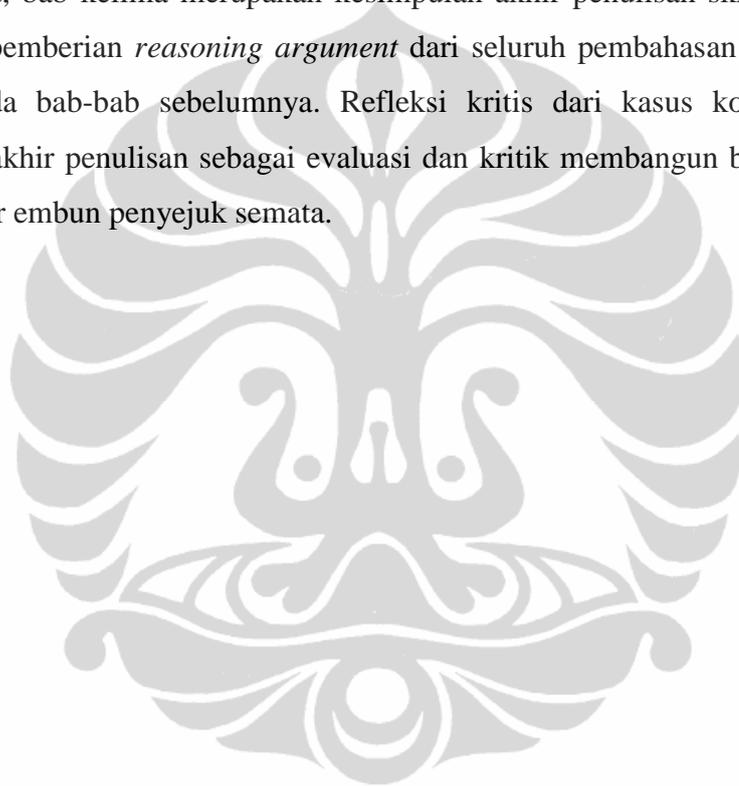
BAB IV : *Pembenaran Etis CSR Menurut Pemikiran R.M Hare*

Bab keempat adalah kedudukan penulis yang diperjelas dengan kemungkinan yang menuju probabilitas. Pada bagian pertama penulis memberikan gambaran umum tentang utilitarianisme kemudian selanjutnya memberikan distingsi pada utilitarian klasik serta karakteristik universalisabilitas R.M. Hare. Penulis akan menyajikan suatu pola pikir dan biografi singkat dari R.M. Hare, berikut juga pemikir-pemikir yang melatarbelakanginya sebagai teori pendukung. Penulis mengeksplorasi teori tersebut sebagai titik acuan untuk dijadikan tumpuan konsep

dan refleksi kritis. Selanjutnya, penulis juga menyajikan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang tidak hanya muncul di permukaan. Pada akhirnya, penulisan memperoleh sintesa mengenai tujuan, imperativisme, *self-interest*, *free will*, kolektivisme etis, serta konflik perdebatan nilai secara definitif mengenai kebaikan, keadilan, dan relativisme moral.

BAB V : *Kesimpulan*

Sementara itu, bab kelima merupakan kesimpulan akhir penulisan skripsi, yakni analisis dan pemberian *reasoning argument* dari seluruh pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya. Refleksi kritis dari kasus konkret juga diberikan di akhir penulisan sebagai evaluasi dan kritik membangun bahwa CSR bukan sekadar embun penyejuk semata.



BAB II

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DILIHAT DARI SISI ETIKA

2.1 Studi Terhadap CSR

2.1.1 Definisi dan Hakikat CSR

Istilah *corporate* (dalam bahasa Inggris) atau korporasi berasal dari bahasa latin '*corpus*' yang berarti badan atau tubuh. Dalam alur bisnis sebagai entitas korporasi, *corpus* secara luas merupakan gambaran organik masyarakat yang dipakai sejak abad ke 4 SM. Plato (429-347SM) memakai istilah tersebut untuk membedakan hierarki manusia. Kepala sebagai manusia bijaksana, bagian tengah atau badan sebagai manusia penjaga, dan bagian bawah sebagai hasrat manusia yang tidak habis dipenuhi keinginannya. *Corpus* ditujukan pada batang tubuh dengan konsep yang merujuk pada penjagaan dan kepedulian.

Corporate Social Responsibility atau secara etimologis berarti tanggung jawab sosial perusahaan, memiliki definisi yang tentatif dalam perkembangannya. Secara *harfiah*, kata yang membangunnya memiliki makna yang berbobot baik dari segi moral, maupun dari segi bisnis. Istilah CSR pertama dibangun dari konteks ide meningkatkan profit dan terlepas dari argumen etis oleh Milton Friedman (1970). Sebelumnya konsep ini dikembangkan dari pemikiran Adam Smith dalam *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat dengan baik ditemukan dalam interaksi bebas dalam market. Pertemuan ini menghadirkan kesadaran akan tanggung jawab sosial yang mana konteks ini didedikasikan untuk kepentingan pebisnis sendiri agar mendapatkan manfaat dari berbagai aspek dikemudian hari. Pemahaman mengenai definisi CSR dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Corporate Social Responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development.” (WBCSD, 2005)⁵

Definisi yang diberikan *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mengenai CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Deskripsi CSR bertolak dari konsep bahwa sebuah organisasi atau perusahaan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, lingkungan atau masyarakat luas yang terkait baik secara langsung maupun tidak. Dalam segala aspek perusahaan memiliki tanggung jawab khusus sehingga manifestasinya dapat diwujudkan dalam serangkaian kegiatan dan *social event* oleh korporasi tersebut. Adapun tujuan skala besar CSR adalah menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial atas keberlangsungan kinerja korporasi.

Sejarah berdirinya CSR sendiri memiliki evolusi yang dianggap sama tuanya dengan konsep bisnis. Beberapa versi terkait membagi sejarah konseptualisasi CSR menjadi dua klasifikasi periode, sebelum 1900 dan 1900 sampai sekarang. Pada periode awal sebelum 1900, konsep CSR muncul atas permasalahan bisnis dengan masalah sosial dan lingkungan. Kemudian, seperti kasus yang terjadi di Mesopotamia, Raja Hamurabi memperkenalkan hukuman pada pekerja dan petani yang merugikan orang lain (1700). Pada masa Romawi Kuno, sistem pajak harus diserahkan pada negara untuk menunjang tenaga militer. Beberapa negara bagian di Afrika

⁵ *Coorperate Social Responsibility, Terjemahan: “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan cara berhubungan dengan kerja karyawan, keluarga mereka, dan komunitas lokal serta masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang baik bagi bisnis dan pengembangan.”* The WBCSD’s journey, (2005) www.fias.net Agustus 4, 2005. dan info.worldbank.org.

juga telah memprioritaskan hasil panen, kerajinan (*craft*), serta jasa medis untuk kepentingan komunal secara cuma-cuma, bahkan tanpa membebankan tagihan yang berat bagi masyarakat. Selain itu, konsep ajaran gereja juga memperkuat pengembangan upaya *philantrophis*⁶ yang berpihak pada masyarakat miskin dan pembangunan berkelanjutan atas dampak industri bisnis. Pada tahun 1960 Gereja Katolik di Amerika Latin mengupayakan '*Liberation Theology*' untuk melindungi kebutuhan sosial dan kerusakan bumi.

Setelah Perang Dunia II, konsep CSR diperkuat karena kerusakan kondisi hidup dan lingkungan yang ditimbulkan oleh korporasi di masyarakat. Rasa ketidakpercayaan masyarakat menumbuhkan kesadaran kepada para pelaku bisnis dan perusahaan. Selain itu, dampak Perang Vietnam (1961-1971) yang menggunakan sejumlah herbisida oleh militer Amerika Serikat memperjelas kebutuhan akan pertanggungjawaban sosial dari perusahaan. Penggunaan herbisida yang dijuluki '*agent orange*' tersebut menghancurkan produksi pangan dengan dalih tempat persembunyian musuh. Dampak yang telah ditimbulkan dari hal tersebut telah menjadikan penduduk menderita kanker dan cacat genetik berkelanjutan tanpa diberikan ganti rugi. Para korban menjadi semakin termarginalkan atas diskriminasi tanpa ganti rugi. Tidak seorangpun veteran Vietnam yang memperoleh kompensasi meskipun mereka telah menyuarkan tuntutan mereka terhadap perusahaan kimia yang memproduksi *agent orange* tersebut.

Sejarah CSR di Indonesia sendiri telah dikenal sejak masa VOC di awal abad 20-an. Konsep ini memiliki karakteristik yang berkembang dan mengalami perluasan dari waktu ke waktu seperti yang dijelaskan pada bagan berikut.

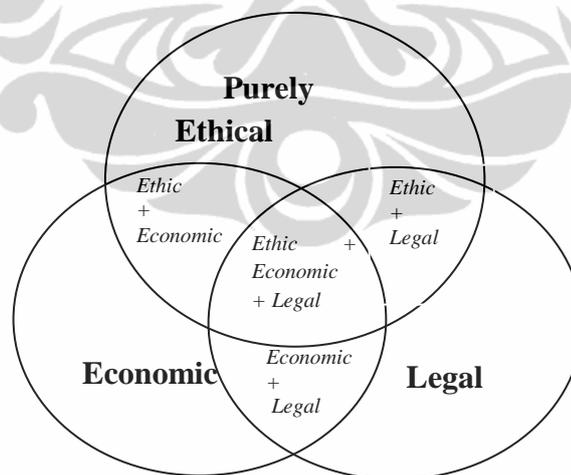
⁶ Sebuah istilah Yunani yang diterjemahkan "mengasihi umat manusia". Filantropi adalah ide, acara, atau tindakan yang dilakukan untuk kemanusiaan yang lebih baik dan biasanya melibatkan pengorbanan. Wikipedia, *Business*, www.businessdictionary.com, diakses tanggal 5 Juni 2012.

Periode	Karakteristik
1859 – 1910	Perusahaan bertanggung jawab kepada pemilik dan manajer
1900 – 1950	Perusahaan bertanggung jawab kepada pemilik dan manajer + pegawai
1945 – 1965	Perusahaan bertanggung jawab kepada pemilik dan manajer + pegawai + lingkungan
1960-an	Perusahaan bertanggung jawab kepada pemilik dan manajer + pegawai + lingkungan + masyarakat umum

Gambar 2.1 Periodisasi Konsep CSR di Indonesia⁷

2.1.2 Teori Pendekatan CSR

Terdapat problem nilai yang mengaitkan perilaku etis sebagai kewajiban moral di luar tuntutan hukum dan ekonomi. Kerangka pikir ini dilandasi oleh tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan masyarakat sosial.



Gambar 2.1.1
Elemen-elemen yang membentuk CSR

⁷ Kolk, (2000). *Periodisasi Konsep CSR* www.strategis.gc.ca/www.csrquest.net/www.swa.co.id

Konsep mengenai CSR mengambil tiga elemen yang saling berkaitan, yaitu *ethic*, *legal*, dan *economy*. CSR kemudian muncul sebagai intensionalitas kesukarelaan (*charity*) sebuah korporasi dalam mengintegritaskan aspek kepedulian sosial masyarakat dan lingkungan. Hal ini merupakan suatu bentuk interaksi moral. Meskipun kegiatan CSR pada awalnya diasumsikan pada aspek ekonomi untuk pengejaran profit semata, namun relevansi korporasi dan masyarakat dianggap sebagai simbiosis mutualisme karena pada praktiknya bisnis tidak pernah bebas nilai. Selanjutnya, bentuk komitmen korporasi dipertegas dengan adanya peran legitimasi. Kegiatan ekonomi dan bisnis semakin diperkuat dengan munculnya persetujuan terhadap sistem regulasi. Secara konkret, sustainabilitas ekonomi merupakan fondasi bagi korporasi. Pendasaran ini dapat dicapai dengan menjaga sustainabilitas sosial dan lingkungan.

CSR mulai mengenal dan memperoleh bentukan arah dan tujuannya. Pendasaran praktik CSR dalam perspektif ekonomi, tidak dipungkiri adalah mencari keuntungan (*profitabilitas*) semata. Pada dasarnya, sebuah korporasi terdorong untuk menjaga sustainabilitas sosial dan lingkungan karena ingin mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Pendasaran utama praktik CSR adalah kewajiban di dalam proses bisnis. Kepentingan masyarakat, sosial, lingkungan, serta kepentingan perusahaan sendiri, melahirkan hak hukum (*legal right*). Kewajiban dari integral hukum mempertegas keberlangsungan perlakuan korporasi dalam melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, pada dasarnya konsep CSR dibentuk dari etika dan moral di dalam bisnis. 'Nilai-nilai' diberikan untuk diimplementasikan demi menciptakan lingkungan-sosial yang baik (*good society*). Dari seluruh konsepsi yang mendasarinya, sebuah kegiatan dijadikan dorongan bermoral (*be ethical*) yang diorientasikan pada hasrat *philantrophy*. Secara umum, *philantrophy* bersifat sukarela (*charity*) dan mengesampingkan kepentingan hukum yang berlaku serta profitabilitas di dalam mekanisme bisnis.

Philantrophy adalah implementasi dari ajaran altruisme, yakni sebuah tindakan kemanusiaan yang berdedikasi pada kesukarelaan (*charity*) untuk mencapai keseimbangan antara kontribusi sosial, ekonomi dan lingkungan. Upaya *philanthrophy* merupakan kegiatan memaksimalkan dampak positif dan meminimumkan dampak negatif atas kehadiran dan pengoperasian perusahaan sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Tindakan *philanthrophy* menjadi aksi etis-*volunteer* yang memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial. Sebagai kesadaran moral, tindakan altruistik dan *philanthrophy* lahir dari hati nurani untuk memperlakukan sesama serta menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri (*Golden Rule*). Pada dasarnya *philanthrophy* memang berbeda dengan altruistik. Altruisme adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Istilah Altruisme diciptakan oleh Auguste Comte, penggagas filsafat positivisme. Dalam karyanya, *Catechisme Positiviste*, Comte mengatakan bahwa setiap individu memiliki kehendak moral untuk melayani kepentingan orang lain atau melakukan kebaikan kemanusiaan tertinggi (*greater good of humanity*). Altruisme memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu orang lain, murni memberi tanpa memperhatikan ganjaran atau keuntungan. Tindakan yang merupakan kehendak pengorbanan kepentingan pribadi, sebagai pengosongan diri untuk berkorban demi sebuah nilai yang lebih tinggi, baik bersifat manusiawi atau ketuhanan.⁸

Pada akhirnya *philantrophy* sendiri adalah kegiatan yang bertujuan pada amal (*charity*), dan bukan sebagai instrumen agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Kegiatan *philantrophy* diharapkan dapat menjadi sebuah komitmen agar perusahaan terlibat secara langsung dan kontinuitas

⁸Repost: Borrong. (2008). *Altruisme dan filantropis*. Desember 18, 2008 Millenium Action for Universal Leadership Agenda. www.maula.or.id dan Elmi F, Erik. (2011). *Menuju Kedermawanan Perusahaan yang Bertanggung Jawab*. Januari 3, 2011 <http://ahmaderik.blogspot.com>

untuk memberikan hak moral (*moral right*)⁹ kepada masyarakat, sosial, dan lingkungannya. Berikut konsep bentuk *Corporate Citizenship and Corporate Culture* dalam bentuk evaluasi *performance* organisasi sosial (Greenberg Baron, 2008:73).



Gambar 2.1.2
Bentuk *Corporate Citizenship and Corporate Culture* dalam bentuk evaluasi *performance* organisasi sosial.

Kontroversi pro dan kontra atas keberatan menanggung beban tambahan dikalangan pelaku bisnis semakin membawa permasalahan CSR ke permukaan. Pemerintah yang berperan sebagai regulator menengahi permasalahan ini dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 yang mewajibkan peraturan tentang CSR. Pasal 74 UUPT menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah terhadap hukum memberikan dampak dilegalkannya regulasi tentang CSR berikut sanksi-sanksi sebagai konsekuensinya. Pertimbangan terhadap gagasan CSR juga mengambil pola pemikiran dari teori *triple bottom line*. John Elkington

⁹ *Moral right* adalah seseorang atau sekelompok orang yang kepentingannya timbul secara moral atau etika dimana perlakuan yang mereka terima adalah semata-mata berdasarkan moral dan etika perusahaan tersebut, yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban. Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama (hlm. 49).

pada tahun 1997 dalam bukunya '*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*' menjelaskan istilah *triple bottom line* dengan kesejahteraan ekonomi (*economic prosperity*), kualitas lingkungan (*environmental quality*) dan keadilan sosial (*social justice*). Elkington memberikan pandangannya bahwa perusahaan yang ingin mempertahankan keberlangsungan (*sustainability*) usahanya, harus memperhatikan keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan kelestarian lingkungan (*planet*). Dalam disiplin ilmu ekonomi istilah *triple bottom line* ini juga sering disebut 3P.

Konsep yang paling banyak diperbincangkan nantinya adalah relasi *stakeholder* dan *shareholder* di dalam CSR. Setiap orang dalam suatu kelompok atau perusahaan mempunyai kepentingan (*stake*) dalam keputusan. *Stakeholders* dapat didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang memegang andil dalam sebuah perusahaan. Sedangkan konsep *shareholders* adalah relasi perusahaan terhadap pegawai, masyarakat dan semua yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak terhadap perusahaan.

Penggagasan teori CSR sudah marak dibicarakan di berbagai negara. Beberapa pandangan datang dari organisasi di Kanada seperti *The Conference Board of Canada and Canadian Business for Social Responsibility* mengindikasikan perluasan relasi internal korporasi. Kemudian pandangan internasional juga datang dari *The World Business Council for Sustainable Development*, *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *Business for Social Responsibility*, *The Commission for European Communities*, *Globe Scan*, dan *The Global Reporting Initiative (GRI)*. Intinya, masing-masing dari organisasi internasional ini memberikan pandangannya secara komprehensif dan mengandung konsep yang sama bahwa korporasi harus menjunjung tinggi:

- *human rights* baik dari komunitas setempat, konsumen, hingga hak-hak pegawai (*employee rights*);

- sumber daya dan lingkungan (*protecting environment*);
- etika bisnis (*business ethics*) yang mencakup tanggung jawab (*responsibility*) dan transparansi informasi selain dari pada mementingkan aspek stabilitas ekonomi perusahaan.

Adapun tujuan dari diselenggarakannya CSR adalah menumbuhkan kesadaran terhadap wujud nyata korporasi dalam CSR, menyebarkan informasi mengenai prestasi dan kinerja korporasi dengan pemberdayaan kepada masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat dalam upaya menanggulangi kemiskinan.¹⁰

Hakikat tanggung jawab sosial adalah sikap perwujudan saling peduli terhadap yang lain dalam unit sosial. Sikap saling peduli ini berada pada tataran *I – Thou* atau *I – others*. Seperti yang telah dipaparkan bahwa wujud konkretnya berupa upaya pengembalian sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di lingkungan internal atau lingkungan masyarakat, maupun tataran masyarakat luas. Korporasi sendiri merupakan nomina tunggal yang berkonotasi jamak karena melibatkan banyak orang di dalamnya. Demikian bahwa korporasi tidak semata-mata berdimensi ekonomi, tapi juga sosial. Bisnis menjadi entitas yang terdiri dari banyak organ yang terstruktur dan tersistem berdasarkan prinsip moral.

2.2 CSR dan Etika Bisnis

Bisnis merupakan sebuah kegiatan manusia yang bertujuan mendatangkan keuntungan materi. Prioritas dan motif para pelaku bisnis adalah neraca pemasukan harus lebih besar dari pada neraca pengeluaran. Di dalam bisnis, laba menjadi *conditio sine qua non*, yakni kondisi atau syarat keharusan dengan tujuan

¹⁰ (2010). CSR Indonesia, www.csindo.com. (Modul Seminar dalam CSR Indonesia on Pekan Lingkungan yang disunting dari wikipedia.com)

yang hendak dicapai.¹¹ Kebebasan usaha awalnya dipelopori oleh Adam Smith dengan pemikiran revolusionernya dalam *The Wealth of Nation*. Adam Smith mengungkapkan ekonomi mulai bebas dari pengaruh kekuatan pasar setelah kebangkitan revolusi industri yang didorong oleh *self-interest* masing-masing *human being*. Konsep kebebasan usaha yang akan semakin berkembang ke arah kapitalis juga diutarakan oleh Laissez Faire.

Kaidah lain yang erat kaitannya dengan etika di dalam bisnis adalah prinsip pengambilan keputusan (*decision making*). Fondasi dasarnya ialah prioritas yang diambil berdasarkan kepentingan masing-masing individu. Oleh karena itu, Von Magnis menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan akan selalu mengalami perbenturan dengan masalah etis sejauh hal tersebut menyangkut kesejahteraan dan kemanusiaan. Baginya, keberadaan peraturan perundangan yang mencoba menengahinya akan membelenggu manusia.

Adam Smith dalam '*Theory of Moral Sentiment*' memberikan dikotomi antara etika dan bisnis. Aliran bisnis bebas (*free enterprise*) yang dikemukakan Adam Smith dalam *An inquiry into the nature and causes of the wealth of Nations* berupa kebebasan dalam berusaha, kepentingan masing-masing pribadi, serta kerjasama tanpa paksaan dari luar. Intinya adalah menghindari pelanggaran kebebasan individu. Bisnis bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran sehingga etika tidak diperlukan untuk melandasi setiap kepentingan individu. Adanya campur tangan pemerintah bagi Smith hanya akan menyebabkan distorsi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, hal tersebut tidak dapat mencapai kepentingan pribadi.

Keynes, 1936, mengoreksi mekanisme pasar bebas yang tidak dapat menciptakan stabilitas dalam *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Peran pemerintah dalam kapasitas yang tidak mengarah pada sistem

¹¹ Teori hukum pidana Von Bori, 1873, yang menyatakan suatu kejadian yang merupakan akibat yang biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa, keadaan, atau faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan.

etatisme¹² sangat dibutuhkan untuk membangun bisnis yang baik. ‘*Good ethics is good business*’.¹³ Milton Friedman seorang post-keynesian dengan aliran neo-klasik, juga sering disebut aliran libertarian atau monetaris, mengungkapkan bahwa campur tangan pemerintah yang konon dianggap akan menimbulkan kekacauan dalam birokrasi, lebih baik dibatasi. Melalui karyanya *Capitalism dan Freedom*, Friedman menyarankan peran pemerintah seharusnya difokuskan saja pada tingkat laju pertumbuhan uang yang beredar serta laju pertumbuhan ekonomi.

Inilah konsep ‘tanpa arah’ diawal kemunculan bisnis sebelum bisnis jauh mendominasi. Kesadaran akan tanggung jawab di dalam bisnis masih terlalu minim. Setelah evidensi peristiwa anomali di dalam kegiatan bisnis terjadi karena permasalahan imoral dan amoral, muncul kesadaran bahwa bisnis akan tumbuh dengan baik jika disertai dengan rasa tanggung jawab. Akan selalu ada *the rule of game* yang harus ditaati di dalam bisnis. Bisnis tumbuh karena tanggung jawab.

Etika bisnis bertujuan mengkaji tingkah laku bisnis, pranata-pranata, dan lembaga dalam hubungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam diri setiap manusia terdapat *innate direction* yang mengarahkannya untuk mencapai kebahagiaan dan keselarasan hidup. Pengejaran laba memerlukan kaedah untuk mencapai tujuan bisnis meskipun bisnis sendiri menjadi tidak bebas nilai. Akan tetapi, *innate direction* tersebut mampu mengarahkan manusia tunduk kepada ketentuan sebagai simbol esensi untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Etika bisnis memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang serupa, yakni menjunjung tinggi kemanusiaan sembari melakukan refleksi sebagai mekanisme pemikiran filsafat agar menghasilkan kesatuan etika yang normatif dan komprehensif.

¹² *Kontrol negara atas warga negara individu*. (2012), Wiktionary, *Etatisme* <http://id.wikipedia.org/wiki/Etatisme> (KBBI).

¹³ Nugroho, 1997. (hlm. 9-12).

Dalam kurun waktu yang relatif cepat, perkembangan bisnis korporasi mampu mencapai keberhasilan dengan melintasi batas-batas nasional. Ruang geraknya bahkan bersifat multinasional atau disebut *Trans-National Corporation*. Dengan strategi penanaman modal dan perputaran uang, korporasi semakin menghorizonkan pelebaran sayapnya. Dari perkembangannya ini, kemudian korporasi membangun karakteristik yang sinergis melalui etika bisnis. Atas peranannya yang luas dan pengaruhnya kepada masyarakat tempat ia bergerak, korporasi disejajarkan sebagai suatu subjek otonom atau persona yang memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab dan hak-hak moral agar mampu melaksanakan komitmennya.

Kenneth Goodpaster dalam karyanya yang berjudul *Morality and Organization* pada seminar etika bisnis yang diselenggarakan Bentley College, mengatakan:

*That Corporate conduct has in fact come to dominate the lives of individual is only slowly beginning to occur to the moral philosophical community, together with an attendant imperative to accomodate this fact to ethical theory. One important stage in this accomodation process includes a shift in levels of agency (and consequently, moral responsibility or virtue) from the individual to the Corporate or organizational decision maker.*¹⁴ (Waltham Massachusets, 1997:1)

Norma E. Bowie mempertegas kemampuan bertanggung jawab agar menjadi suatu keharusan¹⁵ :

An examination of much of the contemporary literature in business ethics indicates that the “why be moral” question is very much on the mind of business as well. One possibility for providing an answer to the “why moral” question is to indicate the

¹⁴ Terjemahan: “Bahwa perilaku menjalin kerjasama sebenarnya telah mendominasi kehidupan individu perlahan-lahan dan mulai terjadi pada komunitas filsafat moral, menyertai keharusan untuk mengakomodasi fakta ini dengan teori etika. Salah satu tahap penting dalam proses akomodasi adalah perubahan tingkatan lembaga (dan akibatnya, tanggung jawab moral atau kebijakan) dari individu kepada pengambil keputusan pada korporasi atau organisasi tersebut.”

¹⁵ Bowie, N. E. 1999: *Business Ethics: A Kantian Perspective*. Oxford: Blackwell Publishers.

*contractual basis on which business rests. The operation of business, particularly when the business is a corporation, is not a matter of right. Rather the individuals enter into a contract with society. In turn for permission to do business, the society places certain obligations and duties. The corporation is created by society for a specific purpose or purposes.*¹⁶

Bowie menjelaskan bahwa terdapat sebuah hubungan kontrak antara korporasi dan masyarakatnya. Masyarakat berperan memberikan izin kepada korporasi untuk bergerak, serta menempatkan kewajiban dan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan. Dengan menerima izin tersebut, maka secara otomatis juga korporasi menerima kewajiban etis yang berlaku. Dikatakan Bowie jika dalam perjalanannya korporasi melanggar kewajiban tersebut, maka tindakan itu dinilai sebagai tindakan yang tidak adil sekaligus imoral. Teori kontrak yang dijelaskan Bowie ini mirip dengan kontrak sosial yang diajarkan oleh Locke, Hobbes, maupun Rousseau dalam hubungannya antara masyarakat dan negara. Rumusan kontrak Bowie memperjelas perlunya penataan bisnis sesuai aturan masyarakat agar mampu bertahan lama dan langgeng. Dengan demikian, kelompok yang mempelopori kewajiban moral bisnis korporasi atas doktrin pemenuhan kepentingan pribadi (Adam Smith), serta pencapaian laba (Milton Friedman), adalah penyimpangan dari jalur etika. Beberapa kasus yang membuktikan terbenturnya nilai-nilai etis dengan kepentingan bisnis dijelaskan pada contoh kasus seperti Nike, Teluk buyat oleh PT Newmont Pacific Nusantara, dan Freeport.

Kasus ekspansi usaha yang tidak menyadari pentingnya CSR dialami oleh perusahaan pembuat sepatu dan peralatan olah raga Nike. Di awal tahun 1990-an di Amerika Serikat muncul aksi protes dan boikot pada produk Nike

16 *Terjemahan: "Pemeriksaan banyak literatur kontemporer dalam etika bisnis menunjukkan bahwa "mengapa harus bermoral?" Pertanyaannya banyak diajukan di benak bisnis juga. Salah satu kemungkinan untuk memberikan jawaban atas "mengapa harus bermoral" yang dimaksud adalah untuk menunjukkan dasar kontrak yang terletak pada bisnis.*

Pengoperasian bisnis, khususnya ketika bisnis adalah sebetuk korporasi, yang bukan soal benar. Lebih dari individu-individu yang masuk ke dalam kontrak dengan masyarakat. Pada gilirannya izin untuk melakukan bisnis, masyarakat menempatkan kewajiban tertentu yang diciptakan oleh masyarakat untuk tujuan tertentu."

karena kabar eksploitasi buruh pekerja anak. Hal ini sontak memperburuk citra perusahaan dan berlanjut hingga beberapa tahun selanjutnya, sampai akhirnya perusahaan mendirikan departemen *Corporate Responsibility* khusus untuk menanggulangnya.

Selain itu, pada pertengahan tahun 2004, PT. Newmont Minahasa Raya (NMR), sebuah perusahaan tambang emas, tersangkut kasus pencemaran teluk buyat karena sistem pembuangan limbahnya. Sistem pembuangan limbah bawah laut sebagai bahan pangan masyarakat sekitar di wilayah teluk mempengaruhi ekosistem spesies makhluk hidup bawah laut. Dampak pencemaran kadar arsen dan merkuri yang sangat tinggi di daerah sekitar penimbunan menyebabkan masyarakat yang berdomisili di sekitarnya mengalami gangguan kesehatan yang tidak biasa. Warga sekitar mulai mengalami penyakit kulit, tremor, bahkan hingga pembengkakan bagian tubuh tertentu. Tuntutan maupun gugatan perdata akhirnya dilayangkan kepada pihak Newmont dan eksekutif tingginya yang berada di Indonesia, yakni Richard Ness.

Kontroversi serupa terjadi pada PT. Freeport di Papua. PT Freeport tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya dibalik keuntungan finansial yang sangat besar. Dalam pelestarian lingkungan PT Freeport sebagai perusahaan tambang, menghadapi *environmental scepticism* yang lebih banyak menimbulkan kerusakan dari pada manfaat. PT Freeport Indonesia di Papua telah menorehkan catatan buruk bagi penghormatan hak asasi manusia. Kerusakan lingkungan dari pencemaran limbah air laut dan biota laut, kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat lokal, perampokan hak alam terhadap masyarakat Papua, kekerasan dan pembunuhan yang berulang terjadi akibat beberapa masyarakat mencoba mendulang emas sisa dari limbah produksi, menjadi keprihatinan komunitas nasional, bahkan internasional.

Kejadian-kejadian tersebut merefleksikan betapa sebetulnya tanggung jawab dari korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan, sangat berpengaruh kepada kelangsungan hidup perusahaan. Contoh kasus lain datang dari Nestle, Time

Warner, dan Starbucks, memberikan pandangan standar etika yang tinggi seiring dengan dampak positif yang dibawanya. Starbucks menjaga relasi yang sangat baik terhadap pelanggan, karyawan, bahkan juga pada pihak petani kopi. Starbucks menyimpan misi dan keinginan agar setiap orang yang terlibat didalamnya memiliki rasa bangga dan kehormatan dalam setiap pemakaian, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan produknya. Ikatan yang kuat dengan masyarakat sekitar juga dijalin dengan sangat kuat. Stabilitas ekologi pada daerah *suppliers* juga dipertahankan. Pelayanan yang baik dan penciptaan lingkungan kerja yang nyaman adalah sebetuk wujud tanggung jawab mereka. Mereka memandang CSR bukan hanya sekadar program donasi, *“It’s the way we do business everyday”*.

Sama halnya dengan Starbucks, Nestle sebagai perusahaan yang bergerak dibidang industri makanan dan nutrisi sejak tahun 1866, memandang CSR sebagai kegiatan yang mempertahankan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Nestle membangun nilai-nilai sebagai bagian yang fundamental dari bisnis. Dimulai dari kegiatan yang ramah lingkungan, menjunjung prinsip kemanusiaan, hingga perhatian yang tidak luput dari penggunaan air, daur ulang limbah, polusi, serta keseimbangan ekosistem lainnya.

Demikian halnya juga dengan Time Warner Inc. Meskipun perusahaan ini bergerak dalam bidang media global yang berurusan pada pemberitaan, namun pengaruh positifnya sangat besar terhadap nilai etika bisnis. Time Warner juga memperhatikan ranah etika seperti perlindungan terhadap pembajakan, privasi konsumen, dan pemberian arahan kepada anak-anak dari konten media yang tidak sesuai. Kesejahteraan pegawai, tempat kerja, serta penggunaan kertas untuk proses kerja juga sangat diperhatikan. Time Warner juga mengadakan kegiatan kampanye kepada korban bencana alam dan program-program donasi komunitas sekitar. Demikian pemberian stimulus yang akan saling berdampak apabila kesadaran etis terhadap lingkungan dan masyarakat dimiliki oleh para pebisnis.

Refleksi etis yang timbul di dalam bisnis dan korporasi bukan hanya dari segi manfaat yang dirasakan untuk kuantitas kebahagiaan terbanyak atau sistem guna, tapi juga sekaligus dari pertimbangan umum mengenai akibat yang ditimbulkan. Kemudian, refleksi etis ini bertransformasi menjadi sebuah legitimasi setelah melalui tahap pertimbangan yang panjang dari kumpulan fakta berbagai kasus. Istilah ‘yang baik’ bukan untuk mencapai sudut pandang universal sehingga terjadilah persetujuan atas legalisasi yang objektif. Universalisasi timbul sebagai pengalaman batin tersendiri dengan abstraksi dan mengimajinasikan pertukaran posisi agar tercapai tindakan yang rasional sebagai keputusan sekaligus kesepakatan khalayak umum.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, maka universalitas didalam etika sendiri mengandung implikasi pengertian ‘yang baik’ untuk berlaku umum. ‘Yang baik’ merupakan kualitas perbuatan manusia yang mencerminkan pemikiran maupun tindakan dengan nilai yang dapat diterima masyarakat yang ingin dibentuk secara objektif. Sebaliknya, ‘yang buruk’ juga memiliki makna umum. Baik dan buruk dari *moral language* dibentuk dan turut membentuk sistem. Baik dan buruk dinyatakan sebagai ketentuan norma moral yang kekuatannya diletakkan pada kesadaran batiniah pelaku. Von Magnis, mempergunakan istilah fenomena moral sebagai “Apa saja yang terdapat (muncul) kelihatan dalam kesadaran moral” (Suseno, 1991).

Inilah yang mengidentifikasi ukuran sebuah kesadaran moral tentang klaim etis baik dan buruk sebuah tindakan. Sama halnya dengan ukuran metafisis yang disebutkan Kant (1724-1804), kesadaran moral disebutnya sebagai *good will* atau kehendak baik. Peranan dari *good will* adalah dominan dan berguna memberikan arah untuk menilai. Tanpa landasan *good will*, segala kualitas kemampuan akal manusia dapat berubah menjadi sangat buruk dan berbahaya. Kant sangat terpengaruh oleh keteraturan alam serta moral yang ada di dalam batiniah manusia. Kesadaran etis menimbulkan rasa kewajiban yang menggerakkan manusia untuk patuh tanpa tergoda dengan pilihan lain. Dunia

moral bersifat mutlak adanya dan karena kemutlakannya maka hal ini berlaku tanpa syarat sehingga inilah yang oleh Kant disebut sebagai imperatif kategoris (*categorical imperative*). Lebih lanjut diuraikan juga oleh Aristoteles bahwa kebaikan atau eudaimonia menjadi puncak tujuan akhir manusia, yang disebutnya *sumum bonum (the supreme end of life)*. Demi tujuan inilah lahir bermacam-macam aliran etika dikemudian hari, seperti halnya pembahasan mengenai masalah etika bisnis ini. Dalam *Ethica Nicomechea*, Aristoteles (384-323 SM) mengungkapkan bahwa :

“Every art and every investigation, and similarly every action and pursuit, is considered to aim at some good.”¹⁷

Aliran pesimisme menganggap bahwa pada dasarnya manusia tidak perlu mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang tidak didasari atas kebebasannya. Pernyataan ini dikaji ulang dengan bertolak dari istilah tanggung jawab sendiri secara harfiah dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberi jawaban atas sesuatu yang telah diterima pertanggungjawabannya. Artinya jika subjek dianggap memiliki tanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan, maka subjek tersebut dapat memberi jawaban atas setiap pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana tindakan tersebut terjadi. Untuk itu, setiap tindakan harus mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan terjadi. Dalam kasus korporasi yang berkembang secara gigantis, mustahil ini akan berlangsung tanpa dampak. Perusahaan diidentikkan sebagai sebuah subjek otonom yang diharapkan mampu menanggung dan menjawab segala permasalahan yang timbul selama pengoperasiannya. Implementasi ini dilakukan dengan cara melakukan berbagai bentuk dan cara untuk berkontribusi. Subjek yang bertanggung jawab berarti subjek tersebut siap menanggung setiap konsekuensi dari tindakannya.

¹⁷ *Terjemahan* : “Setiap seni dan setiap investigasi, dan juga setiap tindakan pencarian, dianggap beberapa yang bertujuan baik.” Aristotles, 1993. *The Nicomachean Ethics* translated by H. Rockham. London : Harvard University Press Cambridge.

Di sisi lain, terdapat pemikiran etika postmodern yang mempertanyakan kembali bahwa fenomena moral secara inheren adalah 'non-rasional', *aporetic* dan tak dapat diuniversalisasikan (Ritzer. George, 1997). Klaim mengenai adanya dasar-dasar moral (*foundation*) rasional dan rumus-rumus etis (peraturan) yang bersifat normatif – universal, tidak dapat diterima begitu saja. Moralitas perlu dilepaskan dari peraturan yang memaksa dan dikembalikan pada tanggung jawab subjek pelaku etis. Bertolak dari pemikiran Heidegger, di dalam masalah moralitas manusia perlu menjadi bermoral bukan karena *being with other*, melainkan karena *being for other* yang mendahuluinya. Dalam masalah moral *I am for you* tidak menuntut pembalikkan atau pemantulan bahwa *You are for me*. Keberadaan 'aku' mendahului 'kamu' dan inilah yang dalam moralitas disebut sebagai relasi asimetris. (Nugroho, 2002).

Memang pada dasarnya manusia adalah sebetuk makhluk yang terdeterminasi bebas. Kebebasan selalu melibatkan kemampuan yang dimiliki dalam menentukan pilihan. Subjek disebut bebas jika kepastian dari pilihan yang akan dipilih subjek seutuhnya berada di tangan subjek yang memilih, bukan sesuatu yang berada di luar subjek. Maka secara tidak langsung, kebebasan dapat diklasifikasi menjadi kebebasan yang untuk memilih atas pilihan yang disediakan oleh pihak luar selain subjek, dan kebebasan bagi seorang subjek untuk memunculkan pilihan dan memilih pilihan yang ia buat sendiri. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa subjek pada kebebasan yang kedua adalah sepenuhnya bebas, sedang subjek pada kebebasan yang pertama adalah sebagian bebas.

Manusia merupakan bagian dari semesta yang menjadi lingkungan dari manusia itu sendiri. Manusia dikonstruksi oleh kebebasannya kemudian terartikulasi sebagai bagian dari alam semesta dan menjadi lingkungan dari bentukannya sendiri. Tindakan-tindakan yang dilakukannya, termasuk tindakan memilih, dilakukan melalui proses interaksi dengan lingkungan alam atau manusia lain di sekitarnya. Dari proses tersebut, maka subjek tidak sepenuhnya bebas atau sepenuhnya berdasar pada apa yang diinginkannya. Oleh sebab itu,

setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam interaksinya dengan lingkungan sekitar, dilakukan berdasarkan pertimbangan terbaik.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu bukti bahwa manusia dalam setiap tindakannya dapat mengetahui atau setidaknya menduga sesuatu yang akan terjadi di masa depan sebagai konsekuensi dari tindakan yang ia lakukan saat ini. Hal ini menjadi semacam kekuatan untuk menentukan apa yang sebaiknya ia lakukan dalam rangka membentuk keinginannya di masa mendatang. Selain karena manusia sendiri tidak sepenuhnya bebas, apa yang akan terjadi di masa depan buah dari hasil masa lalu dan hari ini tidak dapat diubah lagi. Oleh karena itu, untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi di masa depan, maka manusia sebagai bagian dari alam dan sistem, memiliki andil dalam menentukan apa yang terjadi saat ini.

2.3 Konsep Pendukung CSR terhadap lingkungan dan masyarakat

Etika adalah suatu faktum.¹⁸ Penilaian etis dapat berbeda-beda akibat perbedaan landasan penafsiran, namun meskipun begitu hakikat etika sendiri secara dasariah bersifat universal. Universalitas di dalam etika menafsirkan bahwa setiap kebaikan berbuat, berlaku kepada siapa saja. Terdapat penyimpangan dari prinsip universalitas yang dapat menimbulkan perbenturan seperti yang dilukiskan oleh Mackie :

This kind of universalizability rules out one variety of egoism. It would also rule out one variety of egoism. It would also rule out a sort of inverted egoism adopted by some ascetics : I can not allow myself such indulgences, but O do not condemn them in others.¹⁹

¹⁸ W. Poespoprodjo, 1986, *Filsafat Moral. Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, hal XVII-XVIII. Ramadja Karya C. V. Bandung.

¹⁹ *Terjemahan* : “Jenis aturan universalisabilitas ini keluar dari jenis-jenis egoisme. Hal ini juga akan mengabaikan sebuah varietas egoisme semacam dalam peran yang dibalik yang diadopsi dari kontemplasi: Saya tidak bisa membiarkan diri saya terbawa kesenangan seperti itu, tapi yang lain tidak menghukum mereka dalam hal lain.” *Ethics: Inventing Right and Wrong*. 1997. Copyright J. L. Mackie.

Dalam hal perbedaan kondisi serta situasi, misalnya alam budaya yang tidak serupa, konsep relativisme etis sering dikemukakan oleh penganut paham relativisme yang menolak adanya etika normatif yang universal. Akan tetapi, bahwa yang baik itu berlaku universal meskipun dalam situasi dan kondisi *ceteris paribus*, jelas merupakan prinsip dari etika, sebagaimana diungkapkan dalam maksim dari *Golden Rule* '*Janganlah lakukan kepada orang lain apapun yang tidak kita inginkan orang lain lakukan kepada kita*'. Prinsip universalitas etika dipandang membawa akibat timbulnya sebuah titik konvergensi berupa keterikatan kepada nilai yang sama terhadap situasi yang serupa. Hasil penilaian tidak bisa terpilah-pilah menurut selera yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi yang serupa tersebut. Perbedaan hanya terdapat dalam tingkatan kebahagiaan atau kesenangan individualitas dan bukan pada kualitas kesejahteraan yang disepakati semua orang. Kecuali, apabila terdapat perbedaan situasional sehingga mempengaruhi sikap batin yang menjadi sumber dari penilaian etis tersebut. Tanpa perbedaan situasi yang substansial, maka 'yang baik' berlaku bagi semua orang serta memiliki wawasan universal, seperti yang ditegaskan oleh Magnis bahwa norma moral berlaku umum.

Kesepakatan pada kepentingan bersama secara universal adalah untuk tujuan yang lebih baik. Di dalam masyarakat, perbenturan kebebasan dihindari sedemikian rupa. Individu sebagai bagian dari sistem masyarakat tempat sebagian besar kehidupannya berlangsung, harus mampu memilah dan mengutamakan prioritas yang harus didahulukan dan pertimbangan konsekuensi di masa mendatang. Masyarakat merupakan sebetuk sistem kerjasama dari makhluk bermoral. Kepentingan dan kebebasan personal diletakkan dalam kesadaran *human being* sebagai makhluk sosial dimana porsi kewajiban sosial melebihi kepentingan pribadi. Ini merupakan pertimbangan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik karena kehendak umum juga mencakup kehendak individu. Kebahagiaan bergerak dari umum ke yang lebih umum

sehingga tindakan moral berlaku umum untuk menghasilkan akibat yang lebih baik.²⁰

Kebahagiaan tidak hanya merupakan kebahagiaan dari individu-individu tertentu melainkan kebahagiaan umum. Manfaat adalah suatu pertimbangan terakhir (*ultimate*) bagi semua permasalahan etis, dan manfaat yang dimaksud adalah manfaat dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu yang didasarkan atas kepentingan-kepentingan *human being*. Prinsip bahwa tidak dibenarkan merugikan hak orang lain, merupakan satu-satunya alasan untuk pemberlakuan suatu tindakan paksa. Kaidah yang memiliki kekuatan mengikat ditetapkan agar ditepati secara umum dengan ancaman hukuman dari pendapat umum. Individu memiliki syarat khusus, yakni kaidah tersebut merupakan perwujudan universalisasi rasa setiap masyarakat.

Dalam hubungannya dengan usaha pencapaian laba, CSR diproyeksikan dengan konsep universalisasi yang paralel dengan aliran utilitarianisme. Kebenaran dirumuskan sebagai ukuran suatu tindakan yang terletak pada tingkatan dari hasil yang diperoleh. Selain itu, tujuan lainnya adalah mengejar efisiensi untuk memberikan suatu upaya peningkatan terhadap sesuatu yang baik, sesuai dengan prinsip utilitarianisme. Pada dasarnya nilai intrinsik yang ingin dikejar adalah landasan dasar yang kohesif yakni, kebahagiaan substansial umum.

Salah satu alasan yang mengharuskan manusia bertanggung jawab atas setiap tindakannya adalah karena manusia itu mau tidak mau hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia juga memiliki kapabilitas dan kebebasan, serta hak yang sama tentang masa depan atas dirinya dan lingkungan alam semesta. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia bukanlah kebebasan sempurna, melainkan kebebasan yang terdeterminasi oleh lingkungan yang menyediakan pilihan untuk dipilih. Manusia tidak hidup seorang diri di dunia ini, oleh sebab itu

²⁰ Fahmi, Khairul. 2009. *Kritik Terhadap Utilitarianisme Jeremy Bentham*. PBHI Sumatera Barat. April, 17 2009. <http://pthisambar.blogspot.com/2009/04/kritik-terhadap-utilitarianisme-jeremy.html>

diperlukan *instrumen* yang berfungsi mengontrol masa depan, yakni tanggung jawab. Tanggung jawab moral datang sebagai kewajiban dari dalam diri untuk melakukan *good will*. Melalui sanksi terhadap lingkungan dan alam, mempertegas setiap tindakan manusia yang berpotensi mengganggu atau membahayakan sesuatu di masa depan. Sanksi pun diberikan berdasarkan kemampuan subjek dalam mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.



BAB III

PENDEKATAN TEORI-TEORI UMUM ETIKA TERHADAP BISNIS DAN KORPORASI

3.1 Pengertian Filsafat Moral

Sejak masa Aristoteles sampai saat ini, istilah etika berasal dari kata *ta etha* (bentuk jamak dari *ethos*) yang berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Berdasarkan KBBI (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991) etika (etik) adalah :

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat.

Bertens, menjabarkan kembali bahwa filsafat adalah ilmu yang mempertanyakan realitas yang ada di balik gejala-gejala konkret. Etika sebagai cabang ilmu filsafat lahir dari ambruknya tatanan moral dalam kebudayaan Yunani 2500 tahun yang lalu. Mitos-mitos tidak dipercaya lagi, maka para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi perilaku manusia yang berhubungan dengan tindakan. Sebagai sebuah 'ilmu', filsafat moral atau etika menjadi asas nilai-nilai baik dan buruk yang diterima masyarakat sebagai bahan refleksi bagi penelitian sistematis dan metodis. Kode etik dan sistem nilai menjadi kumpulan benar atau salah di dalam suatu masyarakat, baik bagi individu maupun kelompok.

Etika dan moral adalah dua istilah yang serupa tapi tak sama. Moral, dalam perihal kesusilaan berasal dari bahasa latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti kebiasaan atau adat. Etika disebut *moralis* oleh Cicero, sedangkan oleh Roma

Katolik *disciplina moralis*. Moralitas (kata sifat: moralis) adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai (berkenaan dengan baik atau buruk dan benar atau salah) dalam pikiran, perkataan dan perbuatan manusia. Ajaran moral adalah ajaran, wejangan, khotbah, patokan, serta kumpulan peraturan dan ketetapan tentang bagaimana seharusnya hidup dan tentang tindakan untuk menjadi manusia yang baik. Sumber dasarnya adalah tradisi (adat istiadat), ajaran agama atau ideologi, lisan atau tulisan yang disampaikan petua bijak, maupun oleh pemuka agama.

Terdapat perbedaan antara istilah ‘etika’ dan ‘moral’, walaupun keduanya seringkali dianggap sebagai makna yang serupa. Secara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan, sedangkan istilah moral berasal dari bahasa latin *mos* yang juga berarti kebiasaan. Von Magnis menekankan istilah etika sebagai suatu disiplin ilmu, sedangkan istilah moral baginya mengacu kepada materi ilmu itu sendiri. Pandangan von Magnis :

The term ethics and morals should not be used interchangeably. Perusal of American College bulletins describing the curricular offerings will reveal that the courses in this of study are uniformly called ethics (or ethics in an extended title), not morals. Ethics is the term for the study moral or moral issues; ethics interpretation of moral phenomena.²¹

Etika mengacu pada norma-norma umum dan konseptualis (prinsip etis), sedangkan moral pada yang lebih khusus. Etika tidak bisa berkuasa menetapkan yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia, tapi lebih pada sebab untuk berusaha mengerti alasan hidup menurut norma tertentu kemudian menyikapi berbagai ajaran moral tersebut dengan bertanggung jawab.

Etika umum menganalisa berbagai tema pokok yang menyangkut perilaku manusia seperti: hati nurani (suara hati), kebebasan (kemampuan menentukan keinginannya), tanggung jawab (kemampuan menjawab dan

²¹ Magnis, von Franz. (1975). *Public Ethics*. New York: Canisius.

menerima konsekuensi perbuatannya), nilai (yang dijunjung tinggi, menjiwai tindakan, isi, dan tujuan kehidupan), norma (aturan/tolak ukur dalam menilai sesuatu atau seseorang), hak (kebebasan melakukan atau memperoleh sesuatu), kewajiban (yang harus dilakukan), dan keutamaan (sifat/kehendak baik).

Jenis teori etika dalam sejarah filsafat terdiri dari etika yang mengacu pada: *worldview* (kosmos) tertentu : Positivisme, Neopositivisme, Naturalistik (Hobbes, Rousseau), Evolucionistik (Spencer), Idealistik (Hegel, Kant), Onjektivistik yakni pandangan tentang manusia (antropologi) seperti Hedonisme, Eudemonisme (Socrates, Plato, Aristoteles), Personalistik, Eksistensialisme, Deontologi (Kant, Ross), pandangan tentang masyarakat (sosial), seperti Utilitarianisme, Pragmatisme, Marxisme, dan pandangan tentang nilai-nilai oleh Dithley, Scheller, Weber.

Metode kritis di dalam etika bertugas mengamati dan memeriksa berbagai kebiasaan, nilai, norma dan pandangan moral secara kritis serta bertanggung jawab untuk menyingkap kerancuan, dan juga berusaha menjernihkan permasalahan moral. Jenis pendekatan ilmiah mempelajari moralitas yang non filosofis (etika deskriptif) dan filosofis (etika normatif dan metaetika). Etika keutamaan mempelajari keutamaan, mengutamakan *being* (ada) manusia dan menjawab pertanyaan *what should I be?* Etika kewajiban mempelajari dan menentukan prinsip/aturan moral yang harus diutamakan (sedang dan perlu dilakukan), menekankan perbuatan (*doing*) manusia dan menjawab pertanyaan '*what should I do*'.

Manusia sering terpaksa berhadapan dengan seperangkat ketentuan, keharusan, kewajiban, larangan, seperti membelenggu dan menghilangkan kesempatannya untuk bertindak sesuai dengan keinginan hati walaupun terdapat kemampuan serta kekuatan untuk melaksanakannya. Frans von Magnis menyatakan :

“Mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah tugas etika. Etika adalah penyelidikan filsafat tentang bidang yang mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tentang yang baik dan buruk. Bidang itulah yang kita sebut bidang moral. Maka etika didefinisikan sebagai filsafat tentang bidang moral. Dari semua cabang filsafat lain, etika dibedakan karena tidak mempersoalkan keadaan manusia melainkan bagaimana ia harus bertindak. Etika adalah filsafat tentang praksis manusia.”

Filsafat moral secara langsung tidak menghasilkan kebaikan, tetapi suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Etika memberikan orientasi dalam masa transformasi masyarakat. Refleksi kritisnya memungkinkan kita berpendirian dalam pertentangan pandangan moral dan menerima serta menilai ideologi-ideologi baru dengan kritis, objektif, dan tidak mudah terpengaruh (tidak naif atau ekstrim).

3.2 Aliran Etika

Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk. Di dalam etika dijumpai beberapa teori yang mencoba untuk menjelaskan tindakan dan sifat suatu objek dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan. Berikut dipaparkan teori etika dan pendekatan implikasi bisnisnya.

3.2.1 Hedonisme

Dalam bahasa Yunani *hedone* berarti kesenangan. Hedonisme adalah paham yang merujuk pada apa yang memuaskan dan meningkatkan kuantitas kesenangan atau kenikmatan dalam diri manusia. Pada filsafat Yunani hedonisme sudah ditemukan pada murid Sokrates, Aristippos dari Kyrene (433-355 SM). Menurutnya kesenangan adalah badani, aktual, dan individual yang mana ketika telah tercapai, manusia tidak mencari sesuatu yang lain lagi. Aristippos juga memasukkan teori pengendalian diri dalam kesenangan agar dapat dipergunakan dengan baik sehingga tidak terbawa olehnya.

Epikuros (341-270 SM) juga melihat kesenangan sebagai tujuan hidup manusia. Akan tetapi kesenangan yang ia maksud lebih luas dari Aristippos karena dalam konsepnya mencakup masa lalu dan masa depan. Selain itu, kesenangan bagi Epikuros melebihi badani karena mencapai ketenangan jiwa (*ataraxia*). Bagi kaum hedonis, hidup adalah upaya menjauhi rasa sakit dan mendekatkan diri pada rasa nikmat.

Dari sudut pandang hedonisme, hakikat kehidupan manusia adalah gerakan dari rasa sakit menuju rasa nikmat. Namun, kenikmatan bukan berarti menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, kaum hedonis menganjurkan agar manusia selalu bijaksana, seimbang, dan menguasai diri dalam mencapai kenikmatan termasuk dalam ranah bisnis kontemporer. Kenyataan membuktikan bahwa seluruh proses bisnis merupakan kegiatan untuk menjauhi kondisi susah dan mendekatkan diri pada kondisi senang atau nikmat.

Berbisnis secara hedonis-etis mengandaikan pebisnis yang bijaksana, seimbang, dan mampu menahan diri dengan mendasarkan setiap keputusan bisnis pada pertimbangan luas dan rasional. Indikasi penerapan secara konkret adalah terwujudnya para pebisnis yang seimbang dan mampu menguasai diri dari keinginan irasional untuk mengejar keuntungan semata.

3.2.2 Eudemonisme

Pandangan eudemonisme berasal dari filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) yang berarti dalam terminologi tujuan tertinggi atau makna terakhir hidup manusia adalah kebahagiaan (*eudaimonia*). Aristoteles juga beranggapan bahwa manusia adalah baik dalam arti moral jika melakukan pilihan-pilihan yang rasional, tepat dalam perbuatannya, serta mencapai keunggulan intelektual. Demikian itulah kebahagiaan, karena tidak semua hal digolongkan sebagai tujuan terakhir.

Tujuan tertinggi di dalam bisnis bukanlah orientasi profitabilitas semata dan menyingkirkan hal lain yang akan menghambat pengejaran laba. Tetapi, bagaimana agar perusahaan tetap bertahan sehingga sustainabilitas untuk mendapatkan laba pun terjaga dinamis.

3.2.3 Egoisme

Rachels (2004) memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme. Pertama, egoisme psikologis, yaitu suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan yang berkuat pada diri sendiri (*self servis*). Menurut teori ini, manusia boleh saja yakin ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan tersebut hanyalah sebuah ilusi. Pada kenyataannya, setiap manusia hanya peduli pada dirinya sendiri. Menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat *altruisme*, yaitu suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya.

Kedua, egoisme etis, adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (*self-interest*). Jika tindakan pertama ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri sendiri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain.

Meski egoisme etis berkeyakinan bahwa tugas satu-satunya adalah membela kepentingan diri, tetapi egoisme etis juga tidak mengatakan keharusan menghindari tindakan menolong orang lain. Menurut paham egoisme etis, tindakan menolong orang lain dianggap sebagai tindakan untuk menolong diri sendiri karena mungkin saja kepentingan orang lain tersebut bertautan dengan kepentingan diri sendiri sehingga dalam menolong orang lain sebenarnya juga dalam rangka memenuhi

kepentingan diri. Maka, jika ini direlevansikan dengan bisnis, tindakan menolong kepentingan masyarakat sosial juga sebetulnya tindakan menolong kepentingan perusahaan sendiri. Perusahaan terlihat sehat di mata masyarakat sehingga mempengaruhi keberlanjutan operasinya dalam jangka panjang.

3.2.4 Deontologi

Paradigma teori deontologi berbeda dengan paham egoisme dan utilitarianisme. Kedua paham tersebut sama-sama menilai baik buruknya suatu tindakan yang memberikan manfaat baik untuk individu (egoisme), maupun untuk banyak orang atau kelompok masyarakat (utilitarianisme), maka tindakan tersebut digolongkan etis. Sebaliknya, jika akibat suatu tindakan merugikan individu atau sebagian besar kelompok masyarakat, maka tindakan tersebut dikatakan tidak etis. Teori yang menilai suatu tindakan berdasarkan hasil, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan tersebut disebut teori teleologi. Berbeda halnya dengan paham teleologi, paham deontologi justru menyatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan bukan menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan.

Kant berpendapat bahwa kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena keinginan untuk memperoleh tujuan kebahagiaan, bukan juga karena kewajiban moral itu diperintahkan oleh Tuhan. Menurut Kant, yang baik dalam arti sesungguhnya baru akan menjadi baik jika sudah mewujudkan dalam kehendak baik. Kehendak menjadi baik apabila bertindak karena kewajiban. Kewajiban moral mengandung imperatif kategoris yakni perintah (imperatif) yang bersifat mewajibkan tanpa syarat. Kehendak bersifat otonom dan berpusat pada pengertian manusia berdasarkan akal sehat sehingga kewajiban moral mutlak itu bersifat rasional. Kant mencoba membangun teorinya hanya

berlandaskan pemikiran rasional yang berangkat dari asumsinya bahwa karena manusia bermartabat, maka setiap perlakuan manusia dengan manusia lainnya dilandasi oleh kewajiban moral yang universal. Tidak ada tujuan lain selain mematuhi kewajiban moral dan karena kewajiban itu sendiri.

Relevansi deontologi dalam dunia bisnis terletak tepat pada keputusan dan tindakan para pebisnisnya. Pebisnis sebagai manusia yang baik sekaligus pengusaha yang baik, mampu mendasari tindakannya dari *good will* atau kehendak baiknya. Kehendak baik dalam melakukan kewajiban dapat didasari oleh beberapa motivasi seperti, hasrat untuk memenuhi kewajiban baik demi memperoleh nama baik perusahaan, karena merasa ada dorongan atau *voluntary motions* dari dalam diri, ataupun karena ingin memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepada masyarakat yang terkena dampak langsung.

3.2.5 Utilitarianisme

Utilitarianisme secara harfiah berasal dari bahasa Inggris 'utilitarianism' dari kata dasar 'utility' yang diadopsi dari bahasa latin 'utilis' yang berarti kegunaan atau manfaat. Sedangkan 'ism' sendiri berarti paham atau aliran. Jadi utilitarianisme dapat diartikan sebagai suatu paham mengenai kegunaan, atau dengan kata lain, aliran atau doktrin pertimbangan etis yang meyakini bahwa suatu hal dianggap baik apabila hal tersebut mengandung unsur kegunaan. Dari paham utilitarianisme, suatu aksi atau kegiatan dapat dibenarkan secara moral apabila menghasilkan kegunaan serta mendatangkan kebahagiaan bagi orang banyak, *the greatest happiness for the greatest number* (Bentham).²²

²² *Extracts from Bentham's Commonplace Book in Collected Works credits in Francis Hutcheson, (1725). Inquiry concerning Moral Good and Evil.*

Utilitarianisme adalah sebuah teori teleologis universalis karena aliran ini mengukur benar atau salah, dan baik atau buruk tindakan manusia, dilihat dari pertimbangan manfaat tindak pelaku dan semua yang terkena akibatnya. Utilitarianisme merupakan asumsi dasar hidup bersama dengan menekan korban seminimal mungkin dan mencapai kebahagiaan semaksimal mungkin. Aliran utilitarianisme di dalam filsafat dipelopori oleh tokoh-tokoh antara lain Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan diperjelas dengan gagasan dari Helvetius Beccaria, Paley, Paine, serta Godwin. Terdapat beberapa filsuf yang didata sebagai aliran utilitarianis, yaitu Jeremy Bentham (1748–1832), John Stuart Mill (1806–1873), Henry Sidgwick (1838–1900), G.E. Moore (1873 –1958), Karl Popper (1902 –1994), Richard Brandt (1910–1997), R.M. Hare (1919–2002), Peter Singer (1946).

Pertama kali konsep utilitarianisme diucapkan oleh teolog Inggris, William Paley, dalam karyanya *Principles of Moral and Political Philosophy* (1758). Ia menafsirkan etika Kristen dalam konteks utilitarian dengan sanksi teologis di dalamnya. William Paley memperkenalkan paham utilitarianisme dengan menggabungkan hedonisme individualistik dan otoritarianisme teologis. Ia menyatakan bahwa sesuatu dilakukan oleh seseorang karena didorong untuk tujuan kebaikan umat manusia, ketaatan kepada Tuhan, dan demi terlaksananya kebahagiaan yang abadi.

Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filsuf dan ahli hukum dalam karyanya *Introduction to the Principles of Moral and Legislation* (1789), merumuskan konsep utilitarianisme sebagai sistem etis sekaligus pondasi politis dan hukum. Menurutnya, mengorbankan sesuatu demi kepentingan yang lebih besar adalah tujuan etis pergaulan hidup manusia. Secara kodrati, manusia telah ditempatkan di bawah dua penguasa berdaulat, yakni rasa sakit dan rasa nikmat. Yang nyata dalam kehidupan konkret manusia adalah menghindari rasa sakit (*pain*) dan mendekati diri

kepada rasa nikmat (*pleasure*). Kebahagiaan akan tercipta apabila manusia mendekatkan dirinya pada rasa nikmat, “*The greatest good (pleasure) for the greatest number*”²³. Maka, dalam konteks ini gagasan utilitarianisme Bentham adalah kelanjutan dari hedonisme klasik. Bentham berasumsi bahwa hukum Inggris tidak logis dan kurang pendasaran yang rasional karena cenderung hanya berdasarkan alkitab atau akal sehat, atau bahkan kesadaran pribadi para hakim. Untuk itu, ia mencoba membuat hukum dan moralitas menjadi logis dan ilmiah. Paham ini kemudian menjadi gerakan radikalisme filosofis yang dipeloporinya dan sangat mempengaruhi pembaruan pemikiran di akhir abad 18 hingga awal abad 19. Bentham mencoba membangun sistem hukum yang lebih sederhana, manusiawi dan koheren dengan konsep utilitarianisme sebagai asasnya. Baginya, tujuan hukum adalah kebahagiaan yang semaksimal mungkin. Meskipun setiap individu memiliki hak-hak kodrati yang tak dapat dicabut dan rumusan kebebasan yang maksimum, namun hukum memberikan perlindungan, keseimbangan, dan kebahagiaan sosial berbagai kepentingan individu. Suatu tindakan dikatakan secara moral baik apabila tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan lebih besar bagi kebanyakan orang yang terkena dampak dari tindakan tersebut.

Sebelumnya, *Greatest Happiness Theory* telah tumbuh pada tradisi Yunani yakni mengenai pergulatan pemikiran mengenai prinsip dan gagasan hedonisme zaman itu. Nuansa utilitarian juga diberikan oleh David Hume (1711-1776) dengan sumber teori moral dan politik karyanya *Treatise of Human Nature* (1738) dan *Enquiry Concerning the Principle of Moral* (1751). Moral merupakan dorongan naluriah yang menghasilkan sekaligus mencegah sebuah tindakan karena dinilai benar atau salah. Perasaan moral mentendensikan akal manusia yang dalam sistem kerjanya kerap kali dituntun oleh kesenangan dan rasa sakit. Menurut Hume,

²³ Mayled, Jon. *Utilitarianisme*. (2002). Presented Power Point. (pp. 20).

perasaan moral dibentuk oleh kebutuhan komunal agar menciptakan kedamaian dan keteraturan untuk sebarang keadilan, meskipun keadilan sendiri harus mengalami pengorbanan demi kepentingan yang lebih umum. Maka, konsep kebaikan tidak harus mengandung kesenangan, namun berorientasi pada kebahagiaan yang baik, seperti dalam teorinya mengenai *approval* dan *dissapproval*.

Filsuf utilitarianis selanjutnya adalah James Mill (1773-1836), yang merupakan ayah dari John Stuart Mill dan murid yang meneruskan pemikiran Bentham. Menurut James Mill, manusia yang baik adalah yang dapat memperhitungkan baik atau buruknya suatu tindakan. Tindakan tersebut digolongkan benar apabila berakibat kebaikan yang lebih besar dibandingkan nilai yang buruk. Manusia pada dasarnya menginginkan kesenangan dan kebahagiaan, namun karena manusia hidup bersama dalam *interest* dan *free-will* yang bersilangan, maka sarana tersebut harus mampu dikendalikan. James Mill memasukkan unsur *representative government* dalam bentuk yang demokratis untuk menghindari *chaos* di masyarakat.

Menurut John Stuart Mill (1806-1872), perasaan moral bukanlah sifat bawaan manusia sejak lahir, melainkan tumbuh dalam diri atau batin manusia selama hidupnya. Perasaan moral ini berhubungan dengan kesadaran manusia berdasarkan insting sosial (*social instinct*) yang dapat berubah-ubah seiring dengan didaptnya pengalaman-pengalaman baru. Kebahagiaan adalah sesuatu yang diinginkan masyarakat secara aktual. Hal inilah yang kemudian mendasari pemikiran bahwa kebahagiaan umum merupakan satu-satunya kriteria moralitas. Kebahagiaan adalah kesenangan yang dilihat dari keinginan nyata masyarakat luas, bukan dari keinginan individu.

Mill adalah murid Bentham yang mencoba memperkokoh teori etika utilitarianisme. Utilitarianisme memberikan pendasaran moral

dengan melihat bagaimanakah konsekuensi preseden yang ditimbulkan. Atau lebih jelas lagi, dapat dikatakan utilitarianisme sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang membenarkan adanya suatu hukuman legal karena membawa konsekuensi baik. Bagi Mill, terminologi baik bukanlah sembarang manfaat, melainkan kegunaan dalam menunjang apa yang bernilai bagi diri sendiri. Kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian menjadi sebuah norma etis. Tindakan haruslah menghasilkan akibat sebesar mungkin bagi jumlah orang sebanyak mungkin, “*The greatest happiness for the greatest number*”²⁴. Akibat baik suatu tindakan pun tidak hanya diukur dari kepentingan pelaku tindakan, melainkan juga kepentingan semua orang yang terlibat dan terkena dampak dari tindakan tersebut.

Mill berpendapat bahwa suatu tindakan adalah baik sejauh dapat memajukan kebahagiaan, dan bernilai buruk sejauh mengarah pada apa yang menjadi lawan kebahagiaan itu. Prinsip kebebasan-kebebasan pribadi membawa pemikiran Mill cenderung menolak suatu aturan yang membatasi kebebasan pribadi tersebut. Karena pada suatu kondisi tertentu, kebebasan pribadi itu justru dapat menjadi bumerang pada kebebasan orang lain. Mill berpendapat bahwa prinsip manfaat dapat digunakan untuk membenarkan adanya suatu kontrol berupa peraturan-peraturan tertentu, demi terwujudnya suatu kebahagiaan bagi kepentingan umum. Kebebasan individu merupakan hal yang patut dan harus diperjuangkan. Seseorang tidak dapat dihukum semata-mata berdasarkan alasan bahwa ia telah melakukan kesalahan secara langsung yang hanya menyangkut dirinya (merugikan diri sendiri). Jadi, menurut Mill satu-satunya kebebasan yang layak disebut kebebasan adalah kebebasan untuk mengejar kebaikan kita sendiri, menurut cara kita sendiri. Sejah upaya

²⁴ *Ibid*, (pp. 20).

tersebut tidak berusaha merampas kebaikan yang dimiliki orang lain ataupun menghalangi usaha orang lain untuk mengejar kebbaikannya.

The only freedom which deserves the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede their efforts to obtain it. (Mill, 1869)²⁵

Sementara itu, berbisnis dalam konteks utilitarianisme dengan prinsip dasar kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang banyak dapat dijadikan pegangan para pebisnis untuk operasi kegiatan yang mulanya bersifat *profit oriented*. Kemudian, sejalan dengan konsep utilitarianisme yang sebelumnya, teori yang sama dikembangkan dalam kerangka *universal perspectivism* oleh Richard Mervyn Hare (1919-2002). Pemikiran Hare juga mampu mempengaruhi pemikir utilitarian berikutnya, seperti Peter Singer. Konsep *moral judgement* yang dikembangkannya yakni dengan mengimajinasikan suatu pertukaran peran (*switch role*). Sebuah tindakan kriminal dengan pengarahannya yang benar akan mendapatkan pengadilan dari preferensi yang kuat, yaitu pengalaman penderitaan yang dibayangkan dengan pertukaran posisi. Dengan melihat keadaan sekitar, pengaruh dampak, serta konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, maka tindakan membenaran akan merujuk pada hak yang lemah sehingga teorinya tiba pada utilitarian. Hare ialah pakar etika terkemuka yang maju dengan teori campuran Kant dan preferensi utilitarian. Ia bertolak dari konsep-konsep moral dari kumpulan fakta yang konsisten yang digunakan dengan kesadaran penuh. Baginya, jika hanya mengandalkan intuisi di dalam ranah pembahasan filosofis merupakan sebuah kesalahan atau dosa besar sehingga pembahasannya diarahkan pada relativisme. Perspektivisme merupakan bentuk varian yang nonkognitif untuk merumuskan tindakan membimbing dari arah penilaian moral. Namun demikian, penilaian moral tetap tidak memiliki konten deskriptif yang

²⁵ (Mahyuni, 2002.) J. Stuart Mill. 1869. *Introduction, On Liberty*. Terjemahan : "Satu-satunya kebebasan yang layak disebut, adalah mengejar kebaikan diri sendiri dengan cara kita sendiri, selama kita tidak mencoba untuk menghilangkan sesuatu yang lain dari milik orang lain, atau menghambat upaya mereka untuk mendapatkannya."

utuh. Konten deskriptif dalam sebuah penghakiman moral hanya terdiri dari faktum, pertimbangan, dan alasan yang mendukung pembelaan. Pada akhirnya, *moral judgement* menjadi keutamaan (*overriding*) yang didahulukan dengan pertimbangan kategori imperatif yang diterima sebagai permasalahan pokok untuk menghasilkan tindakan dari komitmen tulus. Konsep inilah yang menjadi objek formal penulis dalam mengkaji implementasi bisnis dan korporasi kontemporer.



BAB IV
PEMBENARAN ETIS *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
MENURUT PEMIKIRAN R.M. HARE

4.1 Biografi R.M. Hare

Richard Mervyn Hare adalah seorang filsuf Inggris yang terkenal dengan teori filsafat moralnya. Richard Mervyn Hare lahir di kota Backwell Down, bagian luar Bristol, Somerset pada tanggal 21 Maret 1919. Ia dikenal secara pekerjaan dan profesionalitas dengan nama R. M. Hare, dan secara personal dengan nama 'Dick Hare'. Ayahnya bernama Charles Francis Aubone Hare, seorang pimpinan perusahaan 'John Hare & Co.' yaitu, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksional berbagai cat dan kain lantai. Ibunya bernama Louise Kathleen Simonds, bekerja sebagai pembuat bir dan mengatur keuangan keluarga. Perusahaan keluarganya telah terbentur likuidasi pada tahun 1920-an. Ayahnya meninggal karena sangat terpukul dan tertekan, saat itu Dick masih remaja. Ibunya berusaha mengambil alih kemudi di dalam keluarganya, namun meninggal lima tahun kemudian. Hare dipelihara oleh wali keluarga dari pihak ibunya. Ia dikirim ke sekolah klasik pertama di Cophorne, Sussex selama tahun 1932 sampai tahun 1937. Pada tahun 1937 Hare mendapatkan beasiswa kuliah di Balliol College, Oxford sebelum pecahnya perang pada saat itu.

Bakat kuat dari prosanya membawa pemikiran Dick mengarah untuk menghadapi filsafat moral. Hare menganggap ketertarikannya terbagi dalam dua hal, kebutuhan untuk mendefinisikan sebuah pikiran dan sikap yang harus diperjuangkan, serta merasa bersalah tinggal dalam zona moderat yang nyaman. Dia pun memutuskan menjadi seorang *pacifist* (pencinta damai). Hal ini terpicu saat pecahnya perang dan ia berkelana menjadi sukarelawan, serdadu perang (1940), hingga menjadi tawanan di Singapore (1942). Ia menderita selama perjalanan panjang (*long march*) dari Siam ke Burma. Ia sempat menjadi kuli

bangunan dan kereta api, bahkan mengalami kekerasan tiada henti sebagai pekerja. Ia menulis autobiografinya bahwa ia lebih menyukai melewati penderitaan tersebut sebagai bagian paling bahagia dalam hidupnya. Dalam tulisan dua puluh halamannya ia melahirkan sensasi filsafat dengan judul '*my philosophy*'. Sampai akhirnya ia menemukan karakteristik yang jelas dan kepercayaan diri dalam gagasan pemikirannya. Dia memulai dengan merelasikan *mind and matter* tanpa dualisme. '*Goodness is Rythm willed from within by a person. Beauty is something we perceive, whereas goodness is something we do*'.²⁶

Prinsip moral bukan untuk diperdebatkan, tetapi juga diafirmasi dalam tindakan dari kehendak. Terdapat sebuah ketegangan pertimbangan eksistensial dalam filsafat moral Dick. Diskusi yang masuk akal menjadi terbatas karena sifat fanatik. Para fanatik begitu sepakat dengan idealismenya akan bersedia berkorban untuk kepentingannya sendiri sehingga kepentingan yang lain tidak akan menggoyahkannya. Kemurahan hati, kesopanan, serta menanamkan sikap layak pada isi filsafat moralnya membuahkan cara yang rasional. Deklarasi seseorang untuk menjawab pertanyaan dalam dirinya sendiri adalah dengan cara mempertahankan atau memelihara integritas serta keutuhan dalam berperilaku. Pada pemikiran etika semacam ini, Hare menyebutnya sebagai jenis *intuitive level* dari berfikir tentang moral (*moral thinking*). Sama halnya seperti yang Plato tuliskan, pendapat tentang yang benar akan menetap sepanjang pada hal-hal yang baik dan dilakukan dengan baik. Akan tetapi mereka dapat saja tidak berkehendak untuk menetap lama sehingga keluar dari pemikiran tersebut, dan menjadikan tidak berarti sampai menemukan alasan lainnya lagi. Filsuf sebagai subjek untuk membentuk cara lain dan ketika cara tersebut berbalik melawan dirinya, dia harus memiliki argumen yang telah ia pertimbangkan dengan meletakkan secara benar hal-hal sintaksis maupun tabiatnya secara aplikatif.

²⁶ Price, 2004. (pp. 119).

Artikel pertamanya yang diterbitkan '*Imperative Sentence*' dalam esainya '*Practical Reason*', mengenai dogma moralitas dan manipulasi emosionalisme serapan dari aliran emotivisme. Buku pertamanya '*The Language of Moral*', mengenalkan perbedaan antara pengertian perspektif dan deskriptif. Perspektif mendefinisikan sebuah hubungan imperatif, pernyataan perspektif membutuhkan hubungan pernyataan fakta semata. Setidaknya sebuah imperatif berfungsi untuk menyetujui preskripsi sebuah tindakan. Sedangkan deskriptif mendefinisikan hubungan kondisi sebenarnya, yakni pernyataan yang memperluas kondisi faktual karena penerapan yang benar menentukan arti sesungguhnya. Ini diterima dari tradisi David Hume, bahwa fakta adalah motivasi yang berkelanjutan dan hasrat bukanlah bagian dari persetujuan yang tulus, melainkan semata-mata pernyataan yang faktual. Oleh karena itu, *moral statement* tidak hanya memiliki makna perspektif tapi juga deskriptif. Imperatif menunjukkan kesepakatan dari keutamaan dan kehendak, sedangkan konotasi deskriptif menentukan standar persetujuan tersebut.

Hare kemudian membangun dua fiturnya, yakni perspektivisme dan universalisabilitas. Universalisabilitas menjadi tema pembahasan selanjutnya yang diselesaikan dari kebimbangannya terhadap permasalahan realitas kausal oleh Aristoteles dan Kant. Baginya term general kontras dengan singular. Maksim tetap dijaga perbedaannya antara universal yang lebih dari singular maupun partikular untuk mengacu pada individu-individu dalam cakupan tertentu. Keambiguitasan dapat diubah dengan mengubah kesamaran dan mengidentifikasi generalitas pada spesifikitas serta perluasan tindakan, dengan tingkatan pembuktian kebenaran dari berbagai rumusan praktiknya dan hal yang dapat diterima dalam prinsip yang general.

Dalam esainya '*Practical Reason*', Hare telah memperdebatkan tentang keputusan dari prinsip yang baginya bukan 'diperoleh' melainkan 'didirikan'. Layaknya perintah umum yang diputuskan untuk diterima. Ia berusaha menemukan pendasaran yang kuat untuk penalaran moral. Dalam tulisannya

'*Universalizability*' (1955), ia menekankan pada tanggung jawab seseorang dalam membuat keputusan dari sebuah prinsip. Pengembangan penting lebih lanjut pada buku keduanya *Freedom and Reason* (1963) mengenai fitur formal dari perpektivitas dan universalisabilitas dengan bentuk argumen umum dari '*Golden Rule*'. Dalam *Freedom and Reason*, Hare menghindari sebuah kepercayaan pada keidealan impersonal yang fanatik. Argumennya kemudian diperketat dengan mengemukakan kesamaan ide universal yang lazim dalam tulisannya '*Wrongness and Harm*'. Teori etikanya berciri tentang utilitarianisme dimana identifikasi moral yang baik dengan memaksimalisasikan bukan dari beberapa pernyataan subjektif, tetapi beberapa preferensi tentang kepuasan.

Posisi logis Hare mudah dipahami dalam buku ketiganya *Moral Thinking; It's Level, Method, and Point*. Dia memberikan resep tentang semua situasi yang aktual atau berkemungkinan, yang perlu diperhatikan untuk kepentingan setiap orang. Seperti seolah-olah menempati peran untuk mendapatkan beberapa prinsip universal yang netral dan positif. Refleksi umum tentang kebijakan yang universal, disertai keyakinan untuk ditaati. Moral yang ideal memberikan keutamaan pada preferensi yang universal dari kehendak dan idea umum. Keputusan *human being* tetap bebas, tidak egois, rasional mencegah batasan atau penurunan moralitas karena terpaku pada deskripsi 'adalah' dan 'seharusnya'. Hare menghindari dari klaim metafisika dan menolak ego Cartesian, tetapi mengakui ego transendental. Kesadaran mengidentifikasi perspektivitas dengan situasi umum yang telah diberikan pada preskripsinya. *Moral Thinking* meninggalkan permasalahan yang belum selesai tentang susunan preferensi dan preskripsi universal. Simpati dan kehendak bijak harus disinkronisasikan untuk kebahagiaan yang bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga yang akan mendatang disertai akibatnya. Pilihan yang sulit terkadang bertujuan untuk memperoleh teori etika yang tepat dari konsep yang sangat logis. Eksistensi *human being* dimunculkan dari preferensi dan kepentingan yang diuniversalkan untuk terpuaskan. Ia juga memperhatikan kondisi preskripsi mengenai *ceteris paribus* dan relevansi lainnya untuk menarik keberadaan *human being*.

Keistimewaan dari teorinya ada pada terminologi '*Ethical Theory and Utilitarianism*' (1976) yang dieksplorasi penuh dari *Moral Thinking*. Ia melakukan kritik pada level berfikir dengan membandingkan penggunaan *Golden Rule* pada '*archangels*' dan respon dari '*proles*' dengan artikulasi respon emosional yang ingin diadili. Komplikasi sebenarnya adalah mengenai konsekuensi-konsekuensi yang tak terhindarkan dari tindakan yang seharusnya atau pikiran yang seharusnya. Utilitarian menilai prinsip praktikal yang harus dipertimbangkan tidak hanya *observance utility* (OU) dimana kehendak baik (*good will*) datang dari rumusan, tetapi juga *acceptance utility* (AU) yaitu kehendak baik datang dari niat dalam diri.²⁷ Hare mengistimewakan AU yang baginya prinsip pencapaiannya lebih tinggi. Ia menggunakan objektivasi yang tidak asing dan mengutip kasus-kasus konkret dimana teori utilitarian muncul untuk berkonflik dengan intuisi moral. Hare memahami internalisasi keduanya dengan kritik di dalam pikiran dan cara berfikir intuisi. Hare mengkonsepsikan pemberian preskripsi dan penilaian moral tidak lebih dari prinsip preskriptif yang dapat mengakomodasikan perbedaan. Utilitarianisme adalah suatu bentuk umum yang mempertimbangkan kembali sensibilitas khalayak untuk menjembatani perluasan aspek-aspeknya.

Hare selalu mengklaim dirinya banyak belajar dari murid-muridnya seperti Bernard Williams, Richard Wollheim dan John Lucas yang baginya menyenangkan. Reaksi pada korpus setelah pengalamannya dari Balliol pada tahun 1960-an, menyeimbangkan pandangan tentang kebijaksanaan. Ia mendeskripsikan kehidupan dan perjalanan panjangnya seperti kebanyakan mimpi buruk dimulai ketika ibunya meninggal tahun 1935, dan berakhir hingga pernikahannya dengan Catherine Verney tahun 1947. Catherine Verney, ia sebutkan sebagai hal terbaik yang pernah ia miliki dan sebagai sumber kebahagiaannya. Catherine menghubungkannya untuk masuk kembali ke dalam sebuah keluarga yang juga mengalihkan dari perbedaan panjang egalitarianisme.

²⁷ *Ibid.* pp. 128

Dia juga membawa banyak pengaruh dengan ketaatan dalam hati dan pikiran sebagai seorang kristian *Anglicanism Orthodox*. Mereka memiliki empat orang anak, satu orang putra dan tiga orang putri. Anak laki-lakinya, John, yang kini menyatukan kenangan peninggalan orang tuanya kemudian menyebarluaskan dengan pengajaran etika dan agama di Yale. Tiga orang anak perempuannya, Bridget, bekerja sebagai *Bach Choir* di Bethelhem, Pennsylvania; Louise mengambil doktor di bidang peternakan tetapi sekarang ahli dalam terapi bicara; serta Ellie seorang pembuat film.

Di dalam metafisika Hare cenderung terlalu menganggap perbedaan-perbedaan yang gagal dalam verbal yang berkenaan dengan bahasa dan istilah. Kecurigaan ini diekspresikan pertama dalam *paper* yang tidak diterbitkan, yakni '*Moral Objectivity*' (1949-1950). Skeptisisme lainnya diterbitkan dalam dua esainya '*Nothing Matters*' (1957) dan '*Ontology in Ethics*' (1985) yang mencurigai kekosongan dalam term benar (*true*), fakta (*fact*), dunia (*world*), objektif (*objective*), seorang realis (*realist*), dan kognitif (*cognitivist*). Selama di Balliol pada tahun 1964 ia masih mendapatkan beasiswa dari *British Academy*. Akan tetapi, tak dapat dihindari pada tahun 1966 ia dipromosikan untuk dipindahkan ke *White's Chair of Moral Philosophy* di *Corpus Christi*. Ia beralih sebagai ketua *Philosophy Panel* dan pengawas para sarjana dari Fakultas *Board* selain juga bekerja sebagai pengajar. Ia pensiun dari Oxford tahun 1983 sebagai '*Graduate Research Proffesor Philosophy*' di Universitas Florida, Gainesville. Hare juga menerbitkan esainya dalam bidang etika terapan serta etika biomedis tahun 1955, 1989, sampai 1993 mengenai praktikal etika.

Dick terganggu dengan perubahan musim *Indian Summer* dan mengalami *stroke*. Ketika ia kembali ke Ewelme tahun 1994, ia sempat diserang dan di perjalanan mengalami penipuan. *Paper* terakhirnya disesuaikan dan diperuntukkan kepada para sarjana yang menjadi penonton di *King's College*, London, *Sorting Out Ethics* (1997). Pada ulang tahunnya yang kedelapan puluh ia

memberikan koleksi *papernya Objective and Prescriptions and Other Essays* (1999). Dia meninggal dunia di kota Ewelme, Oxfordshire pada 29 Januari 2002.

Demikian runtutan kronologi yang membentuk pedoman teori Hare. Pengalaman yang dialami secara langsung berperan penting dalam pembentukan argumentasinya. Ia melihat sendiri dan merasakan diskriminasi dan penghinaan, masuk penjara, mengalami perang dan berbagai masalah disodorkan kepadanya sebagai realitas historis dan bukan sebagai hal yang ia pilih sendiri dengan bebas. Pemahaman Hare sangat mempengaruhi pemikiran filsafat pada pertengahan abad kedua puluh. Teorinya merupakan perkembangan dari pemahaman tentang prespektivisme universal yang ia yakini memimpin sebagian besar agen untuk membentuk pilihan utilitarianisme.

4.2 Tokoh-Tokoh yang Mempengaruhi Pemikiran R.M. Hare

Richard Mervyn Hare dipengaruhi oleh pandangan emotivisme A.J. Ayer dan Charles L. Stevenson, Filsafat Bahasa J.L. Austin, Filsuf Ludwig Wittgenstein, utilitarianisme, dan Immanuel Kant. Dalam menstrukturkan penilaian moral logis, Hare mengarah pada penalaran rasionalitas-emotivisme Kant dan Ayer. Menurutnya, *moral judgement* mengungkapkan preskripsi yang imperatif tentang bagaimana kita menginginkan kehidupan.

Sebuah aliran emotivis pengaruh dari Ayer yang memberikan pandangannya tentang pembenaran moralitas secara dogmatis dan tersentak pada sebab kausalitas sehingga termanipulasi secara emosional. Penilaian moral sebenarnya tidak menilai tentang sesuatu, tetapi mengungkapkan tentang perasaan seorang terhadap kejadian atau tentang objek-objek tertentu. Moralitas adalah hasil keterkaitan *attitude* dan *emotion*. Perbedaan dalam penilaian hanyalah perbedaan paham-paham di sekitar yang tidak tahan uji. Keputusan moral bukan merupakan pernyataan tentang manusia dan perbuatannya, melainkan ungkapan emosi dan perasaan yang bersifat subjektif. Pernyataan dapat bermakna, jika dapat diverifikasi secara niscaya atau dapat dibuktikan dan diperkuat oleh

pengamatan. Inti teorinya adalah penolakan pengandaian, bahwa teori moral adalah pernyataan pura-pura dan tidak menyatakan sesuatu apapun kecuali bersifat emotif.

C. L. Stevenson menjabarkan dua unsur di dalam sebuah penilaian moral yakni *belief* dan *attitude* yang berkenaan dengan fakta. Paham-paham moral seperti yang baik atau tidak dapat dibenarkan, tidak memiliki arti informatif melainkan *emotive* yang mempengaruhi lawan bicara. Sebuah perbuatan ‘baik’ atau ‘benar’ tidak hanya mengungkapkan persetujuan seseorang terhadap suatu perbuatan, tetapi juga mendorong yang lain agar bersama-sama setuju. Hare menolak pendapat Stevenson bahwa penilaian moral mampu mempengaruhi sifat orang lain. Namun pernyataan moral bermanuver pada penilaian moral agar bersifat membimbing (*guidance*). Dengan mengungkapkan suatu penilaian moral, maka hal tersebut sekaligus mengatakan tentang yang seharusnya dilakukan (*prescription*). Hare tidak mengadopsi ataupun bertentangan dengan Stevenson bahwa pada dasarnya penilaian moral tidak berkenaan dengan hal mendeskripsikan, melainkan pada hal mempreskripsikan yang berarti menganjurkan, meresepkan, atau memberikan suatu pandangan tentang keputusan. Penilaian moral hanyalah ekspresi dari ‘emosi’ dan ‘perintah’ yang memiliki reaksi emosional yang sama sebagai sesuatu yang pembicara lakukan. Demikian penilaian moral memiliki arti rasional karena mampu memberikan alasan dan pertimbangan atas segala tindakan yang dilakukan. Levinson membuat definisi tentang pragmatik dari studi bahasa dan perspektif fungsional yang berusaha menjelaskan aspek linguistik dengan sebab-sebab dan pengaruh-pengaruh nonlinguistik. Ia membatasi pengertian pragmatik pada suatu studi yang mengkaji aspek-aspek struktur linguistik dan studi tentang aspek-aspek kegunaan bahasa yang tidak relevan secara gramatika (Levinson, 1967).²⁸

Hare juga mengadopsi dikotomi yang mendasari sebuah kognisi dan kehendak. Kognisi adalah sesuatu yang dipengaruhi, dan kehendak adalah

²⁸ Shomali, 2001. (hlm. 122-125)

kausalitas yang disadari. Kognisi adalah sesuatu yang pasif, dan yang aktif menggerakkan fungsionalis sebagai personalitas adalah kehendak. Selain itu, hal penting yang menekan sebuah kebaikan adalah pernyataan 'seharusnya' (*ought*). Kata ini telah keluar dari arti dalam perbendaharaan kata yang sebenarnya, bertumbuh dengan makna yang memiliki kekuatan tersendiri. Ia hidup dibentuk dari perwatakan yang benar dengan kondisi bahagia dan bermoral karena adanya konteks 'dosa' di dalamnya. Mengikuti jejak Plato bahwa tidak ada manusia yang dapat benar-benar bahagia dengan dirinya dan keegoisannya sendiri karena kebahagiaan adalah berhimpun dengan saling berguna dengan yang lain. Seorang tiran yang sewenang-wenang dengan keegoisannya adalah hambatan tak terelakkan menuju kebahagiaan dalam versi utilitarianisme. Oleh Plato, ia terpengaruh mengenai dunia ide dalam memutuskan konsep *intuitive level*, yakni berfikir tentang moral (*moral thinking*). Ide tentang yang benar akan menetap dalam pikiran seseorang sepanjang berada pada hal-hal yang baik dan dilakukan dengan baik. Dia mengenali kasus-kasus dengan kesalahan yang berbeda dan mengakomodasi bagian Plato tentang menyadari kontradiksi dalam diri (*self-contradiction*). Pada intinya ia mengambil kebanyakan komentar dari Plato dan Aristoteles, menyamakan ketepatan dan membenarkan empati dengan sintaksis dan perbendaharaan kata.

Hare terpengaruh Austin dan Wittgenstein yang memandang makna sebagai sesuatu yang bertalian dengan tindak tutur (Steinberg dan Jacobovits, 1971). Ia menggunakan filsafat bahasa sehari-hari Austin dan pandangan Wittgenstein mengenai makna yang digunakan di dalam filsafat bahasa. Bagi Austin terdapat sebuah 'kekeliruan deskriptif' dimana kebenaran akan suatu makna tidak dideskripsikan secara jelas karena kondisi tertentu. Sebuah perilaku memiliki aturan permainan (*rules of game*) dalam bentuk kehidupan (*form of life*). Wittgenstein mengatakan bahwa proposisi merupakan situasi dan itu bukan hanya menggambarkan secara logis benar atau salah, melainkan setuju atau tidak setuju dengan kenyataan pada situasi tersebut. Maka, penilaian moral tidak hanya

mengekspresikan persetujuan atau ketidaksetujuan, tetapi sekaligus tidak benar atau kepalsuan dibaliknya.

Utilitarianisme sendiri diperoleh dari kombinasi pertukaran peran untuk mencapai kecenderungan universal yang mencakup preferensi (rasa kelebihsukaan) kebanyakan pada suatu tindakan, disertai konsekuensinya dengan titik temu kepuasan dan penderitaan terkecil. Pada dasarnya Hare tidak pernah mengatakan bahwa pernyataan moral berpatokan pada imperativisme tentang yang mana yang lebih baik. Ini didefinisikan dari evaluasi term imperatif sumbangan Hume yang berasal dari intuisi. Selain itu, logika imperatifnya juga dipengaruhi Kant dengan mengeksplorasi kemungkinan menyimpulkan dari indikasi dan premis-premis imperativismenya sendiri. Kant mengutarakan pemberian berat harus seimbang seperti layaknya timbangan yang seolah-olah untuk diri sendiri dan memperlakukan setiap orang sebagaimana yang kita inginkan kepada diri kita. Hakikat pemikiran Kant adalah kehendak dikatakan baik apabila melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya yang bertujuan untuk tujuan itu sendiri. Suatu kehendak sesuai dengan kewajiban jika didasari pertimbangan (maksim) yang dapat diuniversalisasikan. Suatu maksim dapat dikatakan bersifat moral ketika mampu berlaku umum. Prinsip penguniversalisasian atau prinsip objektif dapat menentukan kewajiban yang mengikuti perintah (imperatif) dari dalam diri menurut maksim yang dapat diuniversalisasikan dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Kant berusaha memberikan pendasaran kepada klaim moralitas. *Moral statement* tidak hanya memiliki makna deskriptif tapi juga perspektif. Pendekatan deskriptif bersifat membeberkan masalah, sedangkan pendekatan preskriptif bersifat merumuskan dan memberi jalan keluar. Imperativisme menunjukkan kesepakatan dari keutamaan mana yang lebih dihendaki (*overriding desire*), dan konotasi deskriptifnya menentukan standar persetujuan tersebut. Sebuah keputusan bersifat moral apabila dapat diuniversalisasikan dalam kasus situasi yang sama. Maka universalisabilitas perspektivisme adalah suatu tanda keputusan moral yang jatuh pada teori utilitarianisme.

4.3 Pemikiran Perspektivisme dan Universalisabilitas R.M. Hare

Perbedaan pemikiran Hare dengan pemikiran utilitarian sebelumnya terletak pada rasionalitas *moral language* yang diungkapkan dalam imperativisme fakta umum hingga dapat ditarik pembuktian logis. Hare adalah penemu *universal perspicitivism* yang bertolak dari preferensi posisi orang lain sehingga menjadi imparzialità dan dapat menghasilkan keputusan etis (*making-decision*). Dalam pendiriannya, moral bersifat nonkognitif karena kondisi pikiran dan ungkapan moral bukan pernyataan ilmiah yang dapat diverifikasikan kebenaran atau kesalahannya dalam suatu bentuk. Konsep universalisabilitas dan perspektivisme merujuk pada preskripsi dari situasi kebanyakan guna menunjukkan respon yang *equal* dan inklinasi (kecenderungan) memperlakukan kepentingan (*interest*) orang lain seperti halnya milik kita sendiri. Kecenderungan ini memberikan pertimbangan tentang preferensi konsekuensi yang akan terjadi setelahnya. Atas dasar ini Hare berdiri pada posisi *act-utilitarianisme* yang sekaligus mencakup *rule-utilitarianisme*. *Act-utilitarian* adalah teori moral yang berlandaskan prinsip menghasilkan kebahagiaan terbesar kepada semua orang yang turut dipengaruhi oleh tindakan tersebut. Prinsip diterapkan terhadap tindakan tertentu dalam situasi tertentu atau dengan kata lain bersifat relatif dan teleologikal. Sementara *rule-utilitarianism* adalah tindakan yang diambil dalam kasus tertentu berdasarkan peraturan dan diperlukan kepatuhan untuk menerimanya agar dapat memaksimalkan kebahagiaan kolektif sebagai utilitarian yang bukan atas penilaian tindakan sendiri. Prinsip ini bersifat deontologis dan diterapkan pada pemilihan seperangkat aturan yang pada saatnya akan digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu.

Bentham sebagai utilitarianisme klasik, menekankan teorinya pada pencapaian kebahagiaan individu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, setelah itu baru kebahagiaan umum akan tercapai. Setiap orang mencapai satu hal yang sama, tidak lebih agar seimbang dengan memberikan berat yang sama untuk setiap *interest* mereka yang merujuk pada *the great many utilitarian*. Ia menekankan pada konteks *pleasure* sebagai tujuan semua orang dan sebaik mungkin

menghindari diri dari *pain*. Sementara itu, Mill lebih menekankan teori tentang 'utilitas' yang memberikan manfaat untuk kebanyakan orang. Mill sudah mencapai konsep *happiness* bahwa kebahagiaan juga berarti menghindari rasa sakit, namun pemenuhan kebahagiaan individu berdasarkan manfaat bagi jumlah kebanyakan orang. Hare tiba pada istilah *welfarisme* sebagai unsur utilitarianisme disertai dengan pertimbangan konsekuensi setelah dilakukannya suatu tindakan dalam kebaikan setelah dijumlah dan dirata-ratakan (*aggregationisme*). Oleh karena pertimbangan konsekuensi-konsekuensi tersebut yang memungkinkan untuk ditingkatkan atau dikurangi demi kesejahteraan keseluruhan serta semua yang terpengaruh secara imparialitas di dalamnya, utilitarianisme berbeda dari *perfectionisme* atau bahkan egoisme. Sebelumnya, Mill menyatakan ini sebagai *happiness* dan bukan *welfare*. *Happiness* ditujukan pada definisi kesenangan yang mengosongkan diri dari rasa sakit. Utilitarianisme klasik seperti berpendapat bahwa yang sesungguhnya baik adalah kesenangan (atau kebahagiaan) dan penderitaan adalah sesuatu yang buruk. Maka, suatu perbuatan dikatakan benar selama menambah kesenangan dan salah jika menimbulkan penderitaan. *Pain* yang dimaksud adalah penderitaan yang melebihi rasa sakit dan sebaliknya, memilih untuk masuk dan berada di dalam kondisi yang mereka sukai. *Desireability* adalah bagian dari *happiness* yang secara konkret lebih merujuk pada kecenderungan preferensi terhadap tingkah laku individu secara habitual dan intensional. Utilitarianisme modern mengatakan bahwa kesenangan serta tidak adanya (absensi) penderitaan, bukanlah satu-satunya hal yang paling diinginkan manusia. Etika tidak selamanya didasari secara eksplisit oleh pengalaman metafisik. Untuk meyakini apa yang diinginkan seseorang adalah baik dan benar, tersirat dengan memuaskan sebanyak jumlah rata-rata yang terbaik dari keinginan individu. Adapun kepentingan yang satu menjadi sama pentingnya dengan kepentingan yang lain berdasarkan dari keadaan faktual tertentu.

Hare mendefinisikan bahwa *moral judgement* terbagi atas universalisabilitas dan perspektivisme. Universalisabilitas membedakan perintah (*command rational*) sebagai sesuatu yang lebih baik yang datang dari dalam

kesadaran manusia. Perspektivisme sendiri adalah fitur yang membedakan ilmu moral dengan *natural science* atau historisitas karena mengandung rumusan tindakan tentang referensi yang lebih baik atau sebaiknya (*imperative prescribe action*). Hare menggabungkan nonkognitivismis dan intersubjektivisme untuk pendirian moralnya. Baginya, teori etika adalah nonkognitivisme karena berasal dari kondisi pikiran maupun ungkapan moral, dan bukan merupakan pengetahuan serta pernyataan kognitif yang dapat diverifikasi kebenaran ataupun kesalahannya sehingga menghasilkan suatu bentuk yang pasti. Hare juga menjelaskan adanya perbandingan antara metode penyelidikan etika dan metode penyelidikan ilmiah. Analogi yang digunakannya bahwa etika seperti halnya matematika yang netral, sebagaimana teori-teori yang dikembangkan dalam kerangka konseptual.

*“In the kind of scientific reasoning just described, mathematics plays a major part, for many of the deductive inferences that occur are mathematical in character. So we are bound to admit that mathematics is relevant to scientific inquiry. Nevertheless, it is also neutral, in the sense that no discoveries about matters of physical fact can be made with the aid of mathematics alone, and that no mathematical inference can have a conclusion which says more, in the way of prediction of observations, than its premisses implicitly do”.*²⁹ (Hare R. , 1965) (88) (89).

Unsur lain yang digunakan Hare dalam teorinya adalah keutamaan (*overriding*). Putusan moral mengenai yang benar atau salah baginya merupakan realisme moral atau objektivisme yang nonmetafisik karena diambil berdasarkan fakta-fakta yang memang mengandung nilai benar dan salah. Selain itu, rasionalitas juga merupakan unsur penting dalam moralitas yang datang dari pertanyaan moral dalam diri dan akan terjawab dari fakta-fakta yang membawa pengetahuan serta konsekuensi logisnya. Hare juga menguraikan bahan-bahan untuk penalaran moral agar menengahi sangketa yang muncul dari *interest* orang

²⁹ Terjemahan : “Dalam jenis penalaran ilmiah yang telah dijelaskan, matematika memainkan peran utama untuk membuat kesimpulan-kesimpulan deduktif dalam karakter atau simbol. Jadi kita wajib mengakui bahwa matematika adalah relevan untuk jenis penyelidikan ilmiah. Namun demikian, ini juga berarti netral bahwa tidak ada penemuan tentang suatu fakta fisik yang dapat dibuat dengan bantuan matematika saja, dan tidak ada kesimpulan matematika dengan kesimpulan lebih, dengan cara memprediksi pengamatan dari premis-premis yang implisit .”

yang berbeda-beda. Di dalam praktiknya, unsur-unsur ini bekerja identik dengan keyakinan ideal atau teori ilahiah, namun mampu lolos uji menjadi sah. Unsur-unsur penalaran tersebut didasarkan pada logika, inklinasi, fakta dan imajinasi. Logika memberikan penalaran dari kasus tertentu dengan keuniversalisabilisan perspektif dan kesimpulan yang konsisten. Inklinasi atau kecenderungan, memberdayakan rasa peduli pada sekitar tentang apa yang terjadi. Fakta menjabarkan pemahaman kasus disertai dengan konsekuensi, historisitas, dan sebagainya. Sedangkan imajinasi adalah tindakan membayangkan dampak atau konsekuensi dari bertukar posisi (*switch role*) tersebut. Secara logis, kombinasi universalisabilitas dan perspektivisme mampu mempreskripsikan tindakan yang rasional. Kemudian keputusan dapat dicapai dan berlaku universal dengan inklinasi yang memberikan ruang dan reflektivitas terhadap *interest* masing-masing individu, fakta, dan imajinasi yang memberikan gambaran tentang konsekuensi yang akan terjadi.

a. Universalisabilitas

Universalisabilitas yang dipaparkan Hare merupakan evaluasi logis untuk membuat penilaian yang sama dengan mencoba menempatkan pada kasus yang serupa. Tesis logisnya diperoleh dari konsekuensi imperatif seperti '*ought*', '*should*', atau '*good to be done*'. Untuk menentukan tindakan penggabungan universalisabilitas dan perspektivisme, penilaian evaluatif harus mampu memberikan kemungkinan yang kuat dan rasional. Versi ini mampu menjawab keberatan-keberatan yang terjadi pada standar versi utilitarianisme sebelumnya. Dia juga menjelaskan reaksi dari tipe-tipe kasus yang berbeda-beda. Fitur logis dari *natural language* dalam penilaian moral yang dinyatakan dalam term '*ought*', mengklaim tentang apa yang benar (*rightness*). Ini mencakup universalisabilitas dari kebanyakan persepsi dan mengandung tentang keutamaan (*overriding*). Penilaian moral (*moral judgement*) adalah tentang cara pandang dan apa yang menjadi keutamaan sehingga '*ought*' menyiratkan sebetulnya '*can*' .

Inti pemikiran Hare bahwa dalam pengambilan keputusan (*decision making*) di dalam moral, yang perlu dipertimbangkan adalah preferensi diri sendiri dan orang lain yang menghitung keseimbangan. Rasa kelebihsukaan diri sendiri mungkin saja berbenturan dengan preferensi orang lain. Untuk itu diperlukan pertukaran peran “*stand in someone else’s shoes*”³⁰ sehingga dapat membayangkan preferensi bila menjadi yang lain. Ini bertolak dari maksim *The Golden Rule* untuk memperlakukan semua orang, termasuk diri kita sendiri, dengan ketidakberpihakan (*imparsialitas*).

Kriteria universalisabilitas Hare menggabungkan *intuitiveness* dari corak tradisi *Golden Rule*, yaitu berbuat kepada orang lain sebagaimana apa yang akan mereka lakukan kepada anda – dengan mengimajinasikan posisi diri anda benar-benar dalam peran mereka (*in their shoe*). Hal tersebut didasarkan pada logika penilaian moral dan bukan hanya pada otoritas ilahiah. Dengan mengimplikasikan pemahaman yang baik, *Golden Rule*, maka teori Hare jatuh pada kesimpulan preferensi utilitarianisme.

Universalisabilitas ingin memaksimalkan sebuah tindakan dengan menonjolkan *interest* dari jumlah atau rata-rata kebanyakan (*aggregat*) untuk kemakmuran bersama. Pada dasarnya *aggregationisme* tidak ingin mengimplikasikan sistem distribusi kesejahteraan, melainkan lebih pada memaksimalkan pada jumlah total dalam rata-rata *interest* dan *desire people* yang netral untuk mencapai keputusan yang seimbang (*equal*). *Aggregationisme* mencoba menyamaratakan *interest* orang yang berbeda-beda dengan menunjukan sebetulnya rasa menaruh perhatian (*respect*), dan akhirnya membawanya langsung pada bentuk dari rata-rata penjumlahan (*aggregationisme*). Keputusan moral yang fundamental diambil berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang baik dan pertimbangan *aggregationis*. Konteks perolehan pemuasan kepentingan secara

³⁰ McDermott, Michael. (1983). *Hare Argument for Utilitarianism*. Blackwell Publishing. *The Philosophical Quarterly* Vol. 33, No. 133 pp. 386-391.

maksimum dari rata-rata jumlah kebanyakan ini, layaknya pemungutan suara mayoritas yang didedikasikan untuk kesejahteraan dari berbagai kepentingan yang berbeda.

Prinsip universalisabilitas mengandung substansial besar dari *interest* bersama atas preskripsi yang sudah diuniversalisasikan. Tentu saja dibutuhkan pengetahuan dan informasi tentang fakta agar prinsip ini menjadi rasional. Penilaian universalisabilitas diklaim Hare sebagai pemahaman *universalizable* yang dapat memberikan penilaian identik dalam kasus yang serupa sehingga rasa kepemilikan yang sama, berujung pada pemberian preskripsi dari preferensi tersebut. Dalam kasus multilateral yang mencakup masalah interpersonal yang kompleks serta mempengaruhi banyak orang yang terlibat di dalamnya, disederhanakan Hare dengan mengadopsi preferensi kebanyakan dan dikombinasikan dengan preskripsi universalisabilitas *desire and interest*. Preskripsi inilah yang merujuk untuk menghasilkan utilitarianisme karena kebulatan prinsip umum untuk dicapai dan penalaran mewakili diri dalam situasi lain.

Tesis universalisabilitas didirikan oleh argumen filosofis yang mampu diuji secara logis dan diterapkan dalam spasial temporal yang tidak memperlakukan titik koordinat individu. *Human being* yang hidup bersosial dan bermasyarakat dibentuk oleh suatu budaya yang memiliki konsekuensi universal terhadap etika. Bahwa untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat, membutuhkan sejumlah landasan untuk menuju bentuk objektivisme yang universal.

Hare menekankan kemungkinan, keniscayaan, dan penalaran logis dalam etika. Persoalan moral mampu dipecahkan dengan menggunakan metode rasional. Satu-satunya kewajiban rasional bagi moralitas adalah konsistensi. Meskipun demikian Hare menolak jika hal ini akan membawa pada konsep relativisme etika karena hal tersebut mengandung unsur subjektif dari predikat moral. Moralitas adalah tentang konsistensi

ketulusan dan kesukarelaan. Sebuah prinsip dapat secara logis menjadi prinsip moral karena bersifat luwes untuk diuniversalkan. Konsistensi moral inilah yang dikembangkan dalam ruang utilitarianismenya.

Dalam bukunya *Freedom and Reason* Hare juga memperingatkan bahwa prinsip moral diperoleh dari imparsialitas (ketidakmemihakkan) dengan seolah-olah berada dalam situasi aktual, bermanfaat, dan se-rasional mungkin. Ia mengambil pandangan *universal prescriber* (sudut pandang pengamat ideal) agar setiap agen memberikan bobot yang sama pada kepentingan semua pihak, mengambil sudut pandang general dalam situasi aktual, dan membuang rasa egoismenya sendiri. Akhirnya, hipotesis dari prinsip moral yang tersedia dapat diterima untuk dipakai dalam kasus aktual setelah dipertimbangkan segala konsekuensinya.

*“...it is sufficient that he should consider hypothetically such a case, and see what would be the consequences in it of those moral principles between whose acceptance and rejection he has to decide. Here we have an important point of difference from the parallel scientific argument, in that the crucial case which leads to rejection of the principle can itself be a supposed, not an observed, one. That hypothetical cases will do as well as actual ones is important, since it enables us to guard against a possible misinterpretation of the argument which I have outlined.”*³¹ (Hare R. , 1965) (92) (93)

b. Perspektivisme

Perspektivisme (*to prescribe*: mengharuskan) merupakan varian yang nonkognitif namun dalam tindakan membimbing (*guidience*). Pertimbangan agar penilaian moral (*moral judgement*) menjadi rasional adalah dengan merefleksikan seperti apa sebuah tindakan mempengaruhi

³¹ *Terjemahan* : “...ini sudah cukup bahwa ia seharusnya mempertimbangkan hipotetis dalam kasus seperti itu, dan melihat apa yang akan menjadi konsekuensi di dalamnya prinsip-prinsip moral dan ia harus memutuskan antara penerimaan dan penolakan . Di sini kita memiliki titik perbedaan penting dari argumen paralel ilmiah, dalam kasus penting yang mengarah pada penolakan terhadap prinsip itu, dapat menjadi yang diharapkan dengan sendirinya, bukan sesuatu yang diamati. Bahwa hipotetis dari kasus-kasus akan melakukan yang paling sama benar untuk sesuatu yang paling penting, karena memungkinkan kita untuk menjaga salah tafsir yang memungkinkan dari argumen yang saya telah diuraikan.”

orang-orang di sekitar sehingga penderitaan yang dialami seseorang bertalian atau mengalami keterhubungan dalam sebuah situasi. Situasi yang dihadapi dengan preferensi dari perspektif *switch role* tersebut akan memberikan konsekuensi positif serta negatif untuk dijadikan pertimbangan. Maka tindakan yang dihasilkan akan dipengaruhi pilihan tentang kepuasan (*satisfy*) atau penderitaan (*suffer*). Hare memperoleh kombinasi perspektivime, universalisabilitas dan rasionalitas dengan preferensi *switch role* untuk mencapai utilitarianisme. Penalaran moral tidak dapat menyimpulkan hasil akhir sebuah fakta, tapi mampu menguji konsekuensi dan konsistensi yang datang karenanya. Prinsip moral mengeksplorasi prinsip logis seperti bertukar posisi (*switch role*) dan tindakan yang sebaiknya dilakukan dalam situasi yang sama, memperlakukan *interest* orang lain seperti seolah-olah kepentingan pada sendiri.

Agar persetujuan secara murni dapat menilai bahwa “A harus melakukan x pada B dan C”, maka seseorang harus secara tulus menilai “B harus melakukan x kepada A dan C” dan “C harus melakukan x pada A dan B”. Ini adalah *switch role* dimana seseorang harus menyetujui hal tersebut sepenuhnya terlepas dari apakah individu tersebut A, B, atau C. Menurut Hare, ini berarti bahwa universalisabilitas mengarah pada preferensi utilitarianisme. Persetujuan pada klaim ke-harus-an (*oughtness*) merujuk pada hal reflektisitas dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul jika seseorang melibatkan diri dan bertukar posisi (*switch role*).

Unsur utilitarianisme berikutnya ialah *consequentialisme* yaitu pandangan tentang berbagai konsekuensi yang mendeterminasikan tindakan moral sebagai konsekuensi yang ingin dihadirkan untuk mencapai *welfarisme*. Tindakan adalah sebuah pergerakan dari tubuh dan konsekuensi adalah hasil apa saja yang terjadi dari pergerakan tersebut. *Consequentialism* menentukan kualitas moral dari sebuah tindakan tetapi

tidak berarti ini mendefinisikan bahwa semua konsekuensi memiliki relevansi dengan moral. Sesuatu yang relevan secara moral dengan tindakan yang direncanakan akan mempersingkat konsekuensi yang secara sengaja membawa dampak dari apa yang kita lakukan sehingga hal ini dapat mengestimasi probabilitas dari konsekuensi tertentu atas keputusan yang mungkin. Di dalam informasi dan pengetahuan yang dimiliki, pembuatan keputusan yang rasional bisa dilihat dari peluang probabilitas (*the light of probability*). Menentukan bahwa sebuah tindakan adalah baik atau buruk didasarkan karena konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, bukan karena tindakan itu sendiri benar atau salah. Konsekuensialisme di dalam etika adalah pemahaman mengenai pertimbangan yang diperoleh dari hipotesis yang dipengaruhi teori moral untuk sebuah masalah dari berbagai kejadian yang ada. Salah satu bentuk konkret dari konsekuensialisme memperhitungkan konsekuensi dari segi manfaat. Konsekuensi yang didukung oleh preferensi (kelebihsukaan) umum dari utilitarian akan didapatkan sejumlah kebaikan dari berbagai kepentingan. Preferensi yang baik memberikan referensi yang sesuai dari segi moral untuk keputusan sosial.

Preferensi bagi Hare digunakan untuk melingkupi *desire* baik yang hadir saat ini maupun yang absen dan harus dimiliki. Versi utilitarian menyampaikan teori yang dimaksimalkan kepuasannya dalam batas pertimbangan preferensi tentang apa yang seharusnya dialami pada kasus tertentu. Mengsinkronisasikan preferensi dengan dedikasi *happiness* baik untuk sekarang maupun selanjutnya. Kebahagiaan maupun kesejahteraan menjadi sebuah keseluruhan yang melampaui rasa suka maupun tidak suka seseorang, tetapi lebih pada rasa terpuaskan untuk kebanyakan. Untuk itu, *happiness* dalam konteks utilitarianisme direformalisasikan sebagai jenis preferensi yang juga memberikan asumsi pertimbangan atas preferensi-preferensi kemakmuran dan kesejahteraan.

Memang dalam memikirkan moralitas dibutuhkan pengalaman aktual dari pada imajinasi belaka. Hare membantu memisahkan kemungkinan untuk apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang mustahil terjadi.

“...though they help to stimulate our imaginations, do not by themselves help us, very much, to separate what is really likely to happen from what is not, nor to assess the probable frequency of its occurrence”³². (Hare R. , 1965) (183).

Hare menegaskan kembali bahwa jika kita membayangkan situasi dari hipotesis yang sedemikian rupa seolah-olah situasi itu benar-benar terjadi, maka secara logis keinginan yang ada pada kita tentang situasi tersebut akan sama dengan keinginan-keinginan kebanyakan yang ada jika ada pada situasi tersebut dan jika situasi benar-benar menjadi nyata.

“...if we enter imaginatively into a hypothetical situation, and think about it as if it were going really to happen to us, we logically cannot have desires about it which are different from those which we would have if it were going to be real”.³³ (Hare R. , 1965) (197)

“...now all the preferences for what should happen to us in hypothetical situations in which we were in the others' roles have acquired the same weight as they would have if we were actually going to be in those roles and were perfectly prudent. This, indeed, is what makes utilitarians of us.”³⁴ (Hare, 1981) (226).

Hare berargumen bahwa untuk membuat kebaikan menjadi sebuah kaidah yang universal, sejauh ini bisa dilakukan meski dipengaruhi

³² Terjemahan, “...meskipun mereka membantu untuk merangsang imajinasi kita, tapi tidak dengan sendirinya membantu kita, sangat banyak pemisahan tentang apa yang sebenarnya mungkin terjadi daripada apa yang tidak, atau untuk menilai frekuensi kemungkinan kejadian tersebut.”

³³ Terjemahan, “...Jika secara imajinasi kita masuk ke dalam situasi hipotetis, dan berpikir tentang hal itu seolah-olah itu akan benar-benar terjadi pada kita, secara logis kita tidak dapat memiliki keinginan tentang hal yang berbeda dengan yang akan kita olah untuk menjadi nyata itu.”

³⁴ Terjemahan : “...kini semua pilihan terhadap apa yang harus terjadi pada kita dalam keadaan hipotesis, di mana kita berada pada peran orang lain, telah memperoleh bobot yang sama seperti yang diperoleh pada pilihan itu, jika seandainya kita benar-benar ingin berada dalam peran tersebut dan sungguh-sungguh menjalankannya. Sebenarnya, inilah yang diperbuat para utilitarian dari kita.”

berbagai cara dan pandangan tentang manfaat atau merugikan, dengan membayangkan tindakan dari sudut pandang orang lain. Dengan demikian kita dapat memperhitungkan keuntungan terbesar atau kerugian terkecil. Dalam teori ini Hare mempertahankan dasar perspektivisme universalnya, yakni “*the freedom which we have as moral thinkers is a freedom to reason*” (Hare, 1981) (6) (7) dan “*we remain free to prefer what we prefer*”. (Hare, 1981) (225)

Perspektif tidak dirancang untuk diutamakan pada pernyataan sekumpulan fakta-fakta, tetapi untuk mempreskripsikan atau merumuskan tindakan yang menjadi keutamaan di dalam penilaian moral atau berada di atas imperatif lainnya. Perspektif juga menerapkan sistem inklinasi (kecenderungan) yang membuka jalan untuk generalisasi serta membatasi diri pada kecenderungan diri sendiri. Permasalahannya meliputi multipersonal yang kompleks sehingga memberikan kemungkinan yang lebih luas dan rinci. Kemudian ini juga mempertimbangkan keberatan yang diuraikan dengan resolusi preskripsi universal dari membayangkan kemungkinan jika menjadi orang lain. Dalam situasi multilateral, setiap agen mempertimbangkan kepentingan yang tidak ingin turut terlibat dan mempengaruhinya, kemudian menggabungkannya dalam satu jawaban. Hal ini mencakup cara menyeimbangkannya dari kesulitan pilihan dan mencapai penentuan kesimpulan moral.

Human being tidak lepas dari dua hal, prinsip ‘*intuition level moral*’ dan ‘*critical thinking*’. Keduanya memiliki pendasaran preferensi yang cukup sama, tetapi manusia bervariasi khususnya dalam berpikir kritis dan bertindak dengan apa yang mereka tentukan untuk menjadi prinsip moral yang benar. Meskipun dalam cara yang sama, dalam menyilangi waktu dan keadaan yang berbeda, setiap individu pun akan bervariasi. Maka, seseorang seharusnya mengkombinasikan kedua prinsip tersebut. Dalam jenis kasus yang sama prinsip *intuitive level* menerima teori utilitas atau kegunaan berdasarkan *rule-utilitarianisme*. *Intuitive*

level dilakukan saat seseorang tidak sempat atau bahkan tidak ada waktu untuk berpikir kritis untuk mempertimbangkan sebuah tindakan atau ketika seseorang tidak dapat mempercayai pemikiran kritis dari pemikirannya sendiri. Sedangkan pada level *critical thinking* menerapkan jenis kombinasi *act-utilitarian* dan *rule-utilitarian* yang spesifik. Tingkat ini digunakan untuk menghadapi konflik argumentasi yang prinsipal atau kasus-kasus yang tidak biasa. Ketika hal pertama yang akan dilakukan adalah memaksimalkan utilitas dalam cara tertentu yang lebih sederhana, *intuitive level* sekaligus memisahkan dari rasa penyesalan atau rasa bersalah.

Intuitive level juga mampu dijustifikasi dengan praktik kegunaan yang berperan dalam proses pengajaran moral serta mereduksi kesalahan (*error*) di dalam *moral judgements*. Pada akhirnya determinasi bersandar pada prinsip moral yang harus diajarkan dalam membuat sebuah keputusan dan tindakan. Dalam *critical moral thinking*, perspektivisme dan *overriding* digunakan juga di dalamnya yang akhirnya akan tiba pada preferensi utilitarianisme sebagai alternatif mendamaikan *rational stronger* fanatik agar tidak terjebak pada *frustate stronger*. Dengan demikian, intuisi moral dibenarkan karena kita akan bertindak lebih baik dalam situasi-situasi tertentu, kebanyakan karena kita menanam intuisi moral lebih dalam pada karakter kita. Pada keadaan yang *inrealistic* pun, intuisi moral akan berhenti secara otomatis memandu kita untuk hal yang memang tidak pernah diniatkan.

Hare juga menggunakan analogi imajinasi '*the archangel*' dan '*the prole*' untuk membuat kita memahami mengapa *human being* membutuhkan kedua prinsip pemikiran tersebut. Dengan memadukan prinsip intuisi dari '*the archangle*' sebagai *super-human knowledge* sekaligus *no human weakness*, dan *critical thinking* sebagai '*the prole*' yang kurang informasi, tidak mampu berpikir kritis dan memiliki *weakness* dengan tingkat ekstrem. Dengan demikian prinsip *intuitive level*, jatuh pada moralitas yang dapat berlaku umum, etika terapan khusus, dan moralitas personal. Kesepakatan muncul pada *standar basic* dimana

setiap orang dalam masyarakat akan diharapkan mempertahankan keberlangsungan hidupnya dalam perihal yang terbaik. Fitur universal yang diberikan dari situasi dan kondisi tertentu, berlaku umum dari berbagai kultur pada waktu dan tempat yang berbeda. Atau standar baku untuk pelaksanaan berbagai profesi atau peran tertentu, serta individu yang berbeda dalam kemampuan bernalar yang kritis serta berbeda keadaan. Maka berpikir kritis akan membawa individu-individu tersebut untuk melatih diri dalam mematuhi seperangkat kesepakatan yang membentuk peraturan yang awalnya muncul dari *personal morality*.³⁵

Dalam *The Language of Moral* 1952, Hare berteori bahwa pernyataan moral pada dasarnya adalah pedoman untuk sebuah tindakan. Ini bukan hanya ungkapan sebuah emosi, tetapi sebetuk perintah tentang kewajiban. Ia menolak bahwa teorinya subjektivis. Ia berargumentasi bahwa etika menciptakan kesepakatan intersubjektif atau hubungan diantara subjek sebagai agen moral sehingga mencapai substansi umum untuk memajukan argumentasi moral. Argumentasi tersebut mendukung tindakan dan alasan sehingga sikap-sikap moral diakui, dipertahankan, dan dicapai jalan keluar dari berbagai masalah moral. Teorinya meghadapkan kepada pernyataan moral yang berkesimpulan logis objektif. Kesimpulan tersebut dapat diperoleh dari perintah yang lebih khusus menuju yang lebih umum karena bersifat universalisabilitas dan perbuatan yang mendapatkan persetujuan tetap, tentang benar atau salah dari dan untuk suatu keadaan tertentu. Suatu perintah dasar berdasarkan fakta membuat etika menjadi objektif, meskipun pilihan moral adalah subjektif dan relativis. Dalam *Freedom and Reason* (1963) Hare mengemukakan bahwa jika pengambilan pendirian di dalam moral mengalami kesulitan dalam psikologis, maka akan berujung pada posisi frustrasi yang fanatik. Ia akan berusaha untuk konsisten dengan pendiriannya yang dianggap idealis, logis, meskipun rasial karena menempatkan orang lain lebih rendah jika hal itu adalah benar dalam idealisnya.

³⁵ *Hare's Two Level Utilitarianism*. (2008). Department of Philosophy, Texas A&M University. www.philosophy.tamu.edu

Pertimbangan moral pun merupakan suatu pertimbangan yang telah matang dengan mengikuti prosedur dan mensejajarkan prinsip umum sekaligus pertimbangan khusus. Pertimbangan khusus yang dimaksud adalah hasil dari memindahkan diri dari posisi aktual dan membayangkan apakah yang akan dirasakan apabila menjadi orang lain. Dari proses ini, pertimbangan-pertimbangan pun dapat diuniversalisasikan secara konsisten. Prinsip-prinsip umum maupun pertimbangan khusus merupakan hasil dari sudut pandang yang ada di luar diri kita sendiri, yaitu sudut pandang dari pemikir atau simpatisan yang murni (*pure*). Kita membawa diri kita berada dalam sebuah situasi dan mempertimbangkan bahwa dalam situasi itu, kita perlu melakukan sebuah tindakan tertentu dengan mencari keseimbangan universal. Dengan demikian, seorang kaya raya misalnya, memiliki pemahaman yang lebih memadai tentang penderitaan yang dialami seorang miskin yang tidak mempunyai apa-apa.

4.4 Refleksi Kritis dari Kontribusi Implementasi CSR

Upaya mencapai pembelaan pada aplikasi CSR dari kerangka teori utilitarianisme Richard Mervyn Hare, dapat diproyeksikan dengan pertimbangan universalisabilitas dan perspektivisme, khususnya kepada komunitarian sebagai objektivisasi yang terkena imbas langsung dari aplikasi pengoperasian bisnis. Kasus kerusakan pada alam dan habitual masyarakat misalnya, alam telah dikontaminasikan oleh pengoperasian korporasi. Maka, konsep universalisasi pada kesepakatan substansial masyarakat umum merupakan pertimbangan agregat yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan agar membuahkan pemberlakuan kebijakan umum. Para pebisnis yang mulanya hanya berdedikasi pada profitabilitas semata tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, dapat mengaplikasikan perspektivisme untuk membayangkan dan mensituasikan diri pada peran masyarakat (*if I were in their shoe*) sebagai objektivisasi yang dirugikan. Inclinasi atau kecenderungan yang akan timbul dari membayangkan penggantian peran (*switch role*) ini, pada akhirnya akan bermuara pada kesepakatan umum bahwa pertanggungjawaban sosial memang dibutuhkan akibat dari dampak eksplorasi para pebisnis tersebut. Individu yang berada dalam posisi

yang tidak merasakan dampaknya secara langsung, dapat memperoleh faktum tentang situasi ini agar mampu membatasi *interest* dan *desire* pribadinya, kemudian mereka dapat melebur pada kepentingan (*interest*) umum agar lebih diprioritaskan.

Seperti diungkapkan Hare yang membedakan istilah *welfarisme* sebagai unsur utilitarianisme, pertimbangan berarah pada konsekuensi terhadap perlakuan suatu tindakan untuk kebaikan jumlah rata-rata (*aggregationisme*). Pertimbangan konsekuensi-konsekuensi tersebut berkemungkinan dapat ditingkatkan atau dikurangi demi kesejahteraan keseluruhan serta semua yang terlibat secara imparsialitas di dalamnya. Metodologi penyelidikan moral Hare juga meliputi sejumlah keyakinan yang ada pada masyarakat, seperti tradisi dan agama. Filsafat moral bersifat teoritis namun paralel terhadap masalah aktual. Terapan etika dari pengalaman langsung yang kemudian dipakai sebagai pedoman untuk menilai teori, menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Masalah-masalah yang timbul adalah sebetulnya kompleksitas yang disodorkan secara paksa oleh realitas historis tanpa dipilih oleh manusia sendiri secara bebas. Kombinasi teori dan terapan etika memberikan keputusan moral seperti yang diungkapkan Hare sebagai penggabungan terbaik atau bahkan selalu baik karena dibuat berdasarkan kesadaran dari keputusan yang melalui pertimbangan dan implikasi abstraksi rasio dengan tingkat khusus.

Bagi Hare, putusan moral merupakan preskripsi universal, bukan hanya tentang sikap dan emosi yang dirasakan. Dia juga meyakinkan ada kesenjangan logis antara 'adalah' dan 'harus' atau mengenai fakta dan nilai dengan penjelasan deskriptif dan preskriptif (menganjurkan). Peran dasar dari evaluasi bahasa bukan untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan sesuatu, tapi memberikan rumusan tentang kewajiban suatu tindakan yang menyiratkan perintah relevan mengenai segala hal tentang moralitas.

Hare adalah utilitarian yang juga seorang Kantian. Disamping universalisabilitas, yang menjadi pertimbangannya adalah mengenai

imperativisme dari deontologi Kant. Bagi Kant perbuatan yg memiliki ‘*moral worth*’ adalah perbuatan yang datang dari prinsip kewajiban. Adopsi terhadap intuitive level yang berusaha imparsialitas tanpa motif dari individu. ‘Deon’ dari kata Yunani yg artinya kewajiban. Jika ditelaah lebih dalam lagi, masalah paling utama dari deontologi Kant adalah maksim mana yang harus dipilih. “*Good will is not good because of what it effects or accomplishes, it is good through willing alone that is good in itself*” (Kant). Kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena keinginan untuk memperoleh tujuan kebahagiaan. Tanpa bertentangan dari kerangka teori Hare yang lebih berorientasi pada *welfarism* dari pada *happiness*, dan bukan hanya sekedar berangkat dari teori kegunaan, maka deontologi Kant juga berkontribusi pada CSR. Bahwa tanggung jawab moral muncul dari dalam diri individu sendiri sebagai kewajiban tanpa manipulasi terhadap *victim* yang lemah demi performa perusahaan atau alih-ailh *feedback* yang hendak dicapai. Moralitas dari dalam diri inilah yang memperkokoh esensi manusia sebagai makhluk yang bermoral. Karena bentuk kerugian yang meliputi *social cost* serta nilai lain yang dialami masyarakat yang terkena dampak langsung tidak akan pernah sebanding dengan kompensasi yang diukur dengan materi. Kategori imperatif berlaku karena mengejar suatu tujuan akhir yang berasal dari roh absolut (pasti baik). Kesadaran etis yang termanifestasi pada sebuah tanggung jawab memberikan keharmonisan di dalam penataan kemasyarakatan. Dengan melihat *victim* yang ditimbulkan akibat dari kebebasan yang bersilangan, putusan etis CSR adalah implementasi *good will* dari refleksi terhadap kesadaran etis atas kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pertimbangan imperativisme dan logika rasional dilakukan dengan pemberlakuan ketaatan di bawah kontrol normatif etis agar korporasi melaksanakan CSR. Kebahagiaan atau dalam hal ini kesejahteraan (*welfarisme*) substansial umum akan bergerak dari yang umum ke arah yang lebih umum. Alih-alih dalam jangka panjang, kedua belah pihak antara *shareholders* dan *stakeholders* pun mendapat pencapaian dari *interest* yang seimbang (*equal*). Dengan menjunjung tinggi kode etik untuk kedua belah pihak, para *shareholders*

maupun *stakeholders* pun mendapatkan *feedback* yang sama. Ini adalah suatu bentuk *fairness* bagi kedua pihak.

Peran CSR muncul sebagai penyuaran hak-hak komunal masyarakat marginal yang menuntut *human rights*-nya, *social cost*, unit kultural, serta *the natural of nature* dari dampak tindak korporasi. Secara kronologis, konsep CSR merupakan tuntutan (*demand*) buah dari koreksi sebuah kesalahan dalam perjalanan operasional kerja korporasi. Ini sesuai dengan konsep universalisabilitas dan perspektivisme yang merujuk pada preskripsi dari situasi kebanyakan guna menunjukkan respon yang *equal* juga pada pemberian inklinasi (kecenderungan) terhadap perlakuan kepentingan (*interest*) masyarakat seperti kepentingan perusahaan sendiri. Dengan inklinasi seperti dalam teori Hare, korporasi yang dapat diidentikkan sebagai subjek otonom diberikan ruang dan reflektisitas dalam *interest* masyarakat. Fakta yang terjadi dari dampak polusi dan limbah kegiatannya, dapat memberikan gambaran tentang konsekuensi yang akan terjadi khususnya dalam pengoperasian perusahaan. Setiap individu hidup bersosial dan bermasyarakat dibentuk oleh suatu budaya yang memiliki konsekuensi objektif turunan praktis dari teori etika. Moralitas adalah tentang konsistensi ketulusan dan kesukarelaan. Sebuah prinsip dapat secara logis menjadi prinsip moral karena bersifat luwes untuk dapat diuniversalkan. Pertimbangan CSR dijadikan keputusan bermoral dengan mengimajinasikan seperti apa sebuah tindakan mempengaruhi masyarakat sekitarnya sehingga penderitaan yang dialami seseorang bertalian atau mengalami keterhubungan dengan yang lain di dalam situasi tersebut.

Kegiatan CSR merupakan suatu bentuk *philanthropy* perusahaan memaksimalkan dampak positif dan meminimumkan dampak negatif atas kehadiran dan pengoperasian bisnis. Pada dasarnya *philanthropy* memang berbeda dengan altruistik. *Philantrophy* dapat digolongkan sebagai implementasi dari ajaran altruisme. Perusahaan melakukan tindakan sukarela (*charity*) dalam kontribusi sosial, ekonomi dan lingkungan. Sebagai kesadaran moral, tindakan

altruistik dan *philanthropy* lahir dari hati nurani untuk memperlakukan sesama serta menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri (*Golden Rule*).

Contoh dari kasus nyata PT NMR dan Freeport menunjukkan betapa sebetulnya CSR dibutuhkan untuk mengatasi penjajahan terhadap hak masyarakat terhadap alam maupun kehidupan sosialnya. Eksplorasi sumber daya dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap kehidupan, kesehatan, serta nilai sosial-kultural pada masyarakat sekitar. Perusahaan yang menutup mata terhadap kejadian tersebut akhirnya mendapatkan aksi protes dan kontroversi atas penyuaaraan kaum marginal dan pemerintah. Sudah seharusnya pebisnis kembali pada kesadaran etis untuk bertanggung jawab secara moral. Pertukaran posisi jika mereka mampu membayangkan penderitaan (*sacrifice*) yang dialami masyarakat, memberikan keputusan etis bahwa CSR memang dibutuhkan dalam keadaan universalisabilitas.

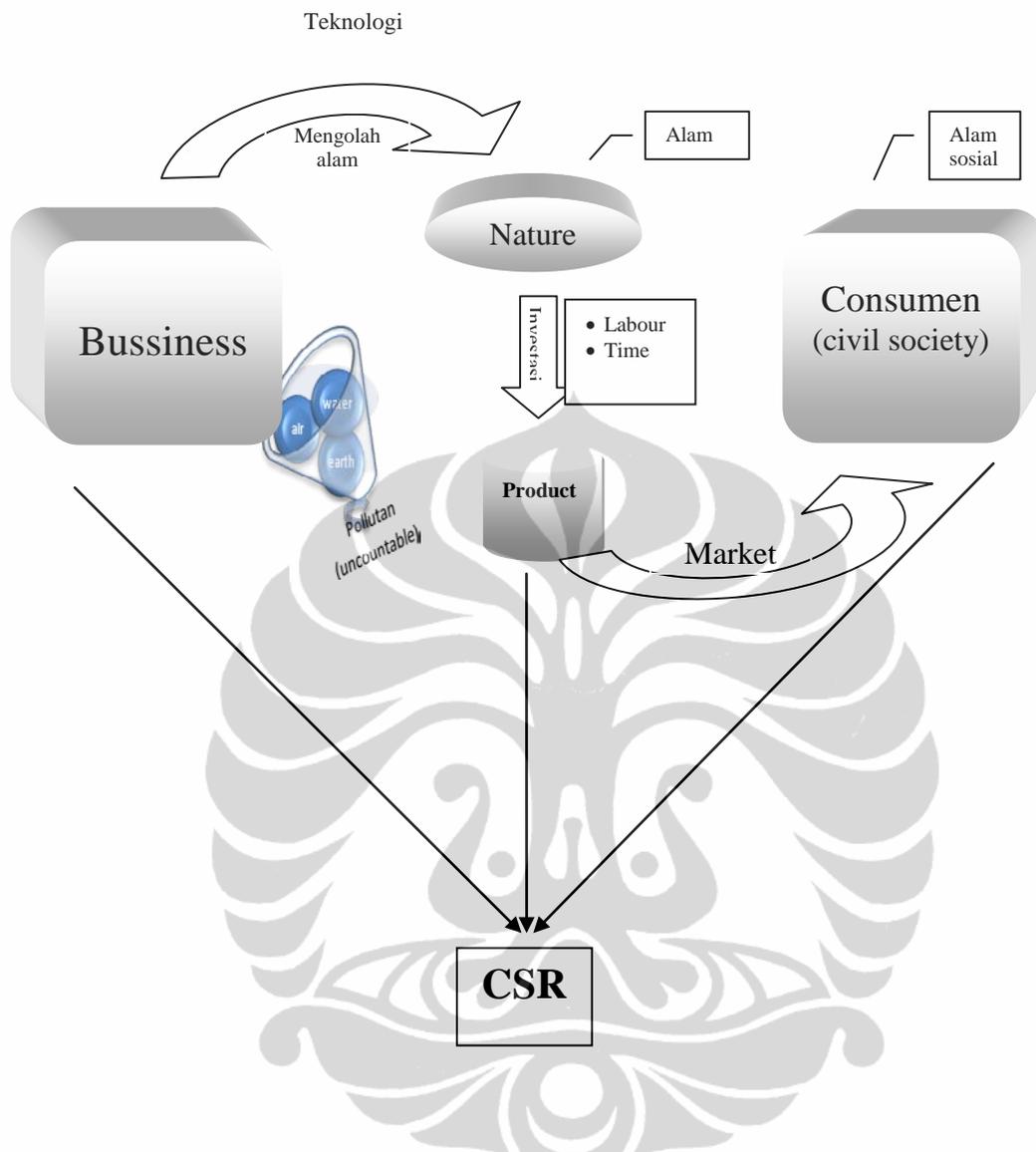
Istilah korporasi sendiri merupakan nomina tunggal yang berkonotasi jamak. Kata *corporate* diambil dari bahasa Latin '*corpus*' yang artinya badan atau tubuh. Plato mendefinisikan fungsinya sebagai kesediaan menjaga dan melindungi terhadap bagian lainnya. Keterlibatan ruang di dalam ruang pada masyarakat mengarahkan korporasi mau tidak mau jatuh pada dua dimensi, yakni ekonomi dan sosial. Untuk mewujudkan tanggung jawab kolektif, setiap individu di dalamnya bersedia terlibat dalam dua dimensi tersebut demi mencapai tujuan dan menciptakan *comfort zone* bagi semua pihak. Karena individu adalah makhluk bebas, ia memiliki kesiap-sediaan serta kehendak baik (*good will*) untuk berpartisipasi dalam menyukseskan tujuan ke arah konsekuensi positif. Pada arah itulah etika bisnis menggerakkan pihak terlibat agar keluar dari persemayamnya untuk saling memperhatikan kepedulian lingkungan luar. Pada titik ini, CSR mendapatkan makna hakikinya untuk melakukan filantropis. Dengan ini maka, pembentukan tujuan awal korporasi mengenai *profit oriented*, dengan sendirinya mengubah citra perusahaan menjadi *social welfare center*. Pebisnis tidak hanya

menjadi agen moral di lingkungan perusahaan, tetapi sekaligus menciptakan *comfort zone* untuk dirinya dan lingkungan luas. Korporasi pun mampu menjadi *agents of changes* setelah mendedikasikan prinsip moralitas.

Perilaku etis para pelaku bisnis kepada publik semacam hutang budi yang harus dikembalikan. Masyarakat telah memberikan tempat, ruang gerak, dan ruang kerja kepada korporasi untuk mengejar tujuan utamanya. Maka, semakin berkembang dan luasnya bisnis korporasi yang menjamur, semakin konvergen dan universal pula nilai dan prinsip moral yang berlaku. Kesuksesan dan keberlanjutan korporasi ditentukan oleh bentukan nilai sosial universal. Meskipun demikian, prinsip moral universal yang harus digarisbawahi ialah seperti yang digagas oleh Kant dalam *The Golden Rule* bahwa secara dasarnya manusia memiliki *sense of common good* yang sama. Kesadaran moral membentuk reaksi yang sama secara global mengenai nilai-nilai manusiawi yang dikemas dalam hak asasi manusia.

Disamping itu, bisnis juga harus mampu mengikuti iklim untuk keberlangsungan jangka panjangnya yang pada akhirnya bersumbangsih untuk memanusiakan manusia. Etika murni menaruh perhatian pada hakikat dan keputusan dari wacana moral, mengenai putusan moral yang objektif atau relatif, benar atau salah, serta kesimpulan moral dari fakta-fakta empiris. Pelaku moral harus didasarkan atas kehormatan bersama dalam perlakuan kepada yang lain.

Gambar 4.1 Embrio Kemunculan CSR dan Sirkulasinya



CSR bermula dari bisnis bergerak dari investasi kinerja maupun investasi finansial kemudian ditanamkan kepada alam dengan menggunakan instrumen teknologi. Hasilnya berupa produk yang kemudian di masukkan ke dalam sistem mekanisme pasar dengan targetnya, yaitu *civil society*. Oleh karena itu, bisnis yang dioperasikan bekisar pada investasi alam sosial atau interaksi antara pebisnis dan konsumen. Tuntutan masyarakat (*demand*) yang pada awalnya merupakan embrio lahirnya CSR, mencakup aset para pebisnis untuk para konsumennya. Hal ini tumbuh dari alam sosial itu sendiri yang sejatinya menjadi tempat mekanisme bisnis itu berfungsi. Kondisi sirkulasi dari aliran bisnis tersebut pada dasarnya

adalah perkembangan masalah antara pebisnis dan konsumen semata. Pada praktiknya, *welfarisme* seperti yang ditekankan Hare berbeda dari konsep *happiness* oleh utilitarianis sebelumnya. *Welfarisme* dalam konsepnya didedikasikan untuk khalayak yang juga merupakan investasi perusahaan kepada konsumen. Maka, tidak ada *reasoning* logis yang bisa menghalangi pemberlakuan kebijakan universal CSR ini karena baik pebisnis maupun konsumen, keduanya terkena imbas yang baik.

Problem metafisik utama mendarat pada pengoperasian bisnis terhadap hak positif individu dalam alam (*nature*). Jika dilihat dari sisi antroposentrisme, manusia bebas berinvestasi kepada alam, tetapi investasi ini tidak menjadikannya untuk bertransformasi mengeksploitasi alam. Manusia sibuk mengurus investasi tentang kerja (*labour*) dan waktu (*time*). Alam (*nature*) merupakan hak milik bersama. Pemilik modal yang berinvestasi di dalamnya, bukan dalam pengertian menjadikan alam sebagai miliknya. Maka, jika CSR berkisar pada masalah tanggung jawab moral, tanggung jawab terbesar justru adalah kepada alam (*nature*) sebagai hak bersama. Alam dan manusia adalah kesatuan interaktif yang saling membutuhkan. Alam juga memiliki nilai intrinsik karena itu manusia tidak dapat menggunakan pandangan antroposentris semata untuk mencapai tujuan terlebih dalam kasus memaksimalkan *profit* bisnis. Bumi memiliki sumber daya terbatas, eksploitasi dari investasi bisnis kepada daya dukung alam diharapkan mempertimbangkan kepentingan masa depan. Pertimbangan korporasi membawa sudut pandang ke arah kepedulian pada ekologi juga, setidaknya tindakan para pebisnis adalah sebagai ekosentrisme atau *konsumerisme hijau*³⁶.

Adapun konsep tanggung jawab yang bermuatan sosial di dalam CSR merupakan tanggung jawab kolektif yang bukan mengartikan penjumlahan dari tanggung jawab beberapa individu di dalamnya. Tanggung jawab kolektif adalah tiap-tiap personal setiap individu secara pribadi tidak bertanggung jawab secara

³⁶ *Motif untuk menggerakkan perusahaan agar beroperasi menghasilkan produk yang ramah lingkungan.* (Nugroho, 1997)

langsung, tetapi semua individu bertanggung jawab dalam kuota sebagai kelompok atau secara keseluruhan. Perubahan hanya terjadi melalui tindakan kolektif. Meskipun demikian, tanggung jawab kolektif pun dibentuk dan digerakkan oleh individu yang melaksanakan tindakannya dengan efektif dan sebaik-baiknya. Dalam kasus yang bagaimanapun moral seharusnya bergabung bersama untuk menciptakan landasan bagi rasa percaya yang bisa dibenarkan untuk perkembangan masyarakat ke arah lebih baik.

Tanggung jawab sosial diperlukan dalam pengoperasian, keberlanjutan, serta masa depan bisnis yang berangkat dari hakikat bisnis itu sendiri. Kebutuhan dan harapan masyarakat bersifat tidak menentu atau tentatif. Demikian bisnis harus tanggap dan mampu beradaptasi dalam dinamika perubahan tersebut. Orientasi bisnis pun berubah dengan sendirinya karena perubahan tersebut. Jika bisnis tetap mengorientasikan kepentingan di satu sisi, maka bisnis akan ambruk dari dalam dengan sendirinya. Mustahil bisnis modern saat ini akan berkembang tanpa menghiraukan dimensi sosial kehidupan sekitar, terlebih kepada elemen yang langsung terkena dampaknya. Sebagai konsekuensinya, bisnis tidak bisa menutup mata atau sekiranya tidak membuka diri terhadap gambaran *switch role* dalam perspektivisme universal, terlebih terhadap dampak langsung dari kegiatannya.

Setiap manusia memiliki *free will* untuk mengubah perspektifnya. Tetapi, dalam substansi dan kapasitas etis, masalah bisnis tidak pernah bebas dari nilai. Bagi kaum penanam modal, layaknya tidak ada rahim yang paling nyaman bagi uang dibandingkan kapitalisme. Akan tetapi, kapitalisme sama halnya dengan kanibalisme yang mampu mengarahkan individu menjadi sekelompok materialis. Inilah kekhawatiran pada menjamurnya bisnis korporasi. Negara selayaknya turut mengambil peranan untuk melindungi rakyat dari kaum pemilik modal yang arbiter. Selalu ada kehendak baik (*good will*) yang datang dari dalam diri individu yang kemudian *innate direction* mengarahkannya kepada *prima facie* sehingga jatuh pada imperativisme. Keputusan etis tersebut mampu diuniversalkan

sehingga mendapatkan pembelaan yang membawa kendali sebuah kondisi untuk tetap memelihara pedagogi moral.

Satu hal yang paling berpengaruh dalam konteks yang tidak lepas dari tema tanggung jawab adalah mengenai apapun yang kita lakukan dan pikirkan, akan berakibat penuh pada dunia. Ini terlepas dari kita menyadarinya atau tidak. Terlebih dahulu berfikir kritis sangat dibutuhkan sebelum melakukan sebuah tindakan. Tanggung jawab adalah mengenai pemberian jawaban atas tindakan yang menjadi pertanggung jawaban suatu subjek. Maka subjek yang mengimplikasikan sebuah tanggung jawab adalah subjek dalam kapasitas etis yang berkesadaran disertai dengan intuisi, *desire*, dan *free will*-nya. Manusia hidup di dalam persilangan sosialiasi dan sosialitas. Masyarakat adalah sebetuk sistem yang dibutuhkan peleburan untuk memprioritaskan sesuatu agar menjadi tolak ukur bersama. Karena ketika kepentingan bersama terpenuhi, hal tersebut sekaligus melindungi persilangan dari *chaos*. Naluri manusia adalah menginginkan *interest*, hak-haknya terlindungi dalam keharmonisan, dan keteraturan hidup di bawah etika normatif.

Keterpaduan teori dan kasus ini diajukan sebagai pembenaran pemberlakuan legitimitasi tanggung jawab yang bermuatan sosial. Meskipun pada akhirnya akan melebar karena dibutuhkan banyak aspek, namun pertimbangan ini ditawarkan agar jenjang pelaksanaan normatif dan keadaan *de facto* tidak terlampaui jauh. Etika menganalisis praktik-praktik diskursus dengan menegaskan kekuatan dan sanksi hukum sehingga memperkuat eksistensi legitimitasi sebagai kontrol yang mengikat. Disamping sebagai makhluk berkesadaran, individu juga akan merasakan peran imperativisme dalam dirinya secara intuitif atau perasaan bersalah yang didapatkan dari kausalitas natural logis tindakannya sendiri.

Penerjemahan teori Kantian ke dalam pragmatisme CSR ini akan selalu membutuhkan ketegasan dari topan hukum. Permasalahan etika memang bersifat aporetic, namun akan selalu ada *feedback* yang membuat kasuistik ini mendarat. Meskipun kontrol terhadap hukum bersifat memaksa, namun kesadaran individu

membuat keputusan ini menjadi hasil dari persetujuan. Dualisme dari *rule ethics* dan *act ethics* membutuhkan indikator penengah sebagai bahan pertimbangan yang menjembatannya agar pelaksanaan implementasi tanggung jawab sosial ini tidak hanya dilihat dari sisi kegunaan saja. Imperativisme dan nuansa normatif bukan hanya sekadar dipandang sebagai drama turki semata, melainkan tindakan implementatif, teleologis, sekaligus komunikatif. Tindakan komunikatif yang dimaksud Habermas inilah yang dibutuhkan untuk memahami diskursus ini.

Pertimbangan lain yang menjadi mekanisme kontrol adalah sisi kebebasan yang diungkapkan Amartya Sen dalam *Development as Freedom*. Penerapan CSR akan berkontribusi pada pembangunan negara. Maka, kebebasan dapat saja menjadi tujuan utama dari pengembangan sekaligus sarana utama pembangunan. Pembangunan dapat ditingkatkan dengan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. CSR menyuarakan kebebasan masyarakat mayoritas yang terkena dampak langsung dari pengoperasian bisnis sekaligus memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan negara. Karena *development* menjadi proses memperluas kebebasan manusia, pembangunan memerlukan penghapusan sumber utama dari *unfreedom*.

Kebanyakan kritik terhadap utilitarianisme klasik terfokus pada *wealth* dan kepuasan yang didasari nilai guna. Kritik juga datang terhadap libertarian yang tidak jauh lebih baik selain dari proses untuk berdemokrasi itu sendiri. Jika ini dikaitkan dengan masalah keadilan, maka akan selalu ada evaluasi terhadap makna keadilan, seperti pada libertarian dalam proses memilih dan kebebasan bertindak, atau Rawlsian pada kebebasan individu, keadilan juga akan menjadi bahan pertimbangan utilitarian terhadap *well-being* yang disempurnakan pada teori Hare mengenai *universal perspectivisme*. Jika kritik terhadap utilitarian selalu ditekankan pada kuantitas jumlah, maka kombinasi dari analisis dan pragmatik ini akan menjadi pendekatan dasar yang berguna dalam substansi jangkauan luas. Kebebasan korporasi atau demokrasi masyarakat sekitar yang bersilangan, diseimbangkan oleh Hare yang dikembalikan dalam ranah etika untuk saling bersimpatik dan melebur.

Beberapa melihat kebebasan sebagai suatu gangguan potensial terhadap stabilitas politik dan pembangunan. Mereka merekomendasikan intervensi kekuasaan luas (represif) dari negara dalam mencekik kebebasan, gagasan dan perusahaan atau korporasi, serta untuk melumpuhkan kerja dari setiap instansi dan kerjasama. Elemen penting dari pembangunan manusia adalah kebebasan budaya dan *social cost* yang tidak bisa dibeli atau justru malah terkikis karena kehadiran sistem baru dari korporasi. Hubungan antara keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab ditegaskan kembali dari sisi pembangunan negara itu sendiri. *Human Capital* adalah langkah yang maju, tapi masih sangat kecil untuk menahan dampak serta efek tidak langsung dalam perubahan sosial, kultural, maupun toleransi etis.

Antara *social choice* dan perilaku individu memberi kesimpulan bahwa dibutuhkan pendasaran informasi yang lebih kaya dan *unintended changes's* Hayek yang mungkin diprediksi. Keegoisan pada behaviouristik individu memungkinkan berujung pada kapitalisme sehingga membutuhkan nilai yang menyentuh etika bisnis, kontrak, dan legalisasi. CSR mampu memberikan kualitas kehidupan yang baik. Selanjutnya ini mampu diukur dari bagaimana kebebasan menyokong kapabilitas masyarakat yang tidak lagi merasa terkolonisasi di bawah sistem kapitalis. Jumlah produksi atau GDP yang mampu dihasilkan tidak menjadi tolak ukur perbaikan kualitas hidup. Bagi Sen, *Human Development Index* (HDI) mampu memberikan indeks gabungan yang mengukur pencapaian rata-rata standar hidup yang layak dari pada *Happiness National Index* (HNI) yang hanya memperhitungkan aspek fungsionalitas. HDI menawarkan alternatif yang kuat sebagai ukuran kesejahteraan manusia karena konsep pembangunan manusia jauh lebih luas jika tidak lagi terjajah dari sistem kapital korporasi.

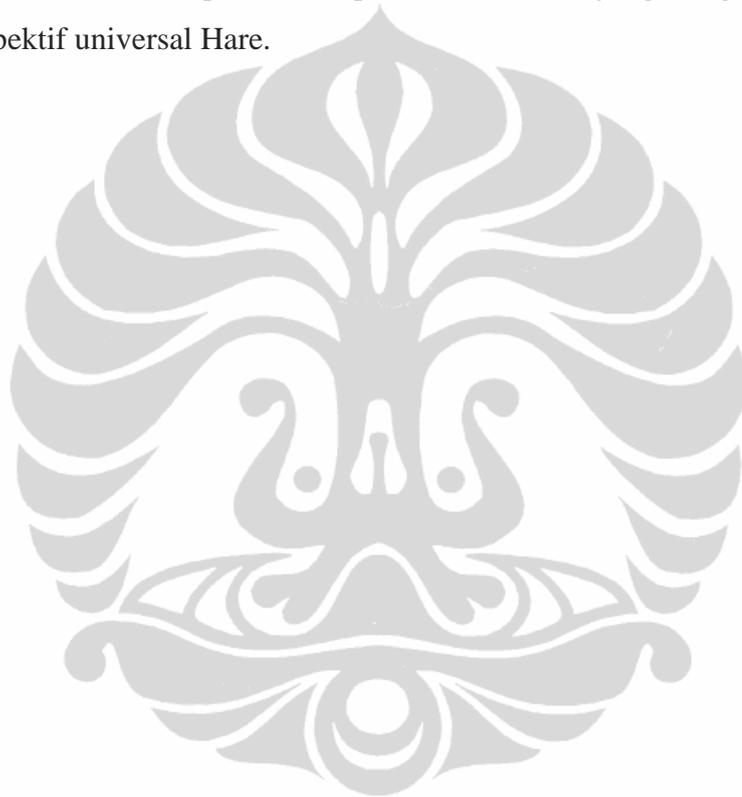
John Stuart Mill dalam *Principal of Politic Economy* menganjurkan bahwa pemerintah harus mengambil peranan dalam kegiatan ekonomi, baik dalam pengawasan, penyediaan jasa, maupun perlindungan bagi masyarakat marginal dan kekuatan pasar. Campur tangan pemerintah dalam jumlah minimum

setidaknya menjaga kecurangan atau kapitalisme terselubung dari kekuatan asing yang ingin menguasai pasar, alam, dan menargetkan konsumen. Seperti halnya yang Keynes katakan di awal pembahasan bahwa *invisible hands* dan *free-market* dalam sistem ekonomi kapitalis, dapat saja dikuasai oleh perusahaan bisnis raksasa dengan kepentingan tertentu. Untuk itu, pemerintah harus mengambil alih kendali sistem ekonomi dengan memberdayakan kebijakan yang memprioritaskan kebahagiaan masyarakat umum.

Oleh karena itu, kebijakan dan peran pemerintah di dalam tindak CSR sendiri bukan berarti membatasi hak-hak manusia, tetapi justru memfasilitasi dan mengatur pola-pola kebebasan agar tidak beralih menjadi anarkis. Seperti dalam teori Locke bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki kehendak baik yang sama sehingga menginginkan berada di bawah kontrol, keteraturan, atau kontrak sosial. *Human being* sebaiknya mampu menyatukan toleransinya untuk menghindari ketidakadilan pada dirinya sendiri. Karena manusia bukanlah hakim yang baik untuk dirinya sendiri sehingga kontrak sosial menjadi jawaban untuk menghindari potensi konflik atas kepentingan masing-masing individu. Hal inilah yang menengahi legalisasi dalam moralitas. Legalisasi sendiri tidak membedakan hukum dan moral. Hukum menjadi positivisasi moral dari kehendak baik yang sama dari setiap orang (*sense of common sense*).

Demikian pertimbangan filosofis dan sudut pandang etika bahwa penulis menggunakan teori perspektivisme universalitas Hare sebagai kerangka yang dapat memperkuat pembenaran etis terhadap CSR. Tanggung jawab moral dapat didefinisikan sebagai jawaban dan pertanggungjawaban dari segala tindakan yang dilakukan dan muncul dari dalam kesadaran subjek sebagai makhluk yang bermoral. Moralitas memperkuat eksistensi *human being* yang hidup di dalam persilangan sosial. Teori ini mencakup baik kesejahteraan dan kemakmuran bersama, serta pengaruh imperatif Kantian sebagai kelebihan pemikiran Hare. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori ini sebagai objek formal penulisan dalam mengkaji materi *Corporate Social Responsibility*.

Pada akhirnya dibutuhkan sinkronitas internal sebagai instrumen dan mediator di dalam kesadaran yang digerakkan oleh satu maha perencana (ilahiah). Seperti halnya kembali pada konsep Kant. Pembeneran pada metode perspektivisme yang berlahankan moralitas, sejatinya adalah selalu berangkat dan beranggapan dari intuisi terbaik dari sisi seorang manusia. Oleh karena kita semua tercermin bagi satu sama lain, memiliki *sense of common good* yang sama layaknya maksim, “Aku melihat diriku dalam kamu, dalam orang-orang dan di dalam alam³⁷.” Demikian implementasi pembeneran CSR yang dikaji dari sudut pandang perspektif universal Hare.



³⁷ Dewi Lestari, 2001 dalam KPBJ.

BAB V PENUTUP

Corporate Social Responsibility adalah sebetulnya solusi logis untuk menegasikan mitos bisnis amoral. Dalam telaah dan pertimbangan berbagai diskursus nilai dalam ranah filsafat, CSR merupakan sebetulnya positivisasi norma moral yang sejalan dengan pengembalian hutang budi kepada masyarakat. Pada dasarnya manusia memiliki *sense of common good* yang sama untuk mampu melebur dan menyamakan persepsi tentang sesuatu yang baik (*good will*) dalam diri mereka. Dalam bentukan masyarakat dengan sosio-kultur yang menuntut permasalahan kode etik di dalam bisnis, nilai moral pada bisnis harus diberlakukan secara universal. Karena pada hakikatnya bisnis adalah organisasi yang beroperasi dalam tempat dan ruang gerak ditengah masyarakat, pertanggungjawabannya pun ditujukan pada konsekuensinya di masa depan yang terpengaruh oleh tindakan saat ini. Pertimbangan utamanya adalah *welfarisme* dan pencapaian tujuan para pebisnis untuk merangkul masyarakat sebagai target bisnis itu sendiri. Pembeneran etis dengan kerangka teori dari perspektivisme universalisabilitas Hare mampu meluruskan diskursus mengenai prinsip moral. Legalisasi CSR sendiri tidak membedakan hukum dan moral karena hukum layaknya positivisasi moral dari kehendak baik yang sama dari setiap orang.

Istilah *corporate* dalam *Corporate Social Responsibility* sendiri menekankan pada kata ‘korporasi’ yang merupakan nomina tunggal dengan konotasi jamak. Kata ini diambil dari bahasa Latin ‘*corpus*’ yang artinya badan atau tubuh dan Plato mendefinisikan fungsinya sebagai kesediaan menjaga dan melindungi bagian lainnya. Bisnis bersentuhan dengan masyarakat, berinteraksi dengan sosial, dan bergerak di dalam ruang pada ruang masyarakat, maka korporasi jatuh pada dua dimensi, yakni ekonomi dan sosial. Ini sesuai dengan konsep universalisabilitas dan perspektivisme yang merujuk pada preskripsi dari situasi kebanyakan guna menunjukkan respon yang *equal* dan inklinasi (kecenderungan) dalam memperlakukan kepentingan (*interest*) orang lain seperti

halnya milik kita sendiri (*The Golden Rule*). Kecenderungan ini memberikan pertimbangan tentang preferensi konsekuensi yang akan terjadi setelahnya. Teori Hare berdiri pada posisi *act-utilitarianisme* yang sekaligus mencakup *rule-utilitarianisme*.

Peran CSR muncul sebagai penyuaran hak-hak komunal masyarakat marginal yang menuntut *human right*, *social cost*, dan *the natural nature* yang tentunya memiliki dampak dari tindak pengoperasian korporasi. Secara kronologi, konsep CSR merupakan koreksi (*demand*) sebuah kesalahan perjalanan operasional kerja korporasi. Kombinasi universalisabilitas dan perspektivisme mampu menunjukkan tindakan yang rasional dengan memperlakukan kepentingan (*interest*) masyarakat seperti halnya untuk kepentingan perusahaan. Kemudian pemberlakuan CSR sebagai keputusan moral universal diperkuat dengan inklinasi yang memberikan ruang dan reflektisitas terhadap *interest* masing-masing individu. Teori perspektivisme Hare mengenai pertukaran peran (*if I were in their shoe*) memberikan gambaran tentang konsekuensi yang akan terjadi.

Kebahagiaan atau dalam hal ini kesejahteraan (*welfarisme*) substansial umum akan bergerak dari yang umum ke arah yang lebih umum. Karena dalam jangka panjang, alih-alih kedua belah pihak antara *shareholders* dan *stakeholders* pun mendapat pencapaian dari *interest* yang seimbang (*equal*). Hare menggunakan *welfarisme* sebagai unsur utilitarianismenya yang sebelumnya Bentham dan Mill menyatakan ini sebagai *happiness* ditujukan pada definisi kesenangan yang mengosongkan diri dari rasa sakit. Hare juga menyertai pertimbangan konsekuensi sebagai preskripsi sebelum dilakukannya suatu tindakan untuk kebaikan jumlah rata-rata (*aggregationisme*). Utilitarianisme berbeda dari *perfectionisme* atau bahkan egoisme karena pertimbangan konsekuensi-konsekuensi tersebut memungkinkan untuk ditingkatkan atau dikurangi, demi kesejahteraan semua yang terpengaruh secara imparsialitas di dalamnya.

Penalaran moral tidak dapat menyimpulkan hasil akhir sebuah fakta, tapi mampu menguji konsekuensi dan konsistensi yang datang karenanya. Prinsip moral mengeksplorasi prinsip logis seperti bertukar posisi (*switch role*) dan tindakan yang sebaiknya dilakukan dalam situasi yang sama. Sudah seharusnya memperlakukan *interest* orang lain seperti seolah-olah kepentingan pada sendiri. Tanggung jawab sosial memang diperlukan dalam pengoperasian, keberlanjutan, dan masa depan bisnis yang berangkat dari hakikat bisnis itu sendiri. Satu hal yang paling berpengaruh dalam konteks yang tidak lepas dari tema tanggung jawab adalah mengenai apapun yang kita lakukan dan pikirkan, akan memiliki konsekuensi yang berakibat penuh dari tindakan tersebut.

Kesadaran etis menimbulkan rasa kewajiban yang menggerakkan manusia untuk patuh tanpa tergoda dengan pilihan lain. Dunia moral bersifat mutlak adanya dan karena kemutlakannya, maka hal ini berlaku tanpa syarat sehingga inilah yang oleh Kant disebut sebagai imperatif kategoris (*categorical imperative*). Kategori imperatif berlaku tanpa peduli akan akibat yang mungkin timbul karena mengejar suatu tujuan akhir yang berasal dari roh absolut (pasti baik). Kesadaran etis yang termanifestasi pada sebuah tanggung jawab memberikan keharmonisan di dalam penataan kemasyarakatan. Dengan melihat dampak yang ditimbulkan akibat dari kebebasan yang bersilangan, putusan etis CSR adalah implementasi *good will* dari refleksi terhadap kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Kesepakatan pada kepentingan bersama secara universal merupakan pertimbangan pada tujuan yang lebih baik. Di dalam masyarakat, perbenturan kebebasan dihindari sedemikian rupa. Individu sebagai bagian dari sistem masyarakat tempat sebagian besar kehidupannya berlangsung, harus mampu memilah dan mengutamakan prioritas yang harus didahulukan, serta pertimbangan konsekuensi di masa mendatang. Masyarakat merupakan sebetuk sistem kerjasama dari makhluk bermoral. Kepentingan dan kebebasan personal diletakkan dalam kesadaran *human being* sebagai makhluk sosial dimana porsi

kewajiban sosial melebihi kepentingan pribadi. Ini merupakan pertimbangan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik karena kehendak umum juga mencakup kehendak individu. Kebahagiaan bergerak dari umum ke yang lebih umum sehingga tindakan moral yang berlaku umum dapat menghasilkan akibat yang lebih baik.

Dari contoh kasus nyata yang telah dijabarkan sudah seharusnya pebisnis kembali pada kesadaran etis untuk bertanggung jawab secara moral. Penderitaan (*sacrifice*) yang dialami masyarakat yang terkena dampak akibat pengoperasian bisnis, memberikan keputusan etis bahwa CSR memang dibutuhkan dalam kondisi universalitas. Dengan mereifikasikannya dari sudut pandang etika, diharapkan CSR menjadi sebuah pertimbangan terbaik untuk dapat diberlakukan secara universal. Telaah filosofis CSR dengan bertolak dari kerangka teori utilitarianisme R.M. Hare mencakup himbauan karena pada kenyataannya masih saja ada perusahaan yang belum menyadari betapa pentingnya sebetulnya tanggung jawab moral. CSR datang dari dalam diri sebagai bentuk esistensi manusia bermoral dan bukan sekedar embun penyejuk pemberi harapan untuk mendapatkan *feedback* terhadap perusahaan. Teori perspektivisme universalitas Hare digunakan dalam pembenaran CSR karena meliputi baik kesejahteraan dan kemakmuran bersama, disamping pengaruh imperatif Kantian sebagai kelebihan pemikiran Hare.

Pada akhirnya korporasi adalah sebuah komunitas yang beroperasi dan bekerja di tengah-tengah komunitas lain. Bisnis adalah sebuah wacana pribadi yang berinteraksi dengan wacana-wacana lain. Oleh karena itu, sebuah organisasi bisnis tidak perlu menunggu reaksi publik atas konsekuensi yang akan datang karena tindakannya hari ini. CSR dan etika bisnis menentukan kesuksesan usaha bisnis serta memberikan pencitraan dan bonafiditas yang berujung pada *fairness* kedua belah pihak. Sejauh manusia adalah manusia, *self-imposed* yang berasal dari dalam dirinya mengenai prinsip nilai dan moral akan tetap berlaku dimanapun dan selalu dapat berlaku universal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Acuan

- Bertrens, K. 2007. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hare, R.M. (1988). eds, *Hare and Critics: Essays on Moral Thinking*. Oxford: Clarendon Press.
- (1963). *Freedom and Reason*. Oxford: Clarendon Press
- (1991). *Moral Thinking: Its Levels, Method and Point*. Oxford: Clarendon Press.
- (1952). *The Language of Moral*. Oxford: Clarendon Press
- (1993). "Universal Perspectivism". P. Singer (Ed.), *A Companion to Ethics*. Oxford: Blackwell.
- Widjaja, Gunawan., & Pratama, Yeremia Adi. 2008. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat.

Buku Referensi

- Bauman, Zygmunt. (1999). *THE SELF IN A CONSUMER SOCIETY*. THE HEDGEHOG REVIEW.
- Brandt, Richard B. 1959. *Theory Ethical: The Problem of Normative and Critical Ethics*. (Arthur E Murphy, Penerjemah.) Englewood: Prentice-Hall INC.
- Ife, Jim., & Tesoriero, Frank. 2006. *Aternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Community Development* (ed. 3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Keraf, A Sonny. 1991. *Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lesser, A. Harry. 2001. *Ethical Relativism: An Analysis of the Foundation of Morality*, (Mohammad A. Shomali, Penerjemah.) Jakarta: Serambi.
- Mill, John Stuart. 2005. *On Liberty: Perihal Kebebasan*. (diterjemahkan oleh Alex Lanur). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ritzer. George, 1997, *Postmodern, Social Theory*, New York, The McGraw-Hill Companies. INC
- Sen, Amartya. 2000. *Development As Freedom*. New York: Anchor Books.
- Sen, Amartya. 1988. *On Ethics and Economics*. Blackwell Publishing.
- Suseno, Frans Magnis., Djiwandono, J. Soejati., & Prakarsa, Wahyudi. 1994. *Etika Bisnis: Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suseno, Frans Magnis. 1987. *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Kanisius.
- Suseno, Frans Magnis. 1982. *Etika Umum*. Jakarta: Diktat untuk STF Driyarkara.
- Suseno, Frans Magnis. 1997. *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, Frans Magnis. 1998. *13 Model Pendekatan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Pengajar Filsafat UI, (Editor Rocky gerung). 2006. *HAM, Teori, Hukum, Kasus*. Jakarta : Filsafat UI press.
- Yosephus, L. Sinour. 2010. *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap perilaku Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Majalah

- Keraf, A. Sonny. (1997). *Etika Bisnis Global : Etika Siapa? Nilai yang Mana?* Majalah Filsafat Driyakara (Tahun XXIII, no. 3 Hlm. 18-32). Seksi Publikasi Senat Mahasiswa STF Driyarkara Jakarta.

Nugroho, Alois A. (1997). *Lima Pandangan tentang Relevansi Etika Bagi Dunia Bisnis : Sebuah Pemetaan Awal*. Majalah Filsafat Driyakara (Tahun XXIII, no. 3 Hlm. 3-17). Seksi Publikasi Senat Mahasiswa STF Driyakara Jakarta.

Widiyono, A. Nugroho. (2002). *PANDANGAN ZYGMUNT BAUMAN MENGENAI ETIKA POSTMODERN*. Majalah Filsafat Driyakara (Tahun xxv. No.3 hlm. 37-51). Seksi Publikasi Senat Mahasiswa STF Driyakara Jakarta.

(2007). Majalah Bisnis & CSR, *Reference for Decision Maker*. La Tofi Enterprise.

Karya Ilmiah atau Tesis

Wiryan, Nizam Jim., 1988. Etika Bisnis dan Relevansinya di Indonesia (Suatu Usaha Telaah falsafati Etika Korporasi), skripsi pada program Sarjana Sastra Studi Filsafat FIB UI. Depok.

Mahyuni, Restu Debrina,. 2002. Pembetulan Etis Hukuman Legal dalam Sudut Pandang Utilitarianisme (Sebuah Kajian Filsafat John Stuart Mill), skripsi pada program Sarjana Humaniora Studi Filsafat FIB UI. Depok.

Prima, Nugroho Enos. 2011. Pasar Itu Bebas dan Adil, skripsi pada program Sarjana Humaniora Studi Filsafat FIB UI. Depok.

Media Elektronik

Anonymous. 28/07/2010,11:36pm. Kronologi Bencana Lumpur Lapindo. A geoscientist concern on hot mud flow in East Java, Indonesia. Januari 8, 2009. 11:45 WIB. DOKMI/ip. (Sumber: Wakil Kepala Bidang Eksternal Komnas HAM Nur Kholis). <http://hotmudflow.wordpress.com/2010/07/28/3088/>

- Hare's Two Level Utilitarianism*. (2008). Department of Philosophy, Texas A&M University. www.philosophy.tamu.edu
- Mayled, Jon. *Utilitarianisme*. (2002). Presented Power Point about Utilitarianism.
- McDermott, Michael. (1983). *Hare Argument for Utilitarianism*. Blackwell Publishing. *The Philosophical Quarterly* Vol. 33, No. 133
- Price, A.W. 2004. *Richard Mervyn Hare*. The British Academy: London.
- Stafforini, Pablo. (2007, Maret 21). *R. M. Hare. Resources on Hare, including writings by and about him*. diakses Mei 16, 2012. <http://utilitarian.net/hare>
- Tutu, Budi. 03/03/2011. *CSR Newmont vs Telkom*. Mei 16, 2012. (<http://www.scribd.com/doc/49944371/2-csr-newmont-vs-telkom>) diakses tanggal 16 Mei 2012.
- (2010). CSR Indonesia, www.csrindo.com (Modul Seminar dalam CSR Indonesia on Pekan Lingkungan yang disunting dari wikipedia.com)